

INDONESIA  
ECONOMIC  
QUARTERLY

Desember 2017

# Mewujudkan hasil desentralisasi



**PERKEMBANGAN TRIWULANAN  
PEREKONOMIAN INDONESIA**  
*Mewujudkan hasil desentralisasi*

Desember 2017





## Kata Pengantar

Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia (*Indonesia Economic Quarterly, IEQ*) mempunyai dua tujuan. Pertama, untuk menyajikan perkembangan utama perekonomian Indonesia dalam tiga bulan terakhir, dan menempatkan dalam konteks jangka panjang dan global. Berdasarkan perkembangan ini, serta perubahan kebijakan dalam periode tersebut, laporan ini menyediakan perkembangan terkini secara rutin tentang prospek perekonomian dan kesejahteraan sosial Indonesia. Kedua, laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia ini memberikan penilaian mendalam terhadap isu-isu ekonomi dan kebijakan tertentu, dan analisis terhadap tantangan pembangunan jangka menengah Indonesia. Laporan ini ditujukan untuk khalayak luas termasuk pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, pelaku pasar keuangan, serta komunitas analis dan profesional yang terlibat dan mengikuti perkembangan ekonomi Indonesia.

Laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia merupakan laporan Bank Dunia di Jakarta dan mendapatkan bimbingan editorial dan strategis oleh dewan editorial yang dipimpin oleh Rodrigo A. Chaves, *Country Director* untuk Indonesia. Laporan ini disusun oleh tim *Macroeconomic dan Fiscal Management Global Practice*, dibawah bimbingan Ndiame Diop and Frederico Gil Sander (*Lead Economist*). Dipimpin oleh Derek H. C. Chen, *Senior Economist* dan *lead author*, tim inti terdiri dari Arsianti, Dwi Endah Abriningrum, Indira Maulani Hapsari, Ahya Ihsan, Yus Medina, Alief Aulia Rezza, Jaffar Al-Rikabi, Dhruv Sharma, and Pui Shen Yoong. Dukungan administrasi diberikan oleh Sylvia Njotomihardjo. Diseminasi dilakukan oleh Nugroho Sunjoyo, Jerry Kurniawan, dan GB Surya Ningnagara atas bimbingan Lestari Boediono Qureshi.

Edisi ini juga mencakup kontribusi dari Indira Maulani Hapsari (Bagian A.1), Pui Shen Yoong (Bagian A.2), Dwi Endah Abriningrum (Bagian A.3), Dhruv Sharma (Bagian A.4), Alief Aulia Rezza (Bagian A.5, Kotak 3), Dhruv Sharma dan Alief Aulia Rezza (Bagian A.6), Pui Shen Yoong, Jaffar Al-Rikabi and Yus Medina (Bagian A.7), Jaffar Al-Rikabi (Kotak 2, 4), Derek H. C. Chen (Bagian A.8 dan Kotak 1); Yongmei Zhou, Kathleen Whimp, Ahmad Zaki Fahmi, Blane Lewis, Noriko Toyoda, Agusta Lumban Tobing, Pramasavhira, Bambang Suharnoko, Cut Dian Agustina, Prasetya Dwicahya (Bagian B. Desentralisasi dan Kotak 5, 6, 7); Fitria Fitriani (Lampiran). Laporan ini juga mendapat masukan dari diskusi mendalam dengan dan masukan dari Ekaterina T. Vashakmadze (*Senior Economist*, DECPG, Bank Dunia), Congyan Tan (*Senior Economist*, EAPCE, Bank Dunia), David Nellor (*Australia Indonesia Partnership for Economic Governance*).

Laporan ini disusun oleh para staf *International Bank for Reconstruction dan Development* Bank Dunia, dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Australia (Departemen Luar Negeri dan Perdagangan atau *Department of Foreign Affairs dan Trade, DFAT*) melalui program *Support for Enhanced Macroeconomic dan Fiscal Policy Analysis* (SEMEFPA).

Temuan-temuan, interpretasi dan kesimpulan-kesimpulan yang dinyatakan di dalam laporan ini tidak mencerminkan pandangan AusAID dan Pemerintah Australia, para Direktur Pelaksana Bank Dunia atau pemerintah yang diwakilinya. Bank Dunia tidak menjamin ketepatan data-data yang termuat dalam laporan ini. Batas-batas, warna, denominasi dan informasi-informasi lain yang digambarkan pada setiap peta di dalam laporan ini tidak mencerminkan pendapat Bank Dunia mengenai status hukum dari wilayah atau dukungan atau penerimaan dari batas-batas tersebut.

Photo merupakan Hak Cipta Bank Dunia. Semua Hak Cipta dilindungi.

### **Untuk mendapatkan lebih banyak analisis Bank Dunia tentang ekonomi Indonesia:**

Untuk informasi mengenai Bank Dunia serta kegiatannya di Indonesia, silakan berkunjung ke website ini [www.worldbank.org/id](http://www.worldbank.org/id)

Untuk mendapatkan publikasi ini melalui e-mail, silakan hubungi [madriani@worldbank.org](mailto:madriani@worldbank.org). Untuk pertanyaan dan saran berkaitan dengan publikasi ini, silakan hubungi [dchen2@worldbank.org](mailto:dchen2@worldbank.org).

## Singkatan

Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BI	Bank Indonesia
BOP	Balance of Payment
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK/Supreme Audit Agency)
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPNT	Bantuan Pangan Non Tunai
BPS	Badan Pusat Statistik
CCB	Cyclical Capital Buffe
CPA	Comprehensive Performance Assessment
CPI	Consumer Price Index
CPO	Crude Palm Oil
DAK	Dana Alokasi Khusus
DID	Dana Insentif Daerah
DKI Jakarta	Daerah khusus Ibukota Jakarta
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EKPPD	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Evaluation of Local Government Implementation)
EMCI	Emerging Market Currency
ESDM	Ministry of Energy and Mineral Resources
FDI	Foreign Direct Investment
GDP	Gross Domestic Product
GFCF	Gross Fixed Capital Formation
GMM	Generalized Method of Moments
ILPPD	Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
JCI	Jakarta Composite Index
KemenPAN-RB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Ministry of Administrative and Bureaucracy Reforms)
KKPOD	Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (Regional Autonomy Watch)
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
LGDP	Local Government Development Program
LHS	Left Hand ide
LKPJ	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
LNG	Liquefied Natural Gas
LPPD	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
MoF	Ministry of Finance
MenPan RB	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
MOHA	Ministry of Home Affairs
NGO	Non-Governmental Organization
NPL	Non-Performing Loans
OECD	Organization of Economic Cooperation and Development
O&G	Oil & Gas
OPEC	Organization of the Petroleum Exporting Countries
PISA	International Student Assessment
PKL	Program Keluarga Harapan
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PMI	Purchasing Managers' Index

P2TPD	Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintah Daerah (the Initiative for Local Governance Reform)
RHS	Right Hand Side
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (Evaluation of Government Institution Performance Accountability System)
SIKD	Sistem Informasi Keuangan Daerah (Regional Financial Information System)
SOE	State of Enterprises
SUN	Surat Utang Negara
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TA	Technical Assitant
ToT	Terms of Trade
UN	Ujian Nasional (National Exam)
VAT	Value added Tax
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified opinion)

## Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>C</b>
<b>SINGKATAN .....</b>	<b>D</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF: MEWUJUDKAN HASIL DESENTRALISASI.....</b>	<b>I</b>
<b>A. PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISCAL TERKINI.....</b>	<b>1</b>
1. Kondisi perekonomian global terus mendukung.....	1
2. Investasi dan ekspor menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi sementara konsumsi rumah tangga menunjukkan tanda-tanda pemulihan tentatif .....	4
3. Tekanan inflasi terus mereda di Triwulan ke-3 didukung oleh harga pangan dan non-pangan yang terkendali.....	11
4. Kondisi keuangan makro Indonesia secara umum tetap stabil di Triwulan ke-3.....	13
5. Harga komoditas menguat di Triwulan ke-3 .....	17
6. Defisit neraca transaksi berjalan mengecil karena surplus perdagangan meningkat .....	19
7. Peningkatan pemungutan penerimaan mendukung pengeluaran di tahun 2017, namun pengelolaan fiskal yang hati-hati tetap penting dilakukan di tahun 2018.....	22
8. Perkiraan ekonomi membaik namun risiko tetap ada.....	32
<b>B. TOPIK FOKUS.....</b>	<b>35</b>
<b>Membuat Desentralisasi Demokratis Menghasilkan Peningkatan Layanan Publik di Daerah: Peran Pemerintah Pusat.....</b>	<b>35</b>
a. Apa yang terjadi dengan pemberian layanan daerah selama proses desentralisasi? .....	35
b. Bagaimana kita dapat membuat perbedaan yang signifikan (move the needle) pada kinerja pemerintah daerah? .....	43
c. Menyelaraskan insentif untuk mendorong kinerja pembangunan oleh para pemimpin daerah dan pejabat publik.....	51
<b>REFERENSI.....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA.....</b>	<b>61</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Perdagangan dan produksi industri secara global terus berkembang dengan tingkat perkembangan yang tercepat sejak 2011 .....	2
Gambar 2: Indeks Manajer Pembelian Gabungan Global mencatat hasil yang baik.....	2
Gambar 3: Harga komoditas energi internasional terus meningkat di Triwulan ke-3.....	3
Gambar 4: Pasar keuangan global tetap stabil.....	3
Gambar 5: Pertumbuhan PDB sedikit meningkat seiring dengan pertumbuhan investasi tetap dan pertumbuhan ekspor.....	4
Gambar 6: Produksi industri dan kendaraan bermotor mencatat kenaikan tertinggi untuk beberapa bulan.....	4
Gambar 7: Perputaran yang tinggi dalam investasi mesin dan peralatan mendorong pembentukan modal tetap .....	6
Gambar 8: Penjualan kendaraan niaga dan semen mencatat tingkat pertumbuhan tertinggi dalam sejarah .....	6
Gambar 9: Penjualan kendaraan penumpang dan sepeda motor meningkat dengan pesat di sepanjang Triwulan ke-3, namun penjualan ritel tetap tidak berubah .....	7
Gambar 10: Konsumsi pemerintah memulih dengan peningkatan belanja sosial dan barang .....	7
Gambar 11: Pertumbuhan ekspor meningkat seiring meningkatnya harga komoditas yang didukung ekspor barang non migas .....	7
Gambar 12: Impor barang non-migas juga menyebabkan pertumbuhan impor sebesar dua digit, sejalan dengan pertumbuhan sektor manufaktur .....	7
Gambar 13: Di sisi produksi, manufaktur merupakan pendorong utama pertumbuhan .....	8
Gambar 14: Secara triwulan-ke-triwulan, disesuaikan dengan fluktuasi musiman, konsumsi swasta meningkat di Triwulan ke-3.....	9
Gambar 15: Indikator bulanan yang mewakili konsumsi swasta tetap menunjukkan gambaran yang berbeda-beda .....	10
Gambar 16: Indeks kepercayaan konsumen) mengisyaratkan sentimen konsumen secara luas tidak berubah di sepanjang paruh kedua tahun 2017 .....	10
Gambar 17: Telah terjadi pergeseran secara bertahap terhadap konsumsi jasa .....	10
Gambar 18: Inflasi IHK menurun di Triwulan ke-3 karena harga pangan dan non-pangan yang terkendali.....	12
Gambar 19: Inflasi pangan yang rendah yang berkepanjangan diperkirakan akan menurunkan perkiraan inflasi IHK .....	12
Gambar 20: Pelonggaran kebijakan moneter untuk sementara ditunda setelah pelonggaran dilakukan di bulan Agustus dan September.....	14
Gambar 21: Investasi terus meningkat setelah pelonggaran kebijakan moneter dilakukan ...	14
Gambar 22: Sistem perbankan secara umum tetap sehat .....	14
Gambar 23: Di Triwulan ke-3, secara nominal Rupiah terdepresiasi... ..	15
Gambar 24: ...dan secara riil... ..	15
Gambar 25: ... namun tetap terapresiasi dibandingkan dengan banyak negara-negara setara di kawasan dalam jangka waktu yang lebih lama .....	15
Gambar 26: Investor asing menjual ekuitas Indonesia .....	16
Gambar 27: IHSG mendatar di Triwulan ke-3 namun sedikit terangkat di Triwulan ke-4.....	16
Gambar 28: Imbal hasil obligasi menunjukkan adanya volatilitas .....	17
Gambar 29: Harga global untuk enam komoditas utama ekspor Indonesia telah meningkat di Triwulan ke-3.....	17
Gambar 30: Harga minyak mentah diperkirakan akan meningkat pada tahun 2018, sementara harga batubara diperkirakan akan turun .....	19
Gambar 31: Indeks harga tertimbang perdagangan bersih menunjukkan lonjakan positif nilai tukar perdagangan komoditas untuk Indonesia sejak bulan Juli 2016.....	19



Gambar 32: Lonjakan ekspor barang terutama didorong oleh komoditas mentah dan olahan, namun capaian sektor manufaktur juga tinggi .....	21
Gambar 33: Lonjakan impor bahan baku dan barang modal berkontribusi terhadap lonjakan impor barang secara total .....	21
Gambar 34: Arus masuk FDI bersih melonjak lagi di Triwulan ke-3 tahun 2017.....	22
Gambar 35: Penerimaan terkait Migas dan PPN mendorong pertumbuhan yang tinggi di tahun 2017 .....	23
Gambar 36: Korelasi antara konsumsi masyarakat dan PPN telah menurun sejak tahun 2014 .....	24
Gambar 37: Peralihan terus-menerus dalam belanja pegawai dan subsidi energi ke belanja barang, modal, dan sosial .....	25
Gambar 38: Pencairan anggaran belanja barang, modal, dan sosial telah meningkat .....	25
Gambar 39: Subsidi energi sedikit meningkat pada APBN tahun 2018.....	27
Gambar 40: namun APBN tahun 2018 secara luas mencerminkan kelanjutan prioritas belanja Pemerintah.....	27
Gambar 41: Harga eceran Premium RON88 belum disesuaikan sejak bulan April 2016 .....	28
Gambar 42: Bauran penjualan bensin Pertamina .....	28
Gambar 43: Bank Dunia memproyeksikan penerimaan yang sedikit menurun dan defisit fiskal yang lebih tinggi dibandingkan dengan APBN tahun 2018 .....	29
Gambar 44: Pangsa total penerimaan yang berkorelasi dengan harga minyak.....	30
Gambar 45: Porsi belanja pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam pengeluaran pemerintah (tidak termasuk subsidi dan pembayaran bunga), 1994-2015 (persen) .....	36
Gambar 46: Belanja riil per kapita pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, 1994-2015 ...	36
Gambar 47: Indikator nasional untuk layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah telah meningkat sejak tahun 1994.....	36
Gambar 48: Kurva distribusi akses rata-rata kabupaten terhadap layanan dasar, 2001, 2008, dan 2015.....	37
Gambar 49: Akses ke 5 layanan dasar menurut desil, 2001, 2008 dan 2015 .....	38
Gambar 50: Kurva Distribusi untuk Ujian Nasional bagi Sekolah Menengah Pertama .....	39
Gambar 51: Korelasi antara perubahan akses dan perubahan dalam belanja pemerintah daerah per kapita .....	40
Gambar 52: Pengeluaran riil pemerintah daerah per kapita, 2001, 2008, 2014 .....	42
Gambar 53: Hasil evaluasi kinerja EKPPD dan SAKIP 2010-2015.....	45
Gambar 54: Jumlah kabupaten dengan alokasi DID sebagai pangsa dari total pendapatan pemerintah daerah di tahun 2017.....	47
Gambar 55: Jumlah pemerintah daerah berdasarkan hasil auditnya.....	47

## DAFTAR LAMPIRAN GAMBAR

Lampiran Gambar 1: Pertumbuhan PDB riil .....	61
Lampiran Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB pengeluaran .....	61
Lampiran Gambar 3: Kontribusi terhadap PDB produksi.....	61
Lampiran Gambar 4: Penjualan mobil dan sepeda motor .....	61
Lampiran Gambar 5: Indikator konsumen .....	61
Lampiran Gambar 6: Indikator produksi industri dan Manufaktur PMI.....	61
Lampiran Gambar 7: Neraca pembayaran.....	62
Lampiran Gambar 8: Komponen neraca berjalan.....	62
Lampiran Gambar 9: Ekspor barang .....	62
Lampiran Gambar 10: Impor barang .....	62
Lampiran Gambar 11: Cadangan devisa dan arus masuk modal.....	62
Lampiran Gambar 12: Inflasi.....	62
Lampiran Gambar 13: Rincian IHK bulanan.....	63

Lampiran Gambar 14: Perbandingan inflasi beberapa negara.....	63
Lampiran Gambar 15: Harga beras domestik dan internasional .....	63
Lampiran Gambar 16: Tingkat kemiskinan dan pengangguran.....	63
Lampiran Gambar 17: Indeks saham regional .....	63
Lampiran Gambar 18: Nilai tukar dollar AS.....	63
Lampiran Gambar 19: Imbal hasil obligasi pemerintah 5-tahunan dalam mata uang lokal ..	64
Lampiran Gambar 20: Spread obligasi dolar AS terhadap kelompok negara-negara EMBI Global.....	64
Lampiran Gambar 21: Pertumbuhan kredit komersial, pedesaan dan deposito .....	64
Lampiran Gambar 22: Indikator sektor perbankan .....	64
Lampiran Gambar 23: Utang pemerintah .....	64
Lampiran Gambar 24: Utang luar negeri .....	64

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Pertumbuhan PDB riil diperkirakan meningkat menjadi 5,3 persen pada tahun 2018 .....	ii
Tabel 2: Neraca Pembayaran (Balance of Payments - BOP) Indonesia .....	20
Tabel 3: Aliran penerimaan yang berkorelasi dengan harga minyak .....	30
Tabel 4: Bank Dunia memproyeksikan defisit sebesar 2,2% untuk tahun 2018, sama dengan APBN.....	31
Tabel 5: Indikator ekonomi utama.....	32
Tabel 6: sistem pemantauan dan evaluasi pemerintah daerah lintas sektoral.....	44
Tabel 7: Definisi kinerja yang kompleks.....	55

## DAFTAR TABEL LAMPIRAN

Lampiran Tabel 1: Realisasi dan proyeksi anggaran belanja Pemerintah .....	65
Lampiran Tabel 2: Neraca pembayaran .....	65
Lampiran Tabel 3: Perkembangan indikator ekonomi makro Indonesia .....	66
Lampiran Tabel 4: Sekilas indikator perkembangan Indonesia.....	67

## DAFTAR KOTAK

Kotak 1: Apakah pemulihan konsumsi swasta sedang terjadi?.....	9
Kotak 2: Bagaimana kaitan antara tren konsumsi dan pertumbuhan PPN di Indonesia?.....	24
Kotak 3: Mendorong dilaksanakannya reformasi subsidi BBM memerlukan adanya upaya untuk mengatasi ‘subsidi yang tidak dicatatkan di dalam laporan keuangan (off balance sheet)’ .....	28
Kotak 4: Seberapa besar harga minyak mempengaruhi penerimaan fiskal Indonesia? .....	30
Kotak 5: Model ekonometrik menganalisis akses terhadap kinerja pelayanan dasar.....	41
Kotak 6: Permasalahan Data dalam melacak perkembangan layanan dasar di daerah .....	42
Kotak 7: Spending Better in DKI Jakarta .....	57

## Rinkasan eksekutif: Mewujudkan hasil desentralisasi



**Peningkatan harga komoditas dan permintaan eksternal yang tinggi mendorong pertumbuhan PDB di Triwulan ke-3...**

Perekonomian Indonesia sedikit menguat di Triwulan ke-3. Pertumbuhan ekonomi didukung oleh peningkatan harga komoditas, pertumbuhan perekonomian global yang kuat, kembali menguatnya kondisi perdagangan internasional, serta kondisi moneter dan keuangan yang relatif akomodatif. Pada saat bersamaan, kondisi perekonomian dalam negeri membaik, dengan terlihatnya tanda-tanda penguatan (*green shoots*) dalam konsumsi rumah tangga dan permintaan dalam negeri yang menguat secara keseluruhan.

**... sebagian melalui kuatnya pertumbuhan investasi dan ekspor**

Pertumbuhan PDB riil sedikit menguat dari 5,0 persen tahun-ke-tahun (*yoy*) di Triwulan ke-2 menjadi 5,1 persen di Triwulan ke-3 karena tingkat investasi yang lebih tinggi, melonjaknya ekspor dan konsumsi pemerintah lebih dari cukup untuk mengimbangi hambatan dari *destocking* (menurunnya persediaan) yang signifikan. Pertumbuhan investasi naik ke tingkat yang tertinggi dalam kurun waktu lebih dari 4 tahun ini, sebagian didukung oleh rendahnya biaya pendanaan, perbaikan lingkungan bisnis secara umum dan investasi modal pemerintah yang lebih tinggi. Penanaman modal asing (FDI) di Triwulan ke-3 ini juga mencatat arus masuk bersih terbesar dalam kurun waktu lebih dari 7 tahun terakhir. Sejalan dengan menguatnya perdagangan global dan tingginya harga komoditas ekspor utama Indonesia, ekspor melonjak di Triwulan ke-3, dengan ekspor komoditas mentah dan olahan, terutama batubara dan kelapa sawit. Ekspor tekstil, pakaian, alas kaki, barang-barang kelistrikan, dan barang-barang manufaktur lainnya juga mencatat pertumbuhan yang tinggi. Volume ekspor maupun impor mencatat pertumbuhan dua digit untuk pertama kalinya sejak tahun 2012.

**Ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa konsumsi**

Sementara pertumbuhan konsumsi rumah tangga tetap rata pada basis tahun-ke-tahun (*yoy*), ada indikasi bahwa lemahnya konsumsi yang teramati di Triwulan ke-2 telah mulai mereda. Data musiman yang disesuaikan (*seasonally adjusted data*) menunjukkan kenaikan konsumsi rumah tangga dalam triwulan-ke-triwulan di Triwulan ke-3,

**rumah tangga mulai pulih**

menunjukkan adanya peningkatan. Pada saat yang sama, penjualan barang-barang konsumsi tahan lama, seperti mobil penumpang dan sepeda motor, keduanya telah pulih. Penjualan sepeda motor melonjak di Triwulan ke-3 setelah tiga tahun berturut-turut mengalami kontraksi. Pertumbuhan penjualan eceran tetap lemah sepanjang triwulan ini, namun mungkin pertumbuhan penjualan eceran ini tidak dapat menangkap perubahan dalam perilaku konsumen, seperti belanja yang lebih tinggi untuk jasa.

**Defisit neraca transaksi berjalan mengecil akibat menguatnya ekspor**

Defisit neraca transaksi berjalan mengecil menjadi 1,7 persen dari PDB dari 1,9 persen dari PDB di Triwulan ke-2, sebagian didorong oleh surplus perdagangan barang yang lebih luas. Nilai nominal ekspor meningkat melebihi peningkatan impor seiring dengan meningkatnya permintaan dalam negeri, terutama investasi. Harga komoditas yang lebih tinggi dan permintaan yang meningkat dari mitra dagang Indonesia memberi dukungan terhadap momentum ekspor ini. Di sisi jasa, kedatangan turis mencapai titik tertinggi sepanjang masa.

**Inflasi umum mereda dengan harga yang secara umum terkendali**

Inflasi umum (*headline inflation*) turun menjadi rata-rata 3,8 persen *yoY* di Triwulan ke-3, karena inflasi harga pangan terus mereda dan dampak dari kenaikan harga yang diatur oleh pemerintah (*administered price*) mulai berkurang. Harga yang terkendali (*benign*) di sebagian besar kategori non makanan juga berkontribusi terhadap inflasi yang lebih rendah. Dikombinasikan dengan defisit neraca transaksi berjalan yang mengecil, menurunnya inflasi membuka pintu bagi kebijakan moneter yang lebih akomodatif untuk mendukung pertumbuhan. Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuan, *7-day reverse repo*, sebanyak dua kali sebesar 25 basis poin pada Agustus dan September.

**Imbal hasil obligasi jatuh ke tingkat yang terendah selama kurun waktu 4 tahun ini**

Minat investor terhadap aset Indonesia terus menguat dengan imbal hasil obligasi yang jatuh ke tingkat yang terendah selama kurun waktu 4 tahun ini, sementara investasi asing langsung mencapai tingkat tertinggi selama kurun waktu tujuh tahun terakhir. Keyakinan investor tetap didukung oleh fundamental keuangan makro yang baik. Pengelolaan fiskal terus membaik, dengan pemungutan penerimaan yang tinggi yang mendukung pulihnya belanja pemerintah pusat setelah terjadinya pemotongan di tahun yang lalu.

**Perkiraan ekonomi terus membaik seiring kondisi lingkungan eksternal yang tetap kondusif dan kondisi dalam negeri yang menjadi lebih positif**

Pertumbuhan PDB riil diperkirakan sedikit meningkat menjadi 5,1 persen pada tahun 2017 dan terus menguat menjadi 5,3 persen pada 2018 (Tabel 1), didorong oleh berlanjutnya pertumbuhan investasi yang tinggi dan peningkatan konsumsi yang tidak

terlalu besar namun terus berlanjut. Pertumbuhan konsumsi yang lebih tinggi akan didukung oleh harga komoditas yang kuat, inflasi yang rendah, nilai Rupiah yang stabil, pasar tenaga kerja yang kuat dan penurunan biaya pinjaman. Aliran investasi

**Tabel 1: Pertumbuhan PDB riil diperkirakan meningkat menjadi 5,3 persen pada tahun 2018**

		2016	2017e	2018p
<b>PDB Riil</b>	(Perubahan persentase tahunan)	5,0	5,1	5,3
<b>Indeks harga konsumen</b>	(Perubahan persentase tahunan)	3,5	3,8	3,5
<b>Neraca transaksi berjalan</b>	(Persen terhadap PDB)	-1,8	-1,6	-1,8
<b>Saldo anggaran</b>	(Persen terhadap PDB)	-2,5	-2,7	-2,2

Sumber: Bank Indonesia; Badan Pusat Statistik (BPS); Kementerian Keuangan; Perhitungan staf Bank Dunia  
Catatan: Hasil aktual tahun 2016; e dan p adalah untuk perkiraan dan peramalan Bank Dunia

asing langsung dan belanja modal pemerintah yang tinggi, terutama pada tahun 2017, diperkirakan akan mendorong belanja investasi oleh sektor swasta.

**APBN tahun 2018 menegaskan kembali komitmen negara terhadap tanggung jawab fiskal**

APBN tahun 2018 menetapkan target penerimaan pajak yang menantang namun dapat dicapai, dan secara luas mencerminkan berlanjutnya prioritas Pemerintah mengenai pengeluaran di bidang sosial dan infrastruktur. Target defisit fiskal di dalam APBN tahun 2018 yang lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya, sebesar 2,2 persen dari PDB, memberikan peningkatan ruang fiskal dalam jangka pendek. Sejalan dengan perkiraan ekonomi makro yang lebih tinggi untuk tahun 2018 dan reformasi kebijakan serta administrasi perpajakan yang sedang berjalan, Bank Dunia juga memproyeksikan defisit fiskal sebesar 2,2 persen dari PDB, sama dengan target APBN tahun 2018.

**Risiko terhadap perkiraan perekonomian mencakup pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang lebih lambat, harga-harga komoditas yang lebih lemah dari perkiraan...**

Risiko terhadap perkiraan perekonomian condong ke sisi penurunan. Tanda-tanda adanya pertumbuhan konsumsi rumah tangga bersifat tentatif, dan terdapat banyak sinyal beragam (*mixed signals*), terutama sampai memasuki triwulan keempat. Mengingat bahwa komponen ini memiliki porsi lebih dari separuh dari PDB, penurunan konsumsi rumah tangga akan berdampak kuat pada total pengeluaran. Sementara perekonomian Indonesia telah mengalami beberapa diversifikasi ekonomi dalam beberapa tahun terakhir ini, kinerja perekonomian masih terkait erat dengan komoditas. Dengan demikian, penurunan harga komoditas yang lebih tajam dari yang diperkirakan, seperti batubara, secara signifikan dapat melemahkan nilai tukar perdagangan (*terms-of-trade*) negara dan memberi tekanan eksternal terhadap neraca pembayaran eksternal (*external balances*) serta penerimaan pemerintah, dan menghambat pertumbuhan. Di sisi lain, kenaikan harga minyak yang tajam dapat menyebabkan kombinasi inflasi dan penurunan daya beli konsumen yang lebih tinggi, dan/atau beban subsidi yang lebih besar bagi keseluruhan sektor publik.

**... dan gejala di pasar keuangan global**

Sementara itu, karena Bank Sentral A.S. melanjutkan normalisasi kebijakan moneter, baik dalam hal meningkatkan tingkat suku bunga *Federal Funds* dan mengurangi neracanya, pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat dari perkiraan dapat memicu gejala di pasar keuangan. Gejala tersebut dapat mengakibatkan arus modal keluar yang tiba-tiba dari negara-negara pasar berkembang termasuk Indonesia, dan memicu kenaikan tajam biaya pinjaman dan volatilitas, sehingga dapat menghambat investasi. Namun demikian, ada juga beberapa risiko eksternal yang menguntungkan termasuk kemungkinan pertumbuhan yang lebih tinggi dari perkiraan di negara-negara maju terbesar dan negara-negara EMDEs (*Emerging Markets and Developing Economies* – Negara-negara Pasar Berkembang dan Negara-negara Berkembang) – yang mencerminkan pemulihan oleh karena adanya investasi yang lebih menonjol di Amerika Serikat dan Wilayah Eropa, atau pemulihan yang kuat di negara-negara eksportir komoditas yang besar.

*Edisi kali ini mencakup topik fokus yang membahas bagaimana kinerja penyediaan layanan pemerintah daerah telah berubah dari waktu ke waktu, dan perangkat apa yang dapat digunakan oleh pemerintah pusat untuk mendorong dan mendukung kinerja yang lebih baik di masa depan.*

**Praktik tata kelola yang baik, seperti unsur kebijakan yang berorientasi hasil ke dalam transfer keuangan antar pemerintah**

Indonesia telah mengalami desentralisasi yang signifikan dalam 15 tahun terakhir. Undang-undang Tata Kelola dan Perimbangan Keuangan tahun 1999 memberikan kewenangan politik dan ekonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan menangani kebutuhan warganya. Transfer dana ke pemerintah daerah – terutama kabupaten – melonjak, dan saat ini, lebih dari setengah dari pengeluaran publik di Indonesia saat ini dilaksanakan di tingkat daerah. Desentralisasi meningkatkan peluang pemerintah untuk mencari solusi lokal terhadap

**serta keterlibatan warga di tingkat daerah, penting untuk perbaikan penyediaan layanan daerah**

masalahnya, pertanggungjawaban para pimpinan daerah terhadap warga, dan kesempatan (peranan) bagi para politisi diluar partai. Tidak mengherankan jika proses desentralisasi tersebut sampai saat ini menghasilkan beragam hasil dalam hal akses warga terhadap layanan daerah. Secara umum telah terjadi peningkatan dan konvergensi dalam akses layanan di tingkat daerah, namun kualitas layanan tetap buruk dan disparitas antar daerah semakin meluas. Dengan hanya meningkatkan belanja pemerintah daerah untuk kabupaten-kabupaten yang paling tertinggal mungkin tidak akan meningkatkan akses terhadap layanan karena kabupaten-kabupaten tersebut memiliki tingkat pengeluaran per kapita yang tinggi namun hasil auditnya buruk.

Artikel ini membahas tiga pertanyaan utama: (i) apa yang terjadi dengan penyediaan layanan daerah selama proses desentralisasi? (ii) bagaimana kita dapat menggerakkan (*move the needle*) kinerja pemerintah daerah dalam hal penyediaan layanan di daerah? (iii) mekanisme desain seperti apa yang dapat memberi insentif kepada para pimpinan daerah dan pemerintah daerah untuk memperbaiki penyampaian layanan di daerah? Tiga rekomendasi kebijakan utama untuk membantu menyelaraskan insentif guna meningkatkan kinerja layanan oleh para pimpinan daerah dan pejabat publik dijabarkan melalui artikel ini: i) menerapkan praktik tatal kelola yang baik untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, ii) memasukkan unsur kebijakan yang berorientasi hasil (*result orientation*) ke dalam transfer keuangan antar pemerintahan, dan iii) memanfaatkan data kinerja pemerintah daerah yang transparan dan komparatif untuk merangsang keterlibatan warga negara.

## A. Perkembangan ekonomi dan fiskal terkini



### 1. Kondisi perekonomian global terus mendukung

**Kondisi perekonomian global telah mendukung...**

Perekonomian global terus mengalami pemulihan siklus yang meluas<sup>1</sup>. Pertumbuhan global tetap solid di Triwulan ke-3, didorong oleh perdagangan dunia yang lebih kuat, rebound investasi dan peningkatan aktivitas manufaktur. Data terbaru menunjukkan penguatan lanjutan di Triwulan ke-4. Pada saat yang sama, pasar keuangan tetap menguntungkan, di tengah membaiknya prospek pertumbuhan perekonomian global dan ekspektasi tingkat suku bunga yang tetap rendah. Pemulihan harga komoditas yang terus berlanjut juga mendorong pertumbuhan di negara-negara pengekspor komoditas. Kondisi perekonomian global yang kondusif ini telah mengangkat ekonomi Indonesia, terutama melalui investasi dan ekspor, dua komponen yang mendorong pertumbuhan ekonomi negara ini di Triwulan ke-3.

**...di saat aktivitas ekonomi terus membaik di Triwulan ke-3**

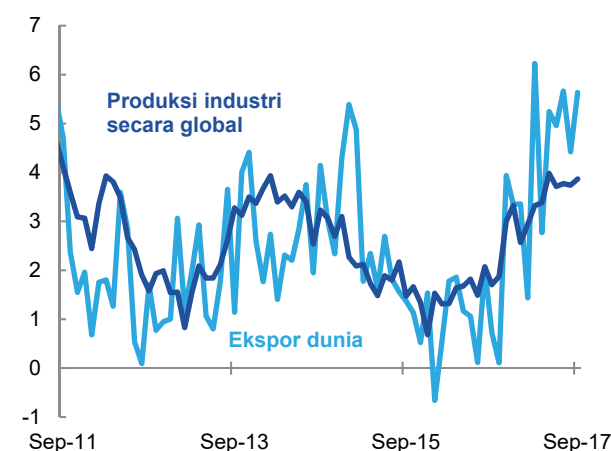
Peningkatan dalam aktivitas ekonomi global yang dimulai sejak awal 2016, terus berlanjut dan mendapatkan momentum sampai dengan Triwulan ke-3 tahun 2017. Begitu banyak indikator yang ada yang menunjukkan peningkatan yang berlanjut di Triwulan ke-4. Di antara negara-negara besar, Amerika Serikat mengalami percepatan pertumbuhan dan pertumbuhan di Kawasan Eropa tetap tinggi. Pertumbuhan di Jepang melambat pada Triwulan ke-3 menjadi 1,4 persen triwulan-ke-triwulan tahunan yang disesuaikan secara musiman (*qoq saar - quarter on quarter seasonally adjusted annualized rate*) menyusul tingkat tertinggi selama dua tahun sebesar 2,6 persen di Triwulan ke-2, menandai ekspansi selama tujuh triwulan secara berturut-turut — periode pertumbuhan positif yang terpanjang sejak tahun 2001. Pertumbuhan di Amerika Serikat meningkat menjadi 3,3 persen (*qoq saar*) dari tingkat yang sudah kuat sebesar 3,1 persen di Triwulan ke-2, sementara pertumbuhan di Triwulan ke-3 di Kawasan Eropa tetap bertahan di 2,5 persen *qoq saar*.<sup>2</sup> Pertumbuhan ekspor dunia naik dari 4,3 persen yoy di Triwulan ke-2 menjadi 5,0 persen di Triwulan ke-3, tingkat

<sup>1</sup> Bank Dunia (2018).

<sup>2</sup> Data untuk Jepang diambil dari *Economic and Social Research Institute*, data Kawasan Eropa diambil dari data *Euro Stat* dan data Amerika Serikat yang diambil dari *Bureau of Economic Analysis*.

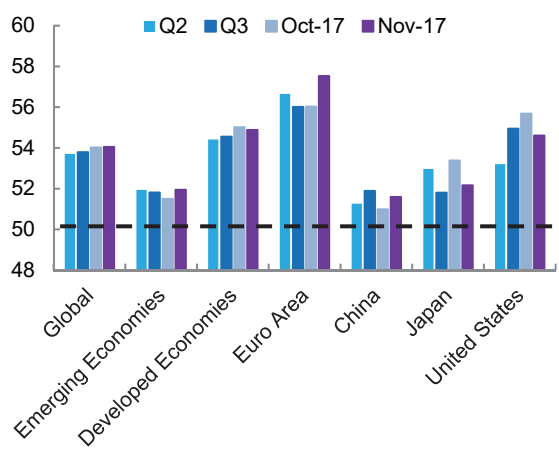
tertinggi sejak Triwulan ke-1 tahun 2011<sup>3</sup>. Pada saat yang sama, pertumbuhan produksi industri global meningkat menjadi 4,0 persen yoy di Triwulan ke-3, dari 3,4 persen di Triwulan ke-2 (Gambar 1). Aktivitas global yang positif ini sebagian mencerminkan permintaan dalam negeri yang tinggi, serta sentimen bisnis yang positif, sebagaimana ditunjukkan oleh Indeks Manajer Pembelian (*Purchasing Manager's Index* - PMI) gabungan global, yang meningkat secara moderat menjadi 53,8 di Triwulan ke-3<sup>4</sup>, yang tertinggi dalam 12 triwulan (Gambar 2). Indeks PMI global yang menguat pada bulan November menunjukkan bahwa kenaikan tersebut cenderung berlanjut di Triwulan ke-4.

**Gambar 1: Perdagangan dan produksi industri secara global terus berkembang dengan tingkat perkembangan yang tercepat sejak 2011**  
(pertumbuhan yoy, persen)



Sumber: *CBP World Trade Monitor*, Perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 2: Indeks Manajer Pembelian Gabungan Global mencatat hasil yang baik**  
(index)



Sumber: *Markit Economics, Haver Analytics*; Perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: Data yang terbaca di atas 50 menunjukkan adanya ekspansi, dan yang terbaca di bawah 50 menunjukkan adanya kontraksi.

### Komoditas energi terus menguat di Triwulan ke-3

Harga komoditas global terus meningkat di Triwulan ke-3 2017, terutama didorong oleh kenaikan harga energi, sementara harga barang-barang non-energi tetap relatif datar. Indeks harga energi Bank Dunia naik 13,6 persen pada Triwulan ke-3, sedikit lebih rendah dari pertumbuhan di Triwulan ke-2 sebesar 14,8 persen (Gambar 3), terutama karena kenaikan harga batu bara dan minyak, karena adanya permintaan yang tinggi dan penurunan persediaan. Sebagian karena kenaikan harga batubara (di mana Indonesia adalah eksportir bersih) yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan harga minyak (di mana Indonesia adalah pengimpor bersih), nilai tukar perdagangan (*terms-of-trade*) Indonesia meningkat di Triwulan ke-3<sup>5</sup>, dan kemungkinan akan berlanjut di Triwulan ke-4, karena harga energi meningkat sebesar 28,3 persen di bulan November<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> *CPB World Trade Monitor* (September 2017).

<sup>4</sup> Data yang terbaca di atas ambang batas 50 poin menunjukkan adanya ekspansi.

<sup>5</sup> Lihat pembahasan rinci di Bagian 5 mengenai harga komoditas.

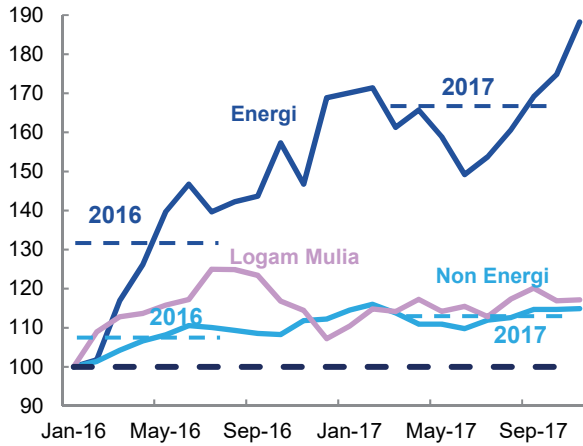
<sup>6</sup> Minyak Brent, acuan harga minyak internasional yang utama, rata-rata sebesar USD 62,6/bbl di bulan November, hampir 35 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Harga logam sedikit menurun di bulan November namun 30 persen lebih tinggi dari tahun lalu, karena adanya permintaan yang tinggi. Harga komoditas pertanian pada umumnya stabil, yang mencerminkan adanya pasokan pasar yang baik.



**Pasar keuangan global tetap stabil meskipun terjadi normalisasi kebijakan moneter di negara-negara maju**

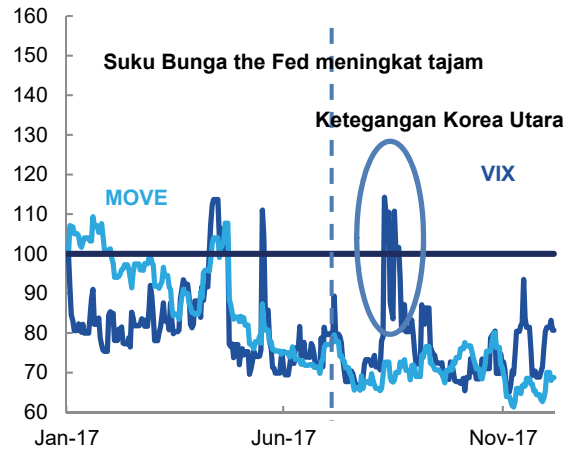
Setelah terjadinya efek sementara dari meningkatnya ketegangan Korea Utara di bulan Agustus, pasar keuangan global relatif tenang untuk sisa dari Triwulan ke-3 dan memasuki Triwulan ke-4 di tengah membaiknya prospek pertumbuhan global dan ekspektasi tingkat suku bunga yang tetap rendah. Volatilitas rendah, baik di pasar ekuitas maupun pasar obligasi<sup>7</sup> (Gambar 4), terutama setelah pencalonan ketua Dewan Bank Sentral A.S. yang baru, dan terlepas dari normalisasi kebijakan moneter A.S. yang sedang berlangsung<sup>8</sup>.

**Gambar 3: Harga komoditas energi internasional terus meningkat di Triwulan ke-3**  
(indeks, Januari 2016 = 100)



Sumber: *Pink Sheet* Bank Dunia; Perhitungan staf Bank Dunia  
Catatan: Garis mendatar yang putus-putus menunjukkan indeks harga rata-rata Januari - Oktober untuk masing-masing kategori komoditas.

**Gambar 4: Pasar keuangan global tetap stabil**  
(indeks; 1 Januari 2017 = 100)



Sumber: *Bloomberg*; Perhitungan staf Bank Dunia

**Meskipun perkiraan/peramalan perekonomian global positif, beberapa risiko negatif tetap ada**

Meskipun risiko terhadap perkiraan/peramalan perekonomian global cenderung masih tetap risiko yang negatif, risiko-risiko tersebut lebih seimbang. Lingkungan global yang positif terutama disebabkan oleh kemungkinan pertumbuhan yang lebih tinggi dari perkiraan di negara-negara maju dan negara-negara EMDEs<sup>9</sup> yang terbesar – yang mencerminkan, misalnya, pemulihan oleh karena adanya investasi yang lebih menonjol di Amerika Serikat dan Wilayah Eropa, atau pemulihan yang kuat di negara-negara eksportir komoditas yang besar<sup>10</sup>. Namun demikian, ketidakpastian mengenai kebijakan ekonomi di negara-negara maju, seperti meningkatnya proteksionisme dan nasionalisme dari kebijakan perdagangan A.S., dapat melemahkan pemulihan aktivitas perdagangan global saat ini. Perubahan pada undang-undang perpajakan A.S. dapat menyebabkan arus keluar modal karena perusahaan-perusahaan A.S. mengirimkan keuntungan mereka ke A.S. Penurunan neraca Bank Sentral A.S. yang lebih cepat dari perkiraan dan pengetatan kebijakan moneter yang tidak terduga dapat memicu gejolak di pasar keuangan global. Akhirnya, penurunan yang lebih tajam dari perkiraan di

<sup>7</sup> Sebagaimana ditunjukkan oleh indeks VIX dan MOVE. Indeks VIX mengukur volatilitas di pasar ekuitas, sementara indeks MOVE merupakan tolok ukur volatilitas pasar obligasi.

<sup>8</sup> Selain itu, pasar menyesuaikan harganya priced in dengan 70 persen kemungkinan adanya kenaikan tingkat suku bunga Federal Funds lagi di akhir 2017 menyusul pengumuman Komite Pasar Terbuka Federal (*the Federal Open Market Committee*) di bulan September (IMF, 2017).

<sup>9</sup> *Emerging Markets and Developing Economies* – Negara-negara Pasar Berkembang dan Negara-negara Berkembang.

<sup>10</sup> Bank Dunia (2018).

negara-negara besar, termasuk Tiongkok, dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian global.

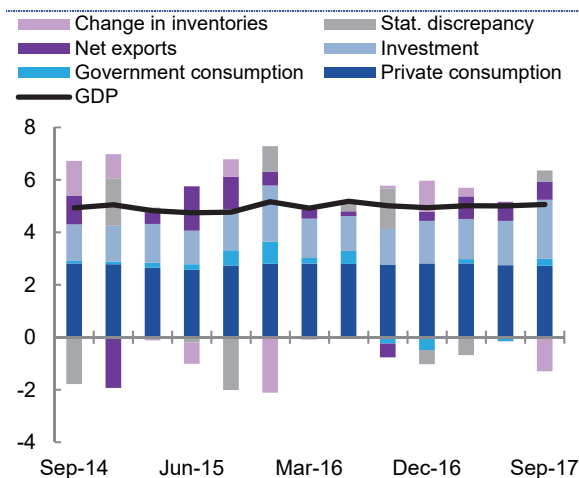
**2. Investasi dan ekspor menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi sementara konsumsi rumah tangga menunjukkan tanda-tanda pemulihan tentatif**

**Pertumbuhan PDB tetap stabil sekitar 5 persen di Q3**

Perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan tertinggi dalam lima triwulan di Triwulan ke-3 tahun 2017, namun tetap bertahan di kisaran 5,0 persen. Pertumbuhan PDB riil mencapai 5,1 persen yoy, sedikit lebih tinggi dari 5,0 persen di Triwulan ke-2, namun di bawah perkiraan yang disepakati sebesar 5,2 persen. Pertumbuhan investasi yang tinggi dan ekspor yang melonjak merupakan pendorong utama pertumbuhan, mengimbangi hambatan dari *destocking* (menurunnya persediaan) yang signifikan, yang mengurangi total pertumbuhan sebesar 1,3 persen (Gambar 5). Konsumsi pemerintah juga telah pulih, sebagian karena efek basis yang lebih rendah jika dibandingkan dengan Triwulan ke-3 tahun 2016. Di sisi produksi, industri, khususnya manufaktur, dan jasa terus mendorong pertumbuhan, sementara pertumbuhan di sektor pertanian melambat.

**Gambar 5: Pertumbuhan PDB sedikit meningkat seiring dengan pertumbuhan investasi tetap dan pertumbuhan ekspor**

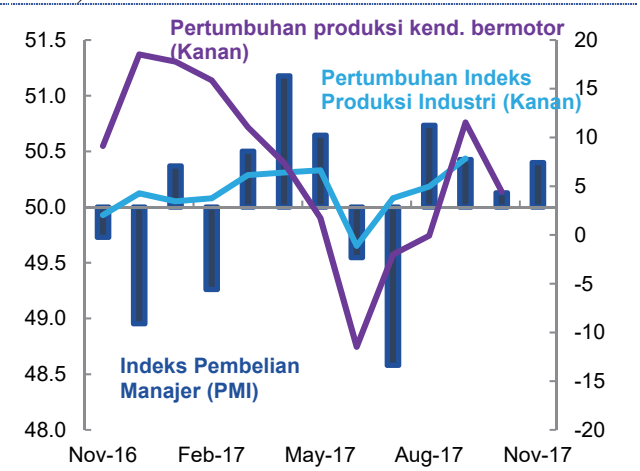
(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)



Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 6: Produksi industri dan kendaraan bermotor mencatat kenaikan tertinggi untuk beberapa bulan**

(indeks PMI, Kiri; pertumbuhan yoy/ 3-mma yoy, persen, Kanan)



Sumber: Nikkei/Markit; BPS; Perhitungan staf Bank Dunia  
Catatan: Pertumbuhan IPI dalam yoy; pertumbuhan produksi kendaraan bermotor dalam rata-rata 3 bulan pergerakan (3-mma - month moving average) yoy. Nilai data PMI sektor Manufaktur di atas 50 poin mengindikasikan wilayah yang ekspansif.

**Produksi industri dan kendaraan bermotor terus meningkat di sepanjang triwulan tersebut**

Sejalan dengan sedikit peningkatan pertumbuhan PDB, indikator produksi bulanan menunjukkan kinerja yang tinggi. Pertumbuhan produksi industri meningkat menjadi rata-rata 5,5 persen di Triwulan ke-3 dari 4,0 persen di Triwulan ke-2, tingkat yang tertinggi sejak Triwulan ke-4 tahun 2014 (Gambar 6). Produksi kendaraan bermotor juga mengalami pemulihan rata-rata 11,1 persen setelah berkontraksi sebesar 11,2 persen di Triwulan ke-2, meskipun hal ini sebagian disebabkan oleh turunnya basis sejak masa Lebaran yang terjadi pada Triwulan ke-3 tahun lalu. Menyusul terjadinya penurunan di bulan Juli, Indeks Pembelian Manajer (*Purchasing Manager's Index* - PMI) sektor Manufaktur dari Nikkei/Markit tetap berada di wilayah ekspansif selama sisa

triwulan tersebut, yang mengindikasikan adanya beberapa perbaikan dalam kondisi bisnis manufaktur.

**Pertumbuhan investasi tetap naik ke level tertinggi selama kurun waktu empat tahun seiring memulihnya investasi mesin dan peralatan**

Pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) meningkat untuk dua triwulan secara berturut-turut menjadi 7,1 persen yoy di Triwulan ke-3 dari 5,3 persen di Triwulan ke-2<sup>11</sup> (Gambar 7). Tingkat pertumbuhan ini – tertinggi yang terlihat sejak Triwulan ke-1 tahun 2013 – didorong oleh perputaran yang kuat dalam pengeluaran untuk mesin dan peralatan, yang meningkat sebesar 15,2 persen setelah selama hampir enam triwulan berturut-turut mengalami kontraksi, serta percepatan investasi peralatan lainnya. Peningkatan investasi ini, terlepas dari pertumbuhan kredit yang lebih lemah dari perkiraan<sup>12</sup>, menunjukkan bahwa sebagian investor memanfaatkan sumber pendanaan asing<sup>13</sup> dan laba yang ditahan untuk mendukung peningkatan investasi. Sejalan dengan sifat dari investasi tersebut yang sarat impor, nilai nominal impor barang modal meningkat rata-rata sebesar 23,9 persen setelah mengalami kontraksi sebesar 2,6 persen di Triwulan ke-2. Komposisi impor ini mengisyaratkan terjadinya investasi di sektor telekomunikasi, permesinan untuk industri pertambangan dan pertanian, dan infrastruktur publik<sup>14</sup>. Sejalan dengan investasi di bidang infrastruktur, nilai nominal belanja modal publik naik 12,9 persen di keseluruhan triwulan dari 9,2 persen pada Triwulan ke-2. Sementara itu, pembangunan gedung dan struktur tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan PMTB, sejalan dengan kenaikan penjualan semen yang tinggi, yang mencatat tingkat pertumbuhan tertinggi dalam catatan dengan rata-rata 25 persen (Gambar 8). Namun demikian, menurunnya sejumlah indikator investasi tersebut di bulan Oktober mengindikasikan bahwa momentum investasi mungkin akan melambat di Triwulan ke-4.

**Pertumbuhan konsumsi swasta menunjukkan tanda-tanda pemulihan tentatif**

Konsumsi swasta tumbuh 5,0 persen yoy selama lima triwulan secara berturut-turut, karena pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tetap stabil di 4,9 persen. Dengan basis yang tinggi dari perayaan Lebaran tahun lalu, yang terjadi pada Triwulan ke-3 tahun 2016, tingkat pertumbuhan yoy yang stabil di Triwulan ke-3 tahun ini sesungguhnya menunjukkan peningkatan konsumsi swasta. Melihat pergerakan triwulan-ke-triwulan, konsumsi swasta sesungguhnya meningkat hingga 5,5 persen (*qoq saar*)<sup>15</sup> dari 4,8 persen di Triwulan ke-2 (Kotak 1). Hal ini sejalan dengan beberapa tren yang positif: pelonggaran lebih lanjut dari tekanan inflasi menjadi 3,8 persen yoy dari 4,3 persen di Triwulan ke-2, stabilitas relatif nilai Rupiah selama triwulan tersebut, dan pasar tenaga kerja yang kuat, karena jumlah individu yang dipekerjakan meningkat sebesar 3,2 persen di tahun ini sampai dengan bulan Agustus 2017<sup>16</sup>.

<sup>11</sup> Direvisi turun dari 5,4 persen.

<sup>12</sup> Lihat pembahasan rinci di Bagian 4.

<sup>13</sup> Lihat pembahasan rinci mengenai peningkatan arus Penanaman Modal Asing (FDI) di Bagian 5.

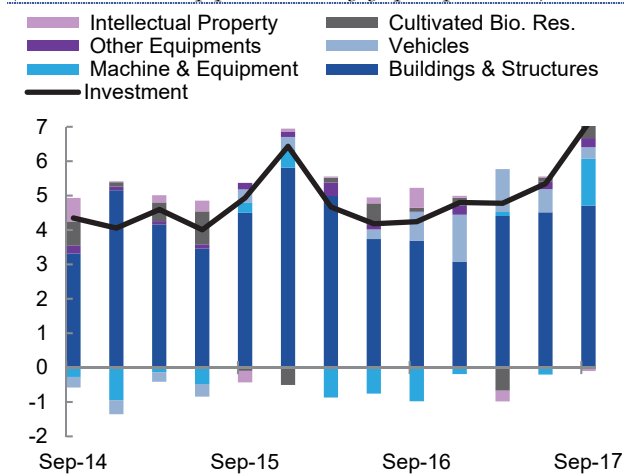
<sup>14</sup> Kategori barang modal impor yang mengalami peningkatan signifikan adalah peralatan telekomunikasi, ekskavator, dan kapal serta struktur terapung.

<sup>15</sup> Triwulan-ke-triwulan, disesuaikan secara musiman dan tahunan. Perkiraan staf Bank Dunia menggunakan penyesuaian musiman X12.

<sup>16</sup> Perhitungan staf Bank Dunia dari siaran pers BPS mengenai survei angkatan kerja SAKERNAS bulan Agustus 2017.

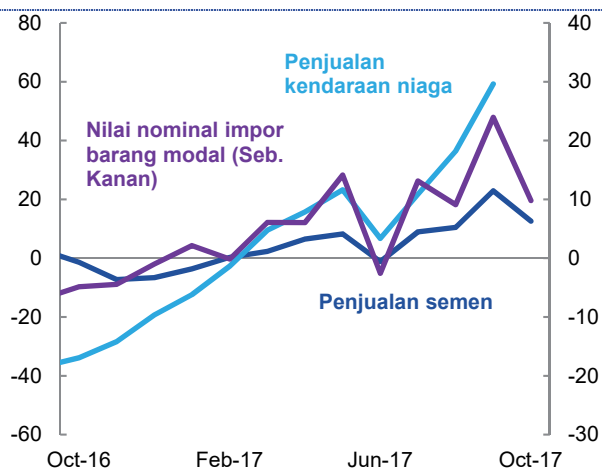
Gambar 7: Perputaran yang tinggi dalam investasi mesin dan peralatan mendorong pembentukan modal tetap

(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)



Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 8: Penjualan kendaraan niaga dan semen mencatat tingkat pertumbuhan tertinggi dalam sejarah (pertumbuhan 3mna yoy, persen; Kiri, Kanan)



Sumber: BI, BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

**Indikator konsumsi bulanan terbur, namun mungkin tidak sepenuhnya menangkap konsumsi rumah tangga**

Indikator konsumsi bulanan menunjukkan gambaran yang lebih beragam. Di satu sisi, penjualan sepeda motor melonjak rata-rata 17,9 persen di Triwulan ke-3 setelah selama tiga tahun berturut-turut mengalami kontraksi, sementara penjualan mobil penumpang juga meningkat. Di sisi lain, pertumbuhan penjualan ritel menurun tajam menjadi 0,3 persen dari 4,9 persen di Triwulan ke-2, meskipun demikian kepercayaan konsumen sebagian besar tetap tidak berubah, pada tingkat yang tinggi (Gambar 9). Nampak adanya hal yang tidak sinkron antara konsumsi swasta yang stabil dan pertumbuhan penjualan ritel yang mengecewakan, yang sebagian dapat dijelaskan oleh fakta bahwa indeks penjualan eceran Bank Indonesia hanya memperhitungkan konsumsi barang dan ritel modern, sedangkan survei BPS yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga menangkap konsumsi terhadap jasa, yang bertumbuh pada kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi barang di Triwulan ke-3, dan saluran ritel tradisional lainnya<sup>17</sup> (Kotak 1 **Error! Reference source not found.**). Indikator konsumsi berfrekuensi tinggi ini tetap terjaga di bulan Oktober, ketika penjualan sepeda motor melambat dan kepercayaan konsumen tetap tidak berubah.

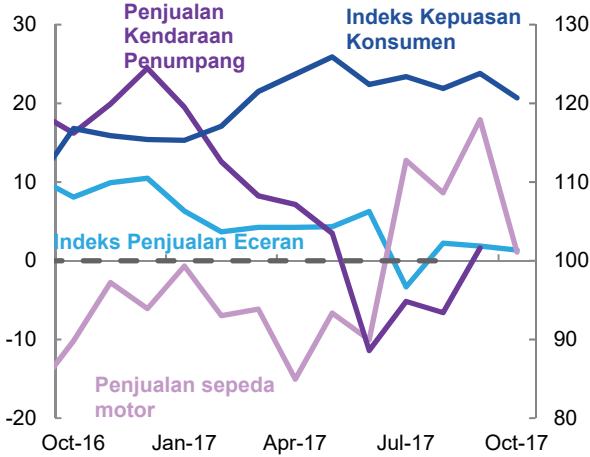
**Konsumsi pemerintah pulih dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan**

Pertumbuhan riil konsumsi Pemerintah memulih menjadi 3,5 persen yoy setelah mengalami kontraksi sebesar 1,9 persen di Triwulan ke-2. Secara keseluruhan, pengeluaran konsumsi pemerintah secara nominal meningkat sebesar 5,7 persen di Triwulan ke-3 dari tahun sebelumnya, dibandingkan dengan 2,8 persen pada Triwulan ke-2. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh pulihnya belanja barang, yang meningkat sebesar 7,8 persen secara nominal (Gambar 10). Belanja sosial yang tinggi juga dipertahankan selama dua triwulan secara berturut-turut, melonjak 36,9 persen secara nominal, namun hal ini sebagian disebabkan oleh efek dasar yang rendah dari Triwulan ke-3 tahun 2016. Belanja pegawai juga meningkat secara nominal (0,4 persen) karena bonus dibagikan ke pegawai negeri di bulan Juli. Data realisasi anggaran bulan Oktober menunjukkan bahwa belanja barang dan sosial terus meningkat dengan kuat; namun demikian, dalam hal besarnya pengeluaran, belanja sosial tetap jauh di bawah rata-rata tahun 2014-15.

<sup>17</sup> Pertemuan staf Bank Dunia dengan Badan Pusat Statistik (BPS), tanggal 14 November 2017.

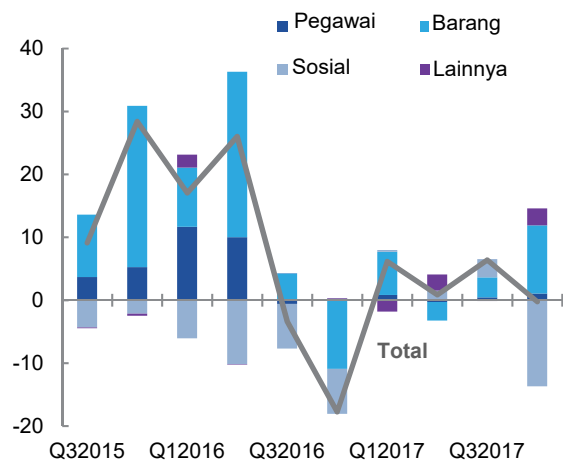
**Gambar 9: Penjualan kendaraan penumpang dan sepeda motor meningkat dengan pesat di sepanjang Triwulan ke-3, namun penjualan ritel tetap tidak berubah**

(yoy, persen/ 3mma yoy, persen, Kiri; indeks, poin, Kanan)



Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia  
Catatan: Pertumbuhan indeks penjualan eceran dalam yoy; penjualan kendaraan penumpang dan sepeda motor diukur dalam persen rata-rata pergerakan 3 bulan (mma) yoy dan disesuaikan secara musiman. Indeks kepercayaan konsumen pada sumbu sebelah kanan, diukur dalam poin.

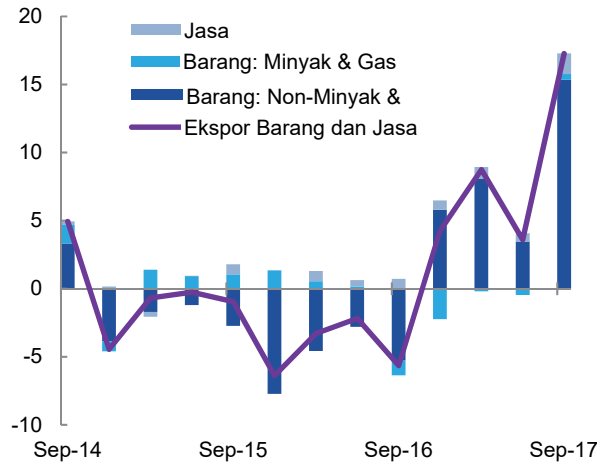
**Gambar 10: Konsumsi pemerintah memulih dengan peningkatan belanja sosial dan barang**  
(kontribusi terhadap pertumbuhan nominal, poin persentase)



Sumber: Data realisasi anggaran bulanan, Kementerian Keuangan; Perhitungan staf Bank Dunia  
Catatan: Realisasi konsumsi pemerintah terdiri dari pengeluaran Pemerintah Pusat untuk belanja pegawai, barang, sosial, dan pengeluaran lainnya.

**Gambar 11: Pertumbuhan ekspor meningkat seiring meningkatnya harga komoditas yang didukung ekspor barang non migas**

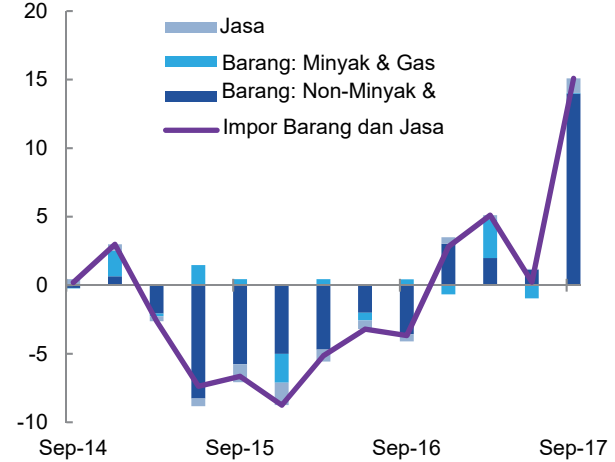
(kontribusi terhadap pertumbuhan riil yoy, poin persentase)



Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 12: Impor barang non-migas juga menyebabkan pertumbuhan impor sebesar dua digit, sejalan dengan pertumbuhan sektor manufaktur**

(kontribusi terhadap pertumbuhan riil yoy, poin persentase)



Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

**Ekspor melonjak seiring pulihnya sektor manufaktur, dan karena ekspor komoditas tetap tinggi...**

Sejalan dengan menguatnya perdagangan global dan tingginya harga komoditas ekspor utama Indonesia, ekspor melonjak di Triwulan ke-3. Volume ekspor dan impor mencatat pertumbuhan sebesar dua digit untuk pertama kalinya sejak 2012, masing-masing meningkat sebesar 17,3 persen yoy dan 15,1 persen, dari 3,6 persen

dan 0,2 persen di Triwulan ke-2<sup>18</sup> (Gambar 11 dan Gambar 12), yang menyebabkan kontribusi ekspor bersih terhadap pertumbuhan PDB tetap kecil. Peningkatan volume ekspor terutama didorong oleh pulihnya ekspor barang manufaktur (tekstil, pakaian, alas kaki, peralatan listrik, dan barang-barang manufaktur lainnya), sementara ekspor komoditas mentah dan olahan - terutama batubara, kelapa sawit, dan tembaga olahan – tetap tinggi<sup>19</sup>. Peningkatan volume impor juga didorong oleh barang non migas, terutama barang modal dan bahan baku<sup>20</sup> yang secara riil masing-masing melonjak sebesar 24,3 dan 23,2 persen.

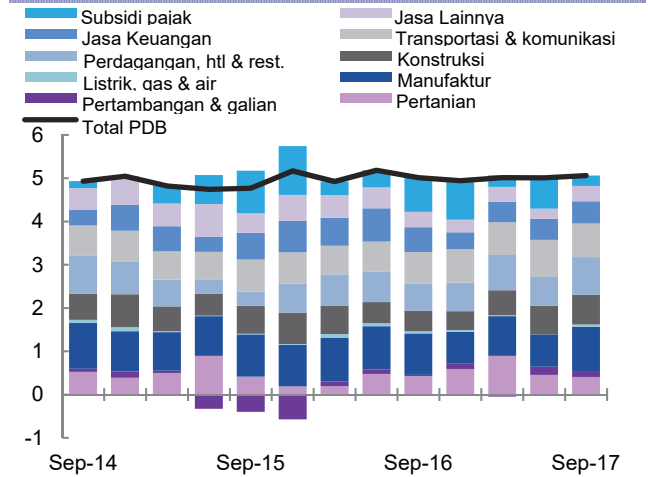
... akan tetapi nilai tambah yang rendah untuk sektor pertanian dan pertambangan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekspor sebagian dipenuhi oleh *destocking* (menurunnya persediaan)

Di sisi produksi, industri<sup>21</sup> dan jasa tetap menjadi pendorong pertumbuhan, masing-masing meningkat sebesar 4,8 dan 6,0 persen dari 3,9 dan 5,2 persen di Triwulan ke-2 (Gambar 13). Sektor manufaktur memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan, meningkat menjadi 4,8 persen, naik dari 3,5 persen di Triwulan ke-2. Sektor jasa juga meningkat, didorong oleh aktivitas perdagangan, perhotelan dan restoran, serta transportasi dan komunikasi. Di sisi lain,

pertumbuhan sektor pertambangan dan pertanian masing-masing melemah menjadi 2,9 persen dan 1,8 persen, dari 3,3 dan 2,3 persen pada Triwulan ke-2. Kontribusi pertambangan dan pertanian yang relatif rendah terhadap nilai tambah ini (masing-masing sebesar 0,4 dan 0,2 poin persentase) mengindikasikan rendahnya pertumbuhan produksi<sup>22</sup>, yang menunjukkan bahwa peningkatan ekspor komoditas mentah dan olahan didorong oleh penurunan persediaan dibandingkan dengan peningkatan produksi, yang sesuai dengan kontribusi negatif yang besar dari persediaan<sup>23</sup>.

**Gambar 13: Di sisi produksi, manufaktur merupakan pendorong utama pertumbuhan**

(kontribusi terhadap pertumbuhan riil yoy, poin persentase)



Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

<sup>18</sup> Pertumbuhan ekspor direvisi naik dari sebelumnya 3,4 persen, sementara pertumbuhan impor direvisi turun dari 0,5 persen di Triwulan ke-2.

<sup>19</sup> Lihat pembahasan rinci di Bagian 6 mengenai ekspor.

<sup>20</sup> Impor barang modal didorong oleh impor mesin pengolahan otomatis dan peralatan telekomunikasi serta suku cadang; sedangkan impor bahan baku didorong oleh peningkatan impor suku cadang dan asesoris kendaraan bermotor, gandum dan biji-bijian campuran serta plastik.

<sup>21</sup> Industri terdiri dari pertambangan dan penggalian, manufaktur, utilitas dan konstruksi. Jasa terdiri dari perdagangan, perhotelan dan restoran, transportasi dan komunikasi, keuangan dan jasa lainnya.

<sup>22</sup> Untuk pertambangan dan komoditas, keluaran dan nilai tambah cenderung berkorelasi dengan sangat erat.

<sup>23</sup> Sebagaimana yang disebutkan di atas, lonjakan pertumbuhan ekspor di Triwulan ke-3 sebagian didorong oleh ekspor batubara, tembaga olahan, dan kelapa sawit yang lebih besar, yang merupakan hasil pertambangan dan pertanian.

**Kotak 1: Apakah pemulihan konsumsi swasta sedang terjadi?**

**Konsumsi swasta merupakan pendorong utama kinerja ekonomi Indonesia.** Menyumbang 55 persen perekonomian Indonesia, konsumsi swasta merupakan pendorong utama pertumbuhan PDB. Meskipun memiliki sejumlah kondisi yang menguntungkan, seperti peningkatan lapangan kerja dan upah yang tinggi, inflasi yang rendah, nilai Rupiah yang stabil, dan biaya pinjaman yang lebih rendah, pertumbuhan konsumsi swasta pada basis tahun-ke-tahun (*yoy*) bergeming, tetap sebesar 5,0 persen selama 8 dari 9 triwulan terakhir<sup>1</sup>. Selain itu, penjualan eceran, indikator bulanan yang digunakan secara luas untuk konsumsi swasta, memberi gambaran yang lebih mengkhawatirkan. Pertumbuhan riil penjualan eceran merosot dari rata-rata 11,0 persen pada tahun 2016, menjadi 4,8 persen pada paruh pertama tahun 2017 dan sedikit meningkat 0,3 persen di Triwulan ke-3. Kotak ini memberikan analisis pertumbuhan konsumsi swasta yang lebih mendalam, mengingat beberapa faktor yang telah berkontribusi pada polanya baru-baru ini, dan perbedaan antara data perhitungan nasional dan data survei bulanan untuk konsumsi swasta.

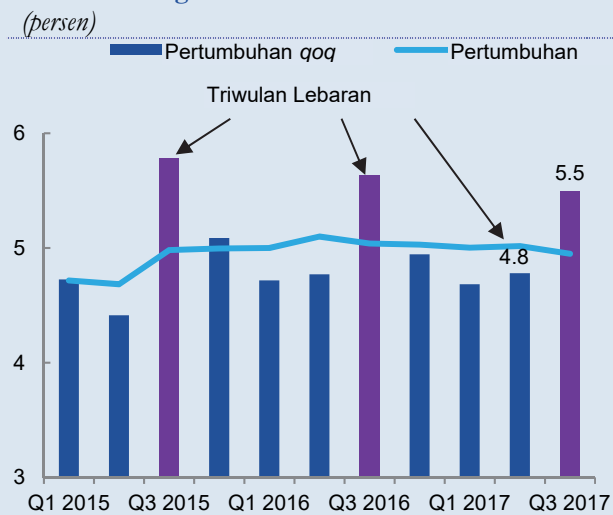
**Konsumsi swasta relatif rendah di Triwulan ke-2, namun ada indikasi menguat di Triwulan ke-3.** Dengan bergesernya Lebaran dari Triwulan ke-3

tahun lalu ke Triwulan ke-2 tahun ini, serta peralihan terkait konsumsi swasta yang berkaitan dengan perayaan tersebut, diperkirakan akan terjadi peningkatan konsumsi swasta *yoy* di Triwulan ke-2, bersamaan dengan menurunnya pertumbuhan konsumsi sehubungan dengan hal tersebut di Triwulan ke-3, karena efek dasar yang tinggi terjadi pada Triwulan ke-3 tahun lalu. Namun demikian, pertumbuhan konsumsi swasta pada basis *yoy* stabil di Triwulan ke-2 dan Triwulan ke-3, yang menyiratkan penurunan di Triwulan ke-2, dan pemulihan di Triwulan ke-3. Dengan menggunakan data yang disesuaikan secara statistik untuk memperbaiki fluktuasi musiman, Gambar 14 menunjukkan peningkatan konsumsi swasta dari 4,8 persen (*qoq saar*) di Triwulan ke-2 menjadi 5,5 persen di Triwulan ke-3.

**Sejalan menghilangnya faktor sementara yang berkontribusi terhadap kelemahan di Triwulan ke-2, konsumsi akan memulih.** Restrukturisasi subsidi terhadap konsumen kategori non-miskin 900VA, yakni 18,7 juta<sup>2</sup> rumah tangga, menyebabkan tarif listrik menjadi lebih tinggi bagi rumah tangga tersebut dan mengurangi daya beli mereka. Selain itu, penegakan yang lebih ketat dari pemungutan pajak menyusul dilaksanakannya program amnesti pajak<sup>3</sup> dan ketidakpastian politik menjelang pemilihan gubernur DKI Jakarta<sup>4</sup> membebani konsumsi rumah tangga berpendapatan tinggi, yang menyebabkan munculnya porsi konsumsi yang tidak proporsional<sup>5</sup>. Di Triwulan ke-3, ketidakpastian politik mereda, dampak penyesuaian harga energi sebelumnya telah berkurang, dan inflasi secara keseluruhan menurun. Pada saat yang sama, pasar tenaga kerja tetap tinggi, dengan peningkatan lapangan kerja dan upah yang tinggi<sup>6</sup>, nilai Rupiah tetap stabil, dan biaya pinjaman terus menurun. Secara bersama-sama, faktor-faktor ini mendukung pandangan bahwa konsumsi mulai pulih kembali di Triwulan ke-3, dan seharusnya akan tetap sedikit meningkat memasuki Triwulan ke-4 dan awal tahun 2018.

**Indikator-indikator bulanan yang mewakili konsumsi swasta terus menghadirkan beragam gambaran.** Sebagian besar disebabkan oleh karena persoalan data seputar pergeseran masa Lebaran, penjualan eceran, kendaraan bermotor dan sepeda motor, di mana seluruhnya menunjukkan adanya volatilitas di sekitar bulan Juni dan Juli (Gambar 15). Dalam beberapa bulan terakhir, penjualan sepeda motor telah

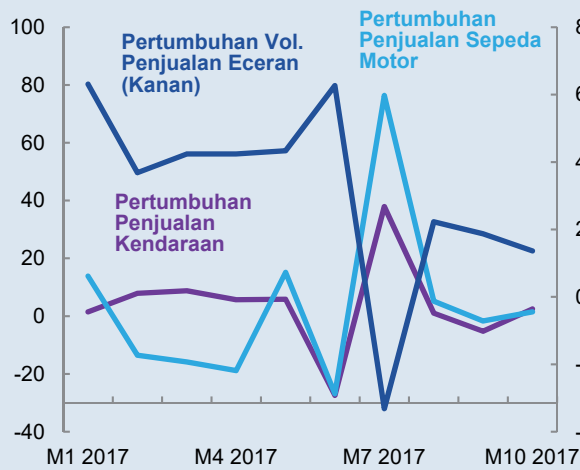
**Gambar 14: Secara triwulan-ke-triwulan, disesuaikan dengan fluktuasi musiman, konsumsi swasta meningkat di Triwulan ke-3**  
(persen)



Sumber: *Haver Analytics, CEIC*, perhitungan staf Bank Dunia  
Catatan: “*yoy*” adalah singkatan dari “*year-on-year* (tahun-ke-tahun)”; “*qoq saar*” adalah singkatan dari “*quarter-on-quarter seasonally adjusted annualized rate* (triwulan-ke-triwulan tahunan yang disesuaikan secara musiman)”; Menggunakan penyesuaian musiman ARIMA X12.

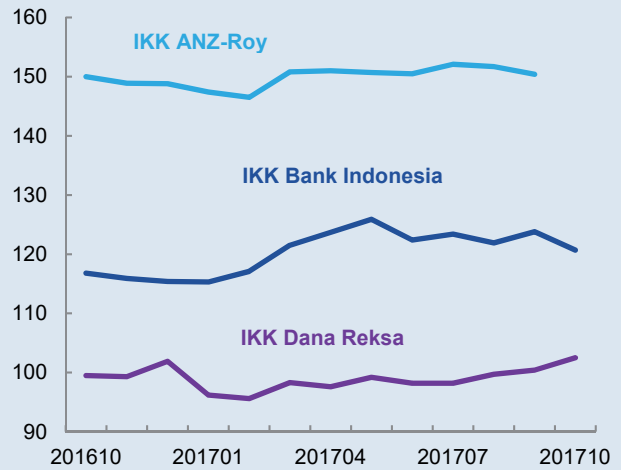
pulih kembali dan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan di paruh pertama tahun 2017. Sebaliknya, penjualan kendaraan bermotor, setelah terjadinya volatilitas tengah tahun, bertumbuh kira-kira sama dengan pertumbuhan di paruh pertama tahun ini, sementara pertumbuhan penjualan eceran terus menurun. Pada saat yang sama, indikator-indikator kepercayaan konsumen pada umumnya stabil (Gambar 16).

**Gambar 15: Indikator bulanan yang mewakili konsumsi swasta tetap menunjukkan gambaran yang berbeda-beda**  
(yoy, persen)



Sumber: Haver Analytics, CEIC, Perhitungan staf Bank Dunia

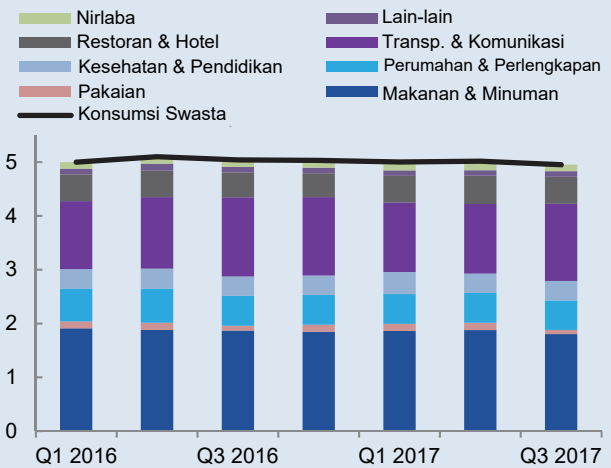
**Gambar 16: Indeks kepercayaan konsumen mengisyaratkan sentimen konsumen secara luas tidak berubah di sepanjang paruh kedua tahun 2017**  
(indeks)



Sumber: Haver Analytics

**Indikator-indikator bulanan tidak menangkap pertumbuhan konsumsi jasa dengan baik.** Pergeseran pola konsumsi swasta telah terjadi secara bertahap. Pada basis tahun-ke-tahun, konsumsi jasa seperti transportasi dan komunikasi, serta kesehatan dan pendidikan meningkat di Triwulan ke-3 dari Triwulan ke-2. Sementara itu, konsumsi makanan dan minuman, serta pakaian dan perlengkapan pakaian lainnya menurun (Gambar 17)<sup>7</sup>. Dengan demikian, konsumsi jasa yang lebih tinggi sebagian mengimbangi melemahnya konsumsi beberapa jenis barang. Indikator-indikator bulanan, seperti penjualan eceran, hanya menangkap tingkat konsumsi dari beberapa jenis barang namun tidak menangkap tingkat konsumsi jasa, sehingga menggambarkan bahwa indikator-indikator tersebut tidak menjadi indikator yang sempurna untuk mewakili konsumsi swasta secara keseluruhan.

**Gambar 17: Telah terjadi pergeseran secara bertahap terhadap konsumsi jasa**  
(kontribusi terhadap pertumbuhan, poin persentase)



Sumber: Haver Analytics, Perhitungan staf Bank Dunia

**E-commerce nampaknya tidak menjadi pendorong yang signifikan atas menurunnya konsumsi swasta.** Ada anggapan populer bahwa peran e-commerce yang berkembang di Indonesia telah menjadi pendorong bagi konsumsi swasta yang menurun, karena metrik konvensional mungkin tidak memperhitungkan transaksi daring (*online*) secara memadai. Sementara e-commerce memang telah berkembang pesat, pangsa transaksi daring masih tetap sangat kecil, dengan perkiraan terbaru sebesar 2,2 persen dan di bawahnya<sup>8</sup>. Selain itu, sejauh ada bias yang diakibatkan oleh transaksi e-commerce, hal ini menjelaskan pentingnya meningkatkan keakuratan data statistik konsumsi



secara nasional, mengingat perkiraan konsumsi BPS didasarkan pada survei rumah tangga, bukan survei terhadap para pengecer.

**Konsumsi swasta diperkirakan akan semakin meningkat dengan fundamental yang kuat.** Singkatnya, faktor-faktor sementara telah menurunkan konsumsi swasta di Triwulan ke-2, namun seiring meredanya faktor-faktor tersebut, konsumsi tampak mulai pulih kembali di Triwulan ke-3. Indikator-indikator bulanan yang berfungsi sebagai indikator tradisional konsumsi swasta telah menjadi lebih tidak memadai lagi karena tidak menangkap konsumsi jasa, yang baru-baru ini menguat. Pertumbuhan konsumsi swasta diperkirakan akan terus pulih oleh karena semua pendorong utamanya terus mendukung daya beli rumah tangga dan memperkuat sentimen konsumen.

<sup>1</sup> Pertumbuhan konsumsi swasta adalah sebesar 5,1 persen yoy di Triwulan ke-2 tahun 2016.

<sup>2</sup> Lihat Bank Dunia (2017a).

<sup>3</sup> Lihat <https://www.indonesia-investments.com/id/news/todays-headlines/tax-compliance-in-indonesia-seen-rising-after-amnesty-program/item8301>

<sup>4</sup> Dua putaran pemilihan gubernur diadakan di Jakarta pada tanggal 15 Februari dan 19 April 2017 untuk memilih Gubernur DKI Jakarta untuk masa jabatan lima tahun.

<sup>5</sup> Berdasarkan perkiraan Susenas, 20 persen rumah tangga teratas menyumbang setidaknya 47 persen konsumsi swasta. Upaya pemungutan pajak yang meningkat akan sangat mempengaruhi kelompok ini sehingga telah secara signifikan mengganggu konsumsi swasta.

<sup>6</sup> Lihat Bank Dunia (2017b). Selain itu, tingkat pengangguran menurun lebih dalam di bulan Agustus, 2017.

<sup>7</sup> Konsumsi jasa (kesehatan dan pendidikan, transportasi dan komunikasi) tumbuh rata-rata sebesar 5,6 persen yoy pada Triwulan ke-3, sementara konsumsi barang tumbuh rata-rata sebesar 3,7 persen.

<sup>8</sup> Lihat Singapore Post (2014), OECD, UNCTAD dan WTO (2016), Badan Kebijakan Fiskal (2016).

### 3. Tekanan inflasi terus mereda di Triwulan ke-3 didukung oleh harga pangan dan non-pangan yang terkendali

**Tekanan inflasi pada Triwulan ke-3 terus mereda akibat meredanya inflasi pangan dan non-pangan secara umum...**

Inflasi IHK turun ke rata-rata 3,8 persen yoy di Triwulan ke-3 2017 dari rata-rata 4,3 persen di Triwulan ke-2. Kecuali untuk kategori perumahan-utilitas dan pendidikan-rekreasi, harga-harga terkendali pada kategori non-pangan lainnya, serta penurunan lebih lanjut pada harga pangan, yang berkontribusi terhadap menurunnya inflasi di Triwulan ke-3 (Gambar 18). Demikian pula pada inflasi inti, yang padanya tidak termasuk harga bergejolak dan harga barang diatur pemerintah, tercatat menurun dari rata-rata sebesar 3,2 persen di Triwulan ke-2 ke tingkat inflasi inti yang terendah sebesar 3,0 persen di Triwulan ke-3<sup>24</sup>. Inflasi dalam komponen harga yang diatur pemerintah juga menurun di Triwulan ke-3 ke rata-rata 9,3 persen, dari 9,5 persen di Triwulan ke-2 yang disebabkan oleh meredanya dampak kenaikan harga listrik di paruh pertama tahun ini. Selain itu, inflasi harga barang bergejolak turun ke rekor triwulanan terendah, di rata-rata 0,9 persen di Triwulan ke-3.

**...kecuali kategori perumahan-utilitas dan pendidikan-rekreasi, yang tingkat inflasinya lebih tinggi**

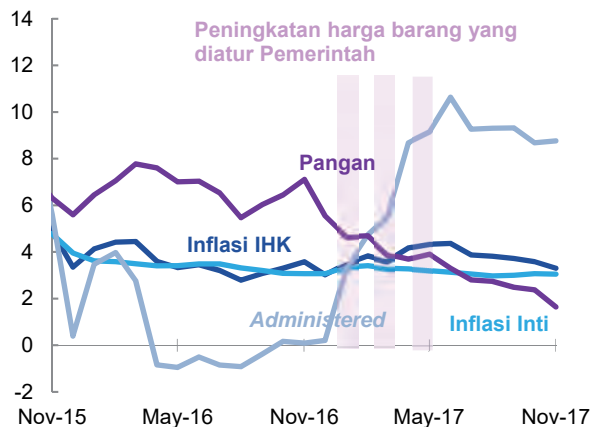
Karena inflasi harga pangan mentah dan makanan siap saji turun, inflasi pangan secara keseluruhan turun dari rata-rata sebesar 3,6 persen yoy di Triwulan ke-2 menjadi 2,7 persen di Triwulan ke-3. Mencapai tingkat terendah sejak Triwulan ke-4 tahun 2003, inflasi harga pangan mentah turun menjadi rata-rata 1,4 persen di Triwulan ke-3<sup>25</sup>. Di sisi lain, harga pada kategori perumahan-utilitas naik tipis karena peningkatan harga yang pesat di biaya penyewaan rumah, serta harga bahan bangunan dan jasa konstruksi rumah, gaji asisten rumah tangga, dan utilitas. Sementara inflasi pendidikan-rekreasi meningkat karena dimulainya tahun ajaran baru di Triwulan ke-3 dan biaya pendidikan yang lebih tinggi di semua jenjang pendidikan.

<sup>24</sup> Secara bulanan, inflasi inti adalah 3,0 persen yoy pada bulan Agustus dan September 2017, yang merupakan rekor terendah sejak indeks harga konsumen inti dimulai pada bulan Januari 2003.

<sup>25</sup> Ini kurang dari setengah dari 2,9 persen di Triwulan ke-2 2017 dan kurang dari seperempat dari 7,1 persen yang terlihat di Triwulan ke-4 2016. Inflasi harga pangan mentah turun selama tiga triwulan berturut-turut terutama karena cuaca yang menguntungkan dan upaya pemerintah untuk mempertahankan harga pangan. Lihat Bank Dunia (2017c).

**Gambar 18: Inflasi IHK menurun di Triwulan ke-3 karena harga pangan dan non-pangan yang terkendali...**

(perubahan yoy, persen)

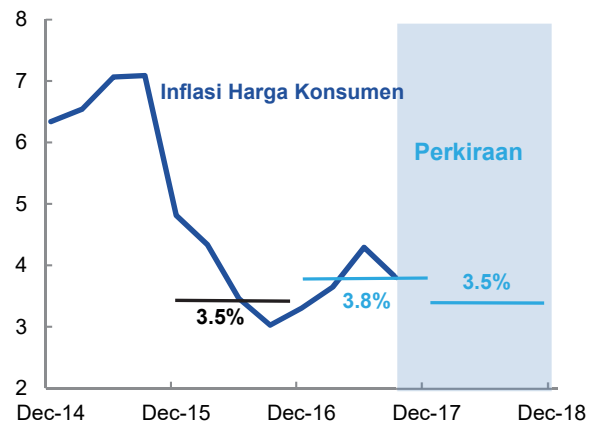


Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: Harga pangan merupakan rata-rata tertimbang komponen bahan mentah dan harga pangan olahan dari IHK.

**Gambar 19: Inflasi pangan yang rendah yang berkepanjangan diperkirakan akan menurunkan perkiraan inflasi IHK**

(perubahan tahunan rata-rata yoy, persen)



Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: Harga pangan merupakan rata-rata tertimbang komponen bahan mentah dan harga pangan olahan dari IHK.

### Harga pangan mentah yang terkendali selama periode yang panjang terus menekan inflasi di bulan November

Inflasi IHK terus menurun di bulan November menjadi 3,3 persen yoy, terendah sepanjang tahun 2017. Inflasi bahan baku pangan mencatat nilai terendah dalam kurun waktu hampir 14 tahun, mengalami kontraksi sebesar 0,5 persen, terutama dikarenakan oleh tingginya harga di periode yang sama di tahun yang lalu ketika cuaca buruk mengganggu pasokan sembako, seperti cabai. Menurunnya harga pangan mentah dalam jangka waktu yang lama telah membatasi tekanan inflasi yang berasal dari komponen bergejolak<sup>26</sup>, dengan inflasi komponen harga bergejolak yang mengalami kontraksi sebesar 1,2 persen di bulan November, yang merupakan rekor terendah bulanan. Sementara itu, inflasi inti tetap stabil dikisaran 3,1 persen.

### Inflasi IHK diperkirakan rata-rata sebesar 3,8 persen pada 2017 dan turun menjadi 3,5 persen pada tahun 2018

Mengingat penurunan harga pangan yang terus berlanjut dan tidak adanya kenaikan harga energi lanjutan yang direncanakan tahun ini<sup>27</sup>, Inflasi IHK diperkirakan mencapai rata-rata sebesar 3,8 persen di tahun 2017, dan menurun lagi menjadi 3,5 persen pada tahun 2018 (Gambar 19). Perkiraan inflasi *baseline* memperkirakan adanya sedikit kenaikan pada harga minyak mentah dan beberapa efek inflasi dari pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden pada tahun 2018 dan 2019. Risiko terhadap perkiraan inflasi berada pada perkiraan yang cukup optimistis, dan termasuk penyesuaian harga energi menyusul terjadinya pergerakan pasar, kelangkaan biji-bijian

<sup>26</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) membagi inflasi IHK menjadi tiga komponen: inflasi inti, inflasi harga barang yang harganya diatur pemerintah (*administered*), dan inflasi komponen volatil. Inflasi inti cenderung terus berlanjut dan biasanya dipengaruhi oleh faktor fundamental, sementara komponen inflasi harga barang yang harganya diatur pemerintah dipengaruhi oleh guncangan yang terkait dengan kebijakan penetapan harga pemerintah. Komponen volatil terutama terdiri dari komponen makanan dan cenderung bergerak karena guncangan terkait makanan seperti tanaman pangan, cuaca, atau harga pangan dalam negeri dan internasional.

<sup>27</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada akhir bulan September mengumumkan niatnya untuk mempertahankan harga minyak tanah, solar, dan bensin RON 88 sampai akhir tahun 2017.

yang terkait dengan La Nina<sup>28</sup>, dan depresiasi nilai Rupiah, sehingga menyebabkan meningkatnya harga impor.

#### 4. Kondisi keuangan makro Indonesia secara umum tetap stabil di Triwulan ke-3

**Permintaan untuk aset Indonesia menurun karena Bank Sentral AS (*the Fed*) menaikkan tingkat suku bunga**

Di Triwulan ke-3, minat untuk aset Indonesia sedikit melemah. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mendatar, nilai Rupiah terdepresiasi 1,2 persen, dan imbal hasil obligasi turun lebih cepat dibandingkan dengan Triwulan ke-2. Sebaliknya, arus masuk modal bersih cukup kuat di Triwulan ke-3 karena adanya arus masuk dalam jumlah besar masuk ke sektor teknologi dan *e-commerce* di Indonesia. Tekanan inflasi yang tidak terlalu besar, nilai Rupiah yang relatif stabil, dan hasil pertumbuhan PDB yang cukup tinggi di Triwulan ke-2 memberi ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk memangkas kebijakan suku bunganya sebanyak dua kali di Triwulan ke-3. Pertumbuhan kredit terus menurun dari yang diperkirakan, sehingga BI menurunkan targetnya tahun ini, dari 10-12 persen menjadi 8-10 persen.

**Bank Indonesia memulai siklus baru pelonggaran kebijakan moneter di Triwulan ke-3...**

BI memangkas suku bunga acuan, *7-day reverse repo*, sebanyak dua kali sebesar 25 basis poin selama pertemuan bulanan dewan pada bulan Agustus dan September. Inflasi rendah dan defisit neraca transaksi berjalan yang dapat dikelola disebut-sebut sebagai alasan utama pemotongan tersebut. Sejak awal tahun ini, suku bunga pinjaman untuk modal kerja dan investasi masing-masing turun sebesar 40 dan 39 basis poin. Suku bunga pinjaman untuk konsumsi turun sekitar 60 basis poin (Gambar 20).

**...namun pertumbuhan kredit tetap lesu**

Meskipun kebijakan moneter melonggarkan 200 basis poin di sepanjang tahun 2016 dan 2017, pertumbuhan kredit tetap lamban, rata-rata di bawah 8 persen di Q3. Setelah mencapai titik tertinggi pada Mei 2017, pertumbuhan simpanan telah turun di bawah 10 persen (Gambar 21). Pertumbuhan kredit yang lebih lemah dari perkiraan agak membingungkan karena, seperti dicatat pada bagian 2, pertumbuhan investasi meningkat secara signifikan selama beberapa kuartal terakhir. Apalagi, BI tetap mempertahankan tingkat *countercyclical capital buffer* (CCB)<sup>29</sup> sebesar 0 persen sejak setidaknya bulan Mei tahun ini. Dalam siaran pers di bulan Mei, BI mencatat bahwa pihaknya akan mempertahankan CCB sebesar 0 persen oleh karena pertumbuhan kredit tidak “berlebihan”, pertumbuhan PDB stabil dan tidak ada risiko sistemik terhadap perekonomian. Dengan demikian, tingkat CCB saat ini seharusnya tidak menjadi penghambat pertumbuhan kredit, dan sebenarnya harus menjadi faktor perangsang sehingga pertumbuhan kredit yang lebih lemah dari yang diperkirakan menjadi semakin membingungkan.

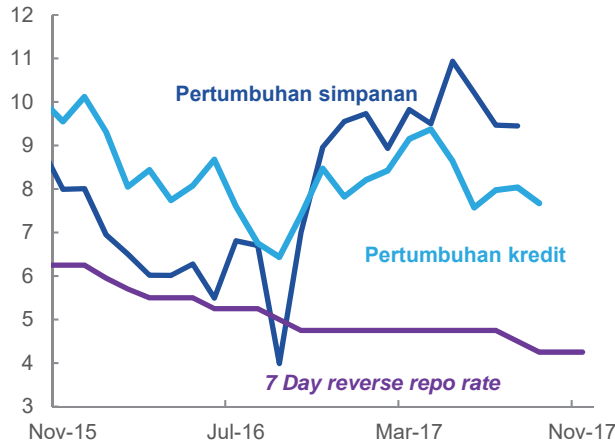
Namun demikian, beberapa faktor dapat diidentifikasi sebagai kontributor. Kinerja pertumbuhan kredit yang agak lamban ini sebagian disebabkan oleh usaha bank untuk mengelola kualitas aset pada pembukuan mereka (lihat pembahasan di bawah mengenai kredit macet). Pertumbuhan kredit dalam perdagangan grosir dan eceran, sektor perbaikan kendaraan bermotor dan sepeda motor – yang menyumbang kurang dari 30 persen dari total pinjaman industri – turun ke level terendah sejak pencatatan dimulai pada tahun 2002. Pertumbuhan kredit ke sektor manufaktur – yang pangannya

<sup>28</sup> Menurut model cuaca internasional, ada risiko bahwa pola cuaca La Niña akan muncul menjelang akhir tahun 2017 dan di sepanjang tahun 2018, yang akan mengganggu produksi komoditas, terutama biji-bijian, dan menyebabkan meningkatnya risiko bagi harga pangan. Jika terjadi La Niña, harga komoditas yang terkena dampaknya diperkirakan akan meningkat di paruh pertama tahun 2018.

<sup>29</sup> CCB menetapkan jumlah modal yang harus disisihkan oleh lembaga pemberi pinjaman, sejumlah dan di atas jumlah yang ditetapkan oleh kerangka peraturan yang khas seperti Basel, jika terjadi risiko di sistem perbankan.

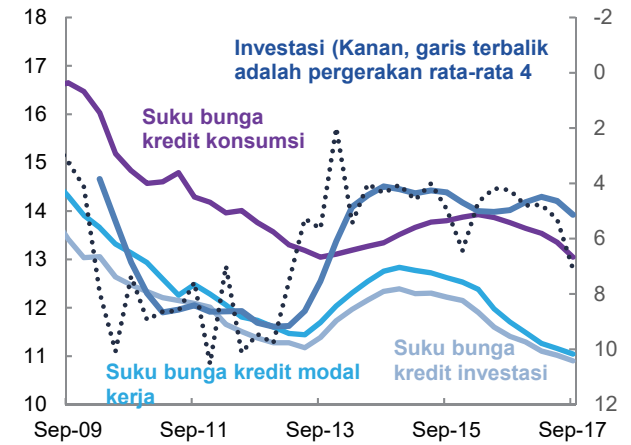
dari total pinjaman industri adalah sekitar 25 persen – berada di bawah tingkat pertumbuhan rata-rata di tahun lalu. Sebaliknya, pertumbuhan kredit di sektor manufaktur meningkat di Triwulan ke-3 dan rata-rata lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan yang tercatat di paruh pertama tahun 2017.

**Gambar 20: Pelonggaran kebijakan moneter untuk sementara ditunda setelah pelonggaran dilakukan di bulan Agustus dan September**  
(pertumbuhan, yoy persen)



Sumber: CEIC, Perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 21: Investasi terus meningkat setelah pelonggaran kebijakan moneter dilakukan**  
(persen)

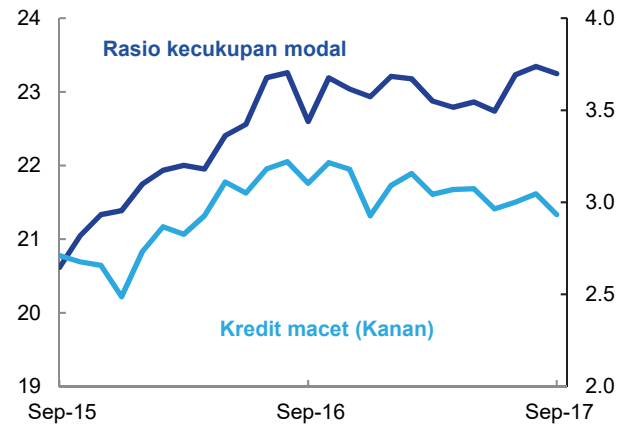


Sumber: CEIC, Perhitungan staf Bank Dunia

**Sistem perbankan secara umum tetap sehat di Triwulan ke-3**

Dua indikator utama untuk kesehatan sistem perbankan – kredit macet (*non-performing loan /NPL*) dan rasio kecukupan modal – terus menunjukkan bahwa secara keseluruhan, sistem perbankan Indonesia tetap sehat (Gambar 22). NPL tetap tidak berubah, sebesar sekitar 3 persen sejak awal tahun ini; namun demikian, kekhawatiran terhadap sektor tertentu tetap ada. Misalnya, sementara NPL secara keseluruhan berkisar sebesar sekitar 3 persen, NPL di industri perhotelan berada di atas 4 persen<sup>30</sup>.

**Gambar 22: Sistem perbankan secara umum tetap sehat**  
(persen)



Sumber: CEIC, Perhitungan staf Bank Dunia

<sup>30</sup> *Indonesia-Investments* (13 November 2017).

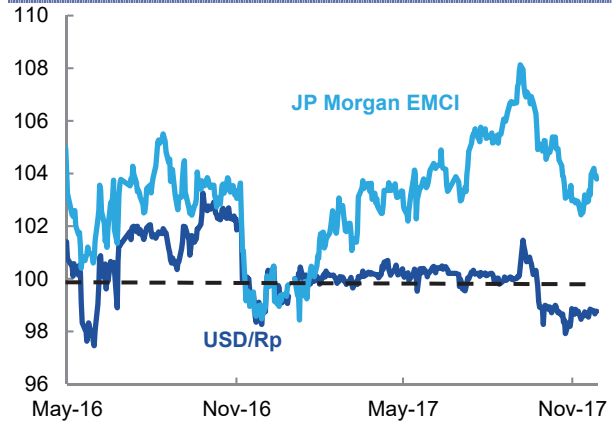
Setelah tetap mendatar di Triwulan ke-2, nilai Rupiah turun sedikit di Triwulan ke-3

Untuk pertama kalinya dalam kurun waktu hampir setahun, nilai Rupiah mengalami sedikit gejolak karena penurunan suku bunga BI yang tak terduga di bulan Agustus dan *forward guidance* (proyeksi atau prediksi dalam kebijakan moneter – pent.) yang diberikan oleh Bank Sentral AS mempengaruhi pasar keuangan global (Gambar 23). Setelah relatif stabil di Triwulan ke-2, Rupiah turun 1,2 persen di sepanjang Triwulan ke-3, mencapai di bawah Rp

13.500, yang terendah sejak pemilihan presiden AS tahun lalu. Penurunan tersebut sebagian disebabkan oleh pernyataan ulang Bank Sentral AS atas komitmennya untuk mengurangi besaran neraca yang dimulai pada bulan Oktober 2017. Mata uang negara-negara pasar berkembang lainnya juga terpengaruh oleh perkembangan ekonomi dan geopolitik global dan secara khusus terdepresiasi (lihat JP Morgan EMCI di Gambar 23) di Triwulan ke-3. Secara riil, Rupiah telah terdepresiasi sebesar 5 persen sejak awal tahun ini (Gambar 24). Aliran portofolio yang relatif rendah di Triwulan ke-3 juga memberi tekanan ke bawah terhadap mata uang. Para investor asing menarik diri dari ekuitas Indonesia, namun hal ini diimbangi oleh tingginya permintaan terhadap hutang Indonesia. Rupiah terus mengalami tekanan pada paruh pertama Triwulan ke-4, merangkak di atas Rp 13.600, level terendah dalam 14 bulan di akhir bulan Oktober. Namun demikian, agar tetap dalam perspektif, nilai Rupiah tetap sama, setelah Rupee India, salah satu mata uang negara Asia yang paling terapresiasi selama beberapa tahun terakhir ini (Gambar 25).

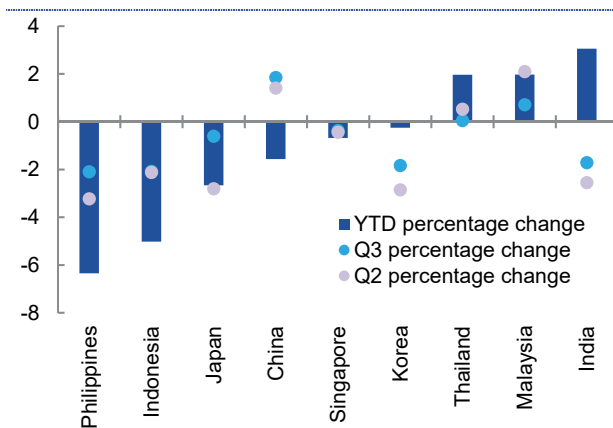
Gambar 23: Di Triwulan ke-3, secara nominal Rupiah terdepresiasi...

(indeks, 3 Januari 2017 = 100)



Sumber: CEIC; JP Morgan; Perhitungan staf Bank Dunia  
Catatan: Pergerakan ke bawah mewakili depresiasi.

Gambar 24: ...dan secara riil...  
(perubahan year-to-date, persen)

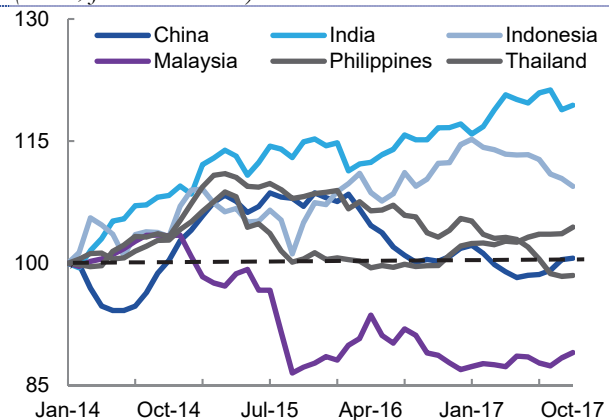


Sumber: BIS Real Effective Exchange Rate Index, Berbasis CPI (2010 = 100)

Catatan: Pergerakan ke bawah mewakili depresiasi.

Gambar 25: ... namun tetap terapresiasi dibandingkan dengan banyak negara-negara setara di kawasan dalam jangka waktu yang lebih lama

(indeks, Jan 2014 = 100)



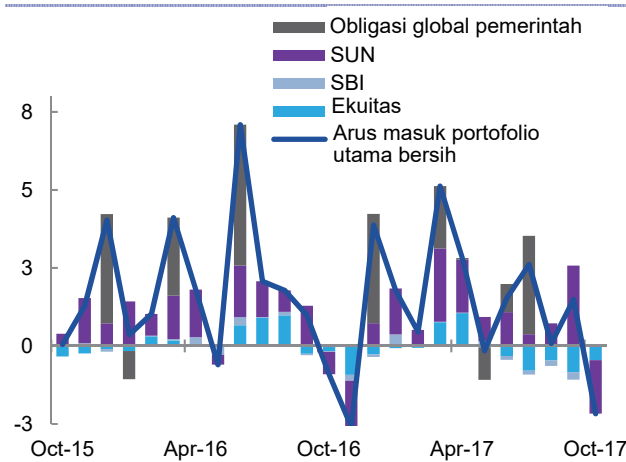
Sumber: BIS Real Effective Exchange Rate Index, Berbasis CPI (2010 = 100)

Catatan: Pergerakan ke bawah mewakili depresiasi.

Saham sektor  
pertambangan naik,  
mencerminkan  
kenaikan harga  
komoditas dan  
mengimbangi  
penurunan saham  
sektor  
infrastruktur...

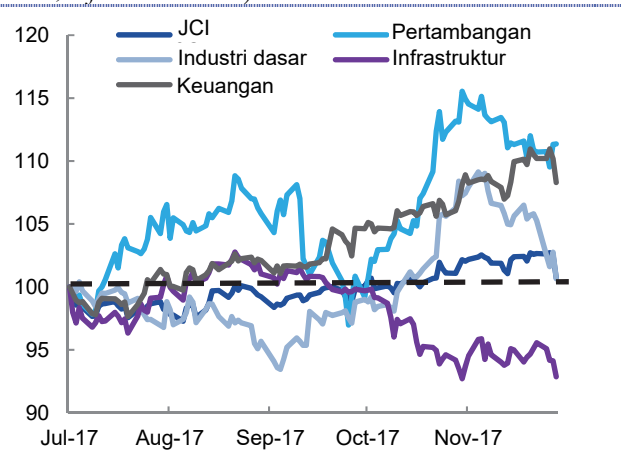
Setelah naik sebesar 4 persen di Triwulan ke-2, IHSG mendatar di Triwulan ke-3, karena minat investor dalam negeri terhadap ekuitas Indonesia mengimbangi aksi jual investor asing. Arus masuk asing bersih ke dalam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah menjadi negatif sejak bulan Juni tahun ini. Arus keluar bersih yang terbesar terjadi di Triwulan ke-3 – sebesar sekitar USD 2,1 miliar – dari IHSG setidaknya dalam kurun waktu empat tahun ini (Gambar 26). Di antara sub-indeks, terjadi lonjakan sementara di sektor pertambangan (Gambar 27). Peningkatan ekspor komoditas dan kenaikan harga sepanjang triwulan tersebut mendukung kenaikan sub indeks pertambangan untuk sebagian besar Triwulan ke-3. Sejak Triwulan ke-3, IHSG telah meningkat sebesar 0,6 persen. Yang mengecewakan, sub-indeks infrastruktur turun hampir sebesar 7 persen setelah tetap mendatar di Triwulan ke-3. Secara *year-to-date*, IHSG naik hampir 13 persen dengan sektor keuangan memimpin kenaikan, sebesar hampir 30 persen. Di akhir Oktober, IHSG ditutup di atas 6.000 untuk pertama kalinya dalam sejarah, yang mencerminkan kelanjutan daya tarik aset keuangan Indonesia bagi investor dalam negeri dan asing.

Gambar 26: Investor asing menjual ekuitas Indonesia (USD milyar)



Sumber: Database the Institute of International Finance (IIF) database; Perhitungan staf Bank Dunia  
Catatan: Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN)

Gambar 27: IHSG mendatar di Triwulan ke-3 namun sedikit terangkat di Triwulan ke-4 (indeks, 1 Juli 2017 = 100)



Sumber: BI, CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

...sementara imbal hasil obligasi turun ke level terendah dalam 4 tahun ini di Triwulan ke-3

Tren yang secara keseluruhan sama terjadi di Triwulan ke-3 tahun 2017 dengan investor yang berbondong-bondong membeli obligasi Indonesia. Pembelian luar negeri bersih obligasi Surat Utang Negara (SUN) dari Kementerian Keuangan di Triwulan ke-3 sedikit lebih tinggi dari yang terjadi di Triwulan ke-2. Secara rata-rata, dan di semua tenor, imbal hasil obligasi turun sekitar 47 basis poin dibandingkan dengan penurunan rata-rata sekitar 20 basis poin di Triwulan ke-2. Menjelang akhir Triwulan ke-3, imbal hasil pada obligasi 10 tahun turun ke level terendah dalam empat tahun ini, di level 6,5 persen, sebelum menguat kembali seiring dengan imbal hasil Treasury Bonds AS yang lebih tinggi. Selisih (spread) imbal hasil Treasury Bonds Indonesia dan AS mengecil di Triwulan ke-3 sebelum mengalami pembalikan kondisi. Sejauh ini, di Triwulan ke-4, selisih (spread) tersebut tetap sebagaimana sebelumnya di akhir Triwulan ke-3 (Gambar 28). Tingginya permintaan obligasi Indonesia juga mendapati kepemilikan asing yang naik ke titik tertinggi, sedikit di bawah 41 persen sebelum turun sedikit ke 39 persen.

**Gambar 28: Imbal hasil obligasi menunjukkan adanya volatilitas**

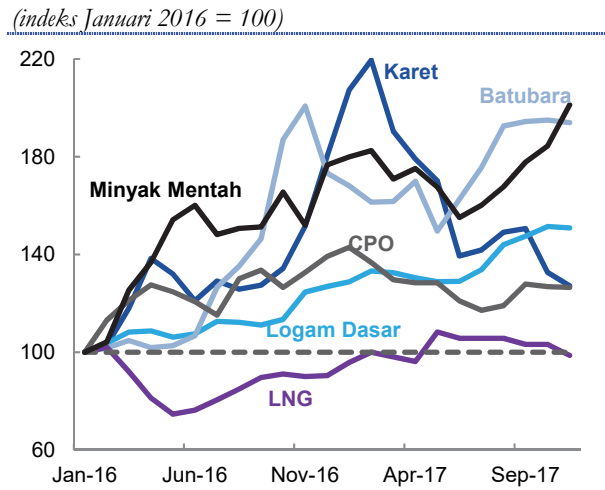


**5. Harga komoditas menguat di Triwulan ke-3**

Harga komoditas utama Indonesia pada umumnya meningkat di Triwulan ke-3

Harga untuk sebagian besar komoditas ekspor utama Indonesia, terutama minyak mentah, minyak kelapa sawit mentah (CPO), karet, batubara dan logam dasar pada umumnya meningkat di Triwulan ke-3. Pengecualiannya adalah pada harga LNG, yang tidak berubah sejak bulan Mei tahun ini. Harga batubara melonjak 38 persen yoy di Triwulan ke-3, mencapai level tertinggi dalam 10 bulan di bulan September karena langkah-langkah keselamatan dan lingkungan Tiongkok untuk mengurangi produksi

**Gambar 29: Harga global untuk enam komoditas utama ekspor Indonesia telah meningkat di Triwulan ke-3.**



Catatan: LNG adalah singkatan dari Liquefied Natural Gas dan CPO adalah singkatan dari Crude Palm Oil

batubara<sup>31</sup>. Harga minyak mentah melonjak 12 persen menjadi rata-rata USD 50,2 per barel di Triwulan ke-3, sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan 10 persen yang dibukukan di Triwulan ke-2, karena persediaan menurun yang disebabkan oleh permintaan global yang tinggi, peningkatan kepatuhan di antara para produsen OPEC dan non-OPEC dengan kesepakatan untuk membatasi produksi, dan menstabilkan produksi serpih minyak (*shale oil*) AS<sup>32, 33</sup>. Harga gas alam cair (*liquefied natural gas / LNG*) di Asia, yang sebagian terkait dengan minyak, meningkat sebesar 23 persen *yoy*, memperpanjang peningkatan sebesar 37 persen di Triwulan ke-2. Harga logam melonjak 27 persen di sepanjang triwulan ke level tertinggi selama 37 bulan di bulan September, yang disebabkan oleh permintaan yang tinggi, terutama dari sektor properti, infrastruktur, dan manufaktur Tiongkok, dan adanya kendala pasokan karena pembatasan kapasitas berlebih oleh pemerintah Tiongkok. Sebaliknya, harga minyak kelapa sawit turun sebesar 4 persen di Triwulan ke-3, setelah tidak berubah di Triwulan ke-2, dikarenakan pasokan yang tinggi di Malaysia dan Indonesia.

Dengan pengecualian pada karet, harga komoditas utama ini terus menguat di bulan Oktober, dan beberapa di antaranya naik ke level tertinggi selama beberapa bulan dan bahkan beberapa tahun. Harga logam memperpanjang kenaikannya di Triwulan ke-3 dan naik ke level tertinggi dalam 38 bulan. Demikian pula, harga minyak mencapai puncaknya dalam 28 bulan dan harga batubara mencapai puncaknya dalam 11 bulan di bulan Oktober (Gambar 29).

**Nilai tukar perdagangan (TOT) komoditas unggulan Indonesia di akhir 2017 diperkirakan meningkat jauh lebih tinggi dari tahun 2016, sebelum menurun di tahun 2018**

Bank Dunia memproyeksikan harga karet, minyak mentah, LNG dan minyak kelapa sawit akan meningkat di tahun 2018, sementara harga batubara dan logam dasar akan turun<sup>34</sup>. Harga minyak diperkirakan akan naik menjadi USD 58/bbl di tahun 2018 dari USD 53/bbl di tahun 2017, karena adanya permintaan yang tinggi dan berlanjutnya pembatasan terhadap produksi negara-negara anggota OPEC dan non-OPEC.<sup>35</sup> Harga batubara diperkirakan akan turun ke USD 70/mt pada tahun 2018 dari USD 85/mt pada tahun 2017, menyusul kenaikan sebesar hampir 30 persen pada tahun 2017, karena permintaan yang melambat, terutama di Tiongkok di mana program ramah lingkungan sedang dilakukan untuk mengurangi konsumsi batubara<sup>36</sup> (Gambar 30).

<sup>31</sup> Pemerintah Tiongkok mengumumkan dimulainya putaran baru pemeriksaan keselamatan di seluruh industri pada akhir bulan Agustus, menyusul terjadinya kecelakaan tambang batu bara di provinsi Shanxi di mana empat nyawa hilang.

<sup>32</sup> Pada bulan November 2016, para anggota OPEC sepakat untuk mengurangi produksi minyak gabungannya sebesar 1,2 juta bpd untuk menurunkan persediaan global dan menyeimbangkan pasar yang pasokannya berlebih.

<sup>33</sup> Harga perkiraan minyak mencerminkan harga acuan tiga jenis utama minyak yang mencakup Brent (38 ° API), Dubai Fateh (32 ° API), dan West Texas Intermediate (WTI, 40 ° API).

<sup>34</sup> *Commodity Market Outlook Bank Dunia* (Oktober, 2017).

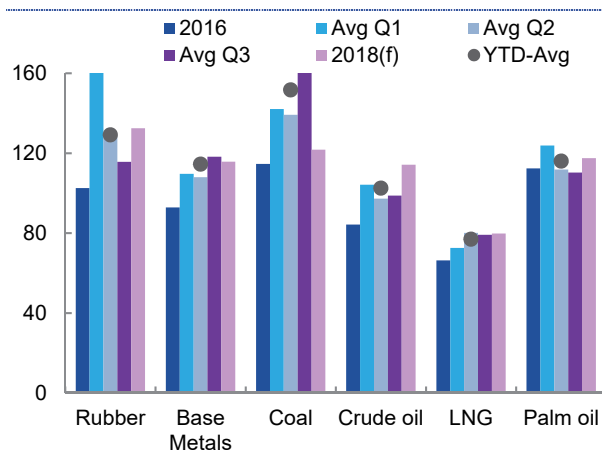
<sup>35</sup> Pada tanggal 1 Desember 2017, Arab Saudi dan Rusia, yang secara bersama-sama bertanggung jawab atas seperlima pasokan minyak global, serta 22 negara penghasil minyak lainnya di dalam dan di luar OPEC telah sepakat untuk mengurangi pasokan minyak global sebesar 1,8 juta barel per hari pada tahun 2018. Risiko yang besar terhadap perkiraan tersebut disumbang oleh pasokan volatil dari negara-negara produsen minyak yang tertekan secara politik seperti Irak, Libya, Nigeria, dan Venezuela. Di sisi lain, efisiensi di antara para produsen *shale oil* di AS (minyak yang diproduksi dari fragment batuan *shale* melalui proses pirolisis, hidrogenasi, dan disolusi termal – pent.) dapat meningkatkan pasokan minyak global.

<sup>36</sup> Risiko positif dan negatif lebih lanjut dibahas secara rinci dan dapat ditemukan di *Commodity Market Outlook Bank Dunia* yang terbaru, tersedia di <http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>. Pembaca juga dapat merujuk pada 2017 World Energy Outlook (IEA, 2017) untuk skenario permintaan dan penawaran energi di masa depan.



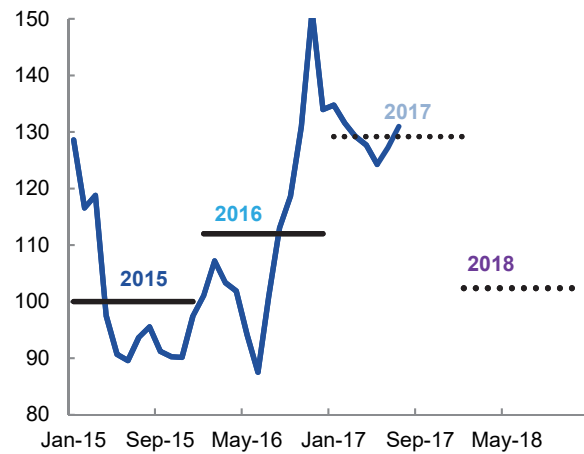
Karena Indonesia adalah eksportir bersih batubara dan importir bersih minyak, perkiraan pergerakan harga batu bara dan minyak menyiratkan adanya pergerakan yang signifikan dalam nilai tukar perdagangan (*terms of trade* - ToT) negeri ini<sup>37</sup>. Mengingat harga rata-rata YTD tahun 2017 dari enam komoditi lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016 (Gambar 30), Indeks Harga Tertimbang-Perdagangan Bersih untuk tahun 2017 diperkirakan akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016. Namun demikian, sesuai dengan perkiraan harga, Indeks tahun 2018 diproyeksikan akan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2016 (Gambar 31)<sup>38</sup>.

**Gambar 30: Harga minyak mentah diperkirakan akan meningkat pada tahun 2018, sementara harga batubara diperkirakan akan turun**  
(indeks 2015=100)



Sumber: Bank Dunia (2017d); Perhitungan staf Bank Dunia  
Catatan: p singkatan dari perkiraan

**Gambar 31: Indeks harga tertimbang perdagangan bersih menunjukkan lonjakan positif nilai tukar perdagangan komoditas untuk Indonesia sejak bulan Juli 2016**  
(indeks 2015=100)



Sumber: BPS; Bank Dunia; Perhitungan staf Bank Dunia  
Catatan: Indeks harga tertimbang perdagangan bersih dibangun di atas enam komoditas ekspor utama di Indonesia (karet, logam dasar, batubara, minyak, LNG, dan minyak kelapa sawit)

## 6. Defisit neraca transaksi berjalan mengecil karena surplus perdagangan meningkat

**Neraca Pembayaran (Balance of Payment – BOP) membukukan surplus triwulanan yang keenam secara berturut-turut di Triwulan ke-3 tahun 2017, ketika defisit**

Membukukan surplus triwulanan yang keenam secara berturut-turut, neraca pembayaran Indonesia (BOP) membukukan surplus terbesar sepanjang tahun ini sebesar USD 5,4 miliar (2,0 persen dari PDB) di Triwulan ke-3, naik dari 0,7 miliar dolar AS (0,3 persen dari PDB) di Triwulan ke-2 (Tabel 2). Yang mendasari surplus BOP yang lebih tinggi ini adalah defisit neraca transaksi berjalan yang lebih kecil dengan momentum ekspor yang solid, walaupun secara simultan terjadi kenaikan permintaan impor. Pada saat yang sama, surplus neraca modal dan finansial meningkat hampir dua kali lipat menjadi USD 10,4 miliar yang didorong oleh investasi asing (FDI) yang lebih besar dan lebih sedikit pembelian aset luar negeri oleh investor

<sup>37</sup> Nilai tukar perdagangan (*terms of trade* - TOT) mengacu pada harga relatif impor dalam hal ekspor dan didefinisikan sebagai rasio harga ekspor terhadap harga impor. Hal ini dapat diartikan sebagai jumlah barang impor yang bisa dibeli oleh suatu negara dengan per unit barang ekspor

<sup>38</sup> Indeks Harga Komoditas Perdagangan Bersih (NTI) didefinisikan sebagai:  $NTI_t = \frac{Berat_{i,p} \times Harga_{i,t}}{Harga_{i,t}}$

di mana  $Berat_{i,p} = \frac{(E_{i,t}) - (I_{i,t})}{\sum (E_{N,t}) - \sum (I_{N,t})}$  dan i= jenis komoditas; t= bulan; p=siklus periode (mis. Rata-rata 5 tahun); N = jumlah komoditas; T= tahun basis; E=nilai ekspor; I=nilai impor

transaksi berjalan  
mengecil dan  
surplus neraca  
keuangan meningkat  
dua kali lipat

Indonesia. Dengan demikian, cadangan devisa mencapai USD 129,4 miliar pada akhir Triwulan ke-3, naik USD 6,3 miliar dari akhir Triwulan ke-2, dan cukup untuk membiayai pembayaran hutang luar negeri pemerintah dan impor selama 8,6 bulan.

**Tabel 2: Neraca Pembayaran (*Balance of Payments - BOP*) Indonesia**  
(USD milyar, kecuali dinyatakan lain)

	Q3-2016	Q4-2016	Q1-2017	Q2-2017	Q3-2017
Neraca Pembayaran Secara Keseluruhan	5,7	4,5	4,5	0,7	5,4
<i>Sebagai persen PDB</i>	2,3	1,9	1,9	0,3	2,0
Transaksi Berjalan	(5,1)	(1,8)	(2,3)	(4,8)	(4,3)
<i>Sebagai persen PDB</i>	(2,1)	(0,7)	(1,0)	(1,9)	(1,7)
Neraca perdagangan barang	3,9	5,1	5,6	4,8	5,3
Neraca perdagangan jasa	(1,6)	(1,9)	(1,2)	(2,2)	(2,2)
Penerimaan	(7,4)	(5,1)	(6,8)	(7,5)	(7,4)
Neraca Modal dan Keuangan	9,9	7,7	7,1	5,9	10,4
<i>Sebagai persen PDB</i>	4,1	3,2	3,0	2,3	4,0
Investasi Langsung	6,6	3,5	2,8	4,6	6,8
Investasi Portofolio	6,6	(0,3)	6,6	8,1	4,1
Investasi Lainnya	(3,2)	4,4	(2,1)	(7,1)	(0,4)

Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia

Defisit neraca  
transaksi berjalan  
mengecil dengan  
surplus perdagangan  
yang lebih tinggi dan  
defisit penerimaan  
yang lebih rendah

Defisit neraca transaksi berjalan mengecil di Triwulan ke-3, menjadi 1,7 persen PDB tahunan sebesar 1,9 persen dari PDB pada triwulan 2, didorong oleh surplus perdagangan barang yang lebih tinggi dan sedikit peningkatan dalam defisit penerimaan. Peningkatan perdagangan barang didorong oleh peningkatan ekspor, baik nilai maupun volume, melampaui impor yang juga meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan dalam negeri. Harga komoditas yang lebih tinggi serta permintaan yang lebih tinggi dari mitra dagang Indonesia untuk barang-barang manufaktur menambah dukungan terhadap momentum ekspor ini. Di sisi lain, perbaikan dalam defisit penerimaan ini dipengaruhi oleh pola musiman pembayaran dividen yang lebih rendah serta pembayaran bunga utang pemerintah yang lebih rendah. Defisit perdagangan jasa tetap stabil.

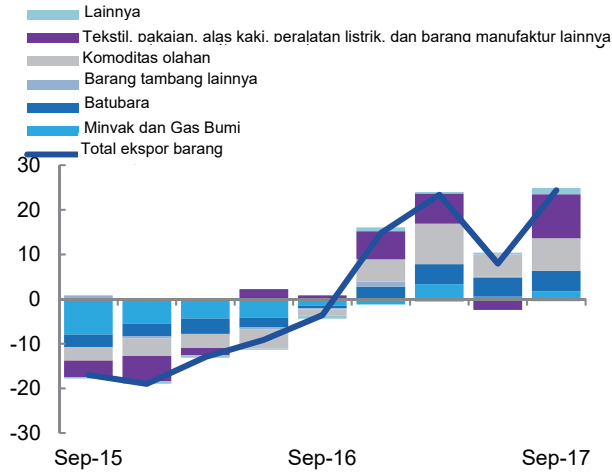
Perdagangan barang  
mengalami surplus  
yang lebih besar  
karena ekspor  
manufaktur pulih  
kembali dan ekspor  
komoditas terkait  
tetap tinggi

Didukung oleh harga komoditas yang lebih tinggi dan permintaan yang lebih tinggi dari mitra dagang, surplus perdagangan barang di Triwulan ke-3 tahun 2017 adalah sebesar USD 5,3 miliar atau 2 persen dari PDB, hampir sama dengan pangasanya di Triwulan ke-2. Ekspor barang tumbuh 24,4 persen yoy di Triwulan ke-3, jauh lebih tinggi dari peningkatan sebesar 8,0 persen di Triwulan ke-2, karena kombinasi i) efek dasar yang rendah dari hari kerja yang lebih sedikit tahun lalu oleh karena Idul Fitri terjadi di Triwulan ke-3 2016; ii) lonjakan ekspor manufaktur, dan iii) ekspor minyak dan gas yang lebih tinggi, meskipun produksi minyak dalam negeri yang lebih rendah<sup>39</sup>. Ekspor barang-barang manufaktur – tekstil, pakaian, alas kaki, peralatan listrik, dan barang-barang manufaktur lainnya – tumbuh 19,3 persen di Triwulan ke-3 setelah mengalami kontraksi sebesar 4,5 persen di Triwulan ke-2, menyumbang 40 persen dari total pertumbuhan ekspor. Ekspor komoditas mentah dan olahan tetap tinggi, menyumbang sekitar setengah dari pertumbuhan ekspor, sejalan dengan peningkatan harga komoditas energi dan membaiknya permintaan global. Ekspor

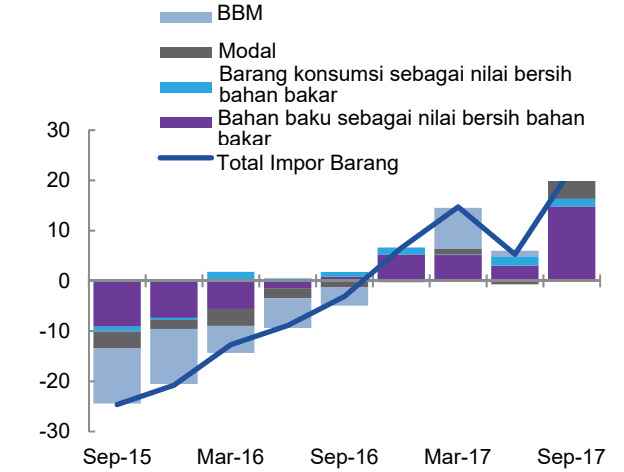
<sup>39</sup> Hal ini berbeda dengan Triwulan ke-2 di mana sebagian besar produksi minyak dalam negeri dikonsumsi di dalam negeri. Tingkat *lifting* (jumlah dari minyak yang diangkat ke atas permukaan dan dapat dijual – pent.) minyak di Triwulan ke-1 tahun 2017, Triwulan ke-2 tahun 2017, dan Triwulan ke-3 tahun 2017 tercatat masing-masing sebesar 0,79 juta barel per hari (mbpd), 0,82 mbpd dan 0,79 mbpd.

minyak kelapa sawit dan batu bara mengalami kenaikan masing-masing sebesar 45 persen *yy* (Gambar 32). Ekspor ke Tiongkok dan Amerika Serikat menonjol, masing-masing mencatat pertumbuhan sebesar hampir 50 persen dan 20 persen *yy*, yang menandakan bahwa Indonesia juga mendapat keuntungan dari permintaan global yang meningkat yang diamati oleh eksportir lain di Asia Timur.

**Gambar 32: Lonjakan ekspor barang terutama didorong oleh komoditas mentah dan olahan, namun capaian sektor manufaktur juga tinggi**  
(kontribusi terhadap pertumbuhan, poin persentase)



**Gambar 33: Lonjakan impor bahan baku dan barang modal berkontribusi terhadap lonjakan impor barang secara total**  
(kontribusi terhadap pertumbuhan, poin persentase)



Sumber: CEIC dan BI; Perhitungan staf Bank Dunia  
Catatan: Manufaktur lainnya meliputi mesin, kendaraan dan bagian kendaraan, serta barang olahan lainnya. Komoditas olahan terdiri dari minyak kelapa sawit, karet, logam dasar, dan kayu. Barang tambang lainnya terutama mengacu pada tembaga.

Sumber: CEIC dan BI; Perhitungan staf Bank Dunia

**Impor barang modal meningkat di Triwulan ke-3**

Pertumbuhan impor barang melonjak menjadi 23,0 persen, lebih tinggi dari peningkatan sebesar 5,5 persen di Triwulan ke-2, dengan semua kategori impor utama berkontribusi terhadap pertumbuhan. Secara khusus, pertumbuhan impor bahan baku melonjak sebesar 23,2 persen di Triwulan ke-3 dari 5,0 persen di Triwulan ke-2. Mencapai tingkat tertinggi sejak Triwulan ke-2 tahun 2012, pertumbuhan impor barang modal melonjak dari kontraksi sebesar 4,4 persen di Triwulan ke-2 menjadi 24,3 persen di Triwulan ke-3, terutama karena impor mesin pengolah data, perangkat telekomunikasi, peralatan bangunan dan mesin konstruksi yang lebih tinggi, baik secara nominal maupun secara riil (Gambar 33)<sup>40</sup>. Hampir separuh dari impor tersebut berasal dari Tiongkok, Jepang, Singapura dan Thailand.

**Terjadi peningkatan ekspor jasa di Triwulan ke-3 di mana jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia tercatat sebagai rekor**

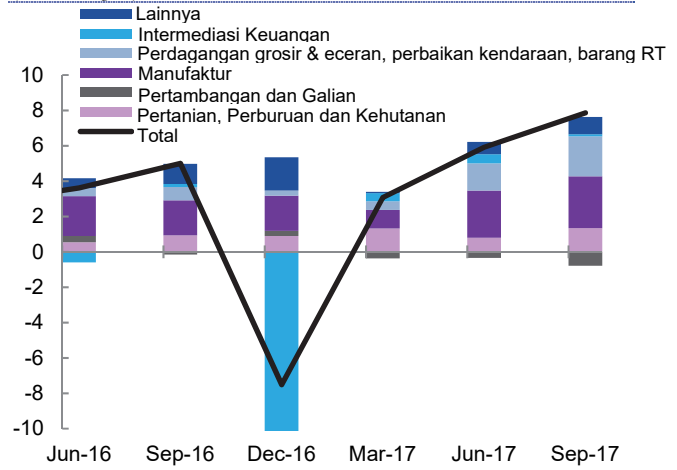
Di sisi jasa, ekspor jasa perjalanan (wisata) (komponen terbesar dari ekspor jasa) meningkat dari USD 2,8 miliar di Triwulan ke-2 tahun 2017 menjadi USD 3,4 miliar di Triwulan ke-3. Ekspor jasa tumbuh sedikit di bawah 9 persen di Triwulan ke-3 dibandingkan dengan sedikit di atas 5 persen di Triwulan ke-2. Hasil ini sejalan dengan peningkatan – 3,5 juta pengunjung di Triwulan ke-3 dibandingkan dengan 2,8 juta di Triwulan ke-2 – jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Kategori transportasi dan wisatawan Indonesia ke luar negeri merupakan pendorong utama kenaikan pertumbuhan impor jasa menjadi 15% di Triwulan ke-3 dibandingkan dengan di bawah 1,0 persen di Triwulan ke-2.

<sup>40</sup> Bank Indonesia (2017).

**Surplus neraca keuangan meningkat hampir dua kali lipat di Triwulan ke-3 dibandingkan dengan Triwulan ke-2, sebagian didukung oleh investasi asing (FDI) yang tinggi**

Surplus neraca modal dan keuangan meningkat di Triwulan ke-3 menjadi 4 persen dari PDB, dari 2,3 persen di Triwulan ke-2. Hasil ini didorong oleh arus masuk yang tinggi, terutama dalam bentuk investasi langsung asing (*foreign direct investment / FDI*). FDI bersih melanjutkan momentum peningkatan yang terlihat di Triwulan ke-2 dan mencatat arus masuk bersih terbesar selama lebih dari tujuh tahun ini di Triwulan ke-3. Hasil yang tinggi di Triwulan ke-3 didorong oleh arus masuk ke sektor teknologi dengan arus modal berprofil tinggi ke perusahaan-perusahaan rintisan (*startup*) Indonesia yang besar. Terjadi kembali arus masuk positif yang terbesar ke sektor manufaktur, dengan arus masuk FDI yang mencapai sekitar USD 2,9 miliar, sekitar 37 persen dari total FDI di Triwulan ke-3 (Gambar 34). Sektor perdagangan grosir dan eceran, perbaikan kendaraan, dan barang rumah tangga juga mengalami arus masuk yang tinggi - setara dengan 29 persen dari total FDI di Triwulan ke-3. Arus keluar bersih terjadi di sektor pertambangan dalam triwulan yang ketiga secara berturut-turut.

**Gambar 34: Arus masuk FDI bersih melonjak lagi di Triwulan ke-3 tahun 2017**  
(USD milyar)



Sumber: CEIC dan BI; Perhitungan staf Bank Dunia

Arus portofolio mencatat arus masuk yang lebih rendah di Triwulan ke-3 dibandingkan dengan Triwulan ke-2 terutama karena investor asing menjual ekuitas Indonesia mereka. Besarnya arus keluar yang mendekati rekor di kategori investasi lainnya di Triwulan ke-2 hanya mencatat arus keluar secara marjinal di Triwulan ke-3 karena investor dalam negeri mengurangi pembelian aset luar negeri.

**7. Peningkatan pemungutan penerimaan mendukung pengeluaran di tahun 2017, namun pengelolaan fiskal yang hati-hati tetap penting dilakukan di tahun 2018**

**Di tahun 2017 pemungutan penerimaan yang lebih tinggi mendukung pengeluaran**

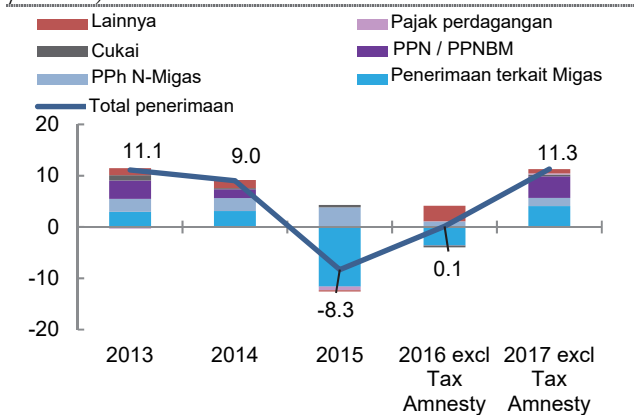
Tahun 2017 melanjutkan perbaikan manajemen fiskal. Pemungutan penerimaan yang lebih tinggi di bulan Januari-November, mendukung pengeluaran Pemerintah yang lebih tinggi dan memungkinkan Pemerintah untuk menanggapi kelemahan yang dirasakan di paruh pertama tahun 2017 dengan stimulus fiskal yang ringan, meningkatkan pengeluaran yang bertolak belakang dengan pemotongan anggaran yang terjadi di tahun 2016. Kinerja pajak pertambahan nilai (PPN) yang sangat baik sangatlah penting mengingat pertumbuhan konsumsi masyarakat rata-rata (Kotak 2), yang mencerminkan adanya kenaikan harga komoditas dan peningkatan manajemen kepatuhan. Hal ini memungkinkan Pemerintah untuk meningkatkan belanja barang, sosial, dan belanja modal dibandingkan dengan tahun lalu. Ke depan, APBN tahun 2018 menetapkan target penerimaan pajak yang sulit namun dapat dicapai untuk aliran penerimaan yang terkait dengan non-komoditas, namun secara luas mencerminkan berlanjutnya prioritas Pemerintah mengenai belanja sosial dan infrastruktur. Target defisit fiskal tahun 2018, sebesar 2,2 persen dari PDB, lebih rendah dari tahun-tahun

sebelumnya, memberikan peningkatan ruang fiskal dalam jangka pendek. Namun demikian, dalam jangka menengah, ruang fiskal tetap dibatasi oleh rasio pajak terhadap PDB yang relatif rendah. Pengelolaan fiskal yang hati-hati dan terus melanjutkan reformasi fiskal tetap menjadi hal yang terpenting, terutama menjelang pemilihan daerah dan pemilihan presiden di tahun 2018 dan 2019.

**Penerimaan terkait Migas dan PPN mendorong pertumbuhannya yang tinggi pemungutan penerimaan di tahun 2017**

Hingga akhir November, total pemungutan penerimaan tumbuh 11,3 persen yoy secara nominal, tidak termasuk penerimaan yang dipungut dalam program Amnesti Pajak. Penerimaan yang secara langsung terkait Minyak dan Gas (O&G)<sup>41</sup> dan PPN memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ini, masing-masing sebesar 4,1 dan 4,2 poin persentase (Gambar 35). Penerimaan dari cukai, yang turun di tahun 2016, kembali pulih, memberikan kontribusi sebesar 0,3 poin persentase terhadap total pertumbuhan.

**Gambar 35: Penerimaan terkait Migas dan PPN mendorong pertumbuhan yang tinggi di tahun 2017**  
(kontribusi terhadap pertumbuhan, Januari-November; poin persentase)



Sumber: Kementerian Keuangan; Perhitungan staf Bank Dunia  
Catatan: Migas adalah singkatan dari minyak dan gas; PPN / LGST adalah pajak pertambahan nilai / pajak penjualan barang mewah; N-Migas adalah singkatan dari non-migas; "Lainnya" termasuk pajak bumi dan bangunan, penerimaan pajak lainnya, dan penerimaan non-pajak lainnya (termasuk keuntungan perusahaan publik dan penerimaan dari badan layanan umum)

**Hasil dari pengeluaran terus mencerminkan peningkatan kualitas belanja**

Di sisi pengeluaran, Pemerintah mencairkan 82 persen dari APBN Perubahan tahun 2017 atau sebesar Rp 1.749 triliun di akhir bulan November. Secara nominal, total belanja pemerintah bertumbuh sebesar 6,9 persen yoy<sup>42</sup> sepanjang bulan Januari sampai November, lebih cepat dari 5,7 persen pada periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini secara luas mencerminkan peningkatan kualitas belanja: belanja barang dan barang modal masing-masing naik sebesar 9,6 dan 13,2 persen, sementara belanja sosial meningkat sebesar 24,3 persen secara nominal (Gambar 37). Yang terakhir ini mencerminkan perluasan Program Keluarga Harapan (PKH) dari 3.500.000 menjadi 6 juta keluarga. Belanja pegawai dibatasi, tumbuh sebesar 1,8 persen dibandingkan dengan 10,3 persen tahun lalu, sementara belanja subsidi terus menurun karena kenaikan tarif listrik di paruh pertama tahun ini.

<sup>41</sup> Ini didefinisikan sebagai jumlah pajak penghasilan Migas dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Migas. Lihat Kotak 4 untuk analisis hubungan yang lebih luas antara penerimaan dan harga minyak.

<sup>42</sup> Semua angka pertumbuhan yoy di bagian ini adalah secara nominal, kecuali dinyatakan lain.

**Kotak 2: Bagaimana kaitan antara tren konsumsi dan pertumbuhan PPN di Indonesia?**

Hubungan antara pajak pertambahan nilai (PPN) dan basis pajaknya, konsumsi masyarakat, diperkirakan akan erat: jika konsumsi bertumbuh, atau turun, penerimaan PPN seharusnya juga tumbuh, atau turun. Akan tetapi, hipotesis hubungan ini tidaklah begitu erat di Indonesia (Gambar 36).

Gambar 36 menampilkan korelasi antara tingkat pertumbuhan konsumsi masyarakat dan pemungutan PPN. Ini menunjukkan bahwa korelasinya tidak stabil, tanpa adanya tren yang sistematis. Dalam beberapa periode, seperti Triwulan ke-2 tahun 2013 - Triwulan ke-3 tahun 2015, korelasi ini berada di atas 0,5, yang menyiratkan bahwa tingkat pertumbuhan PPN dan konsumsi sebagian besar bergerak ke arah yang sama. Namun demikian, pada periode lain, seperti Triwulan ke-4 tahun 2005 - Triwulan ke-3 tahun 2007, korelasinya negatif, yang menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan konsumsi dan PPN bergerak berlawanan arah. Hal ini juga tidak muncul dari gambaran yang menyatakan bahwa hubungan tersebut kurang lebih telah menjadi berkorelasi seiring waktu.

Mengingat hubungan mekanis yang ada antara PPN dan konsumsi, apa yang dapat menjelaskan hubungan yang mudah berubah ini? Lima hipotesis dapat diajukan:

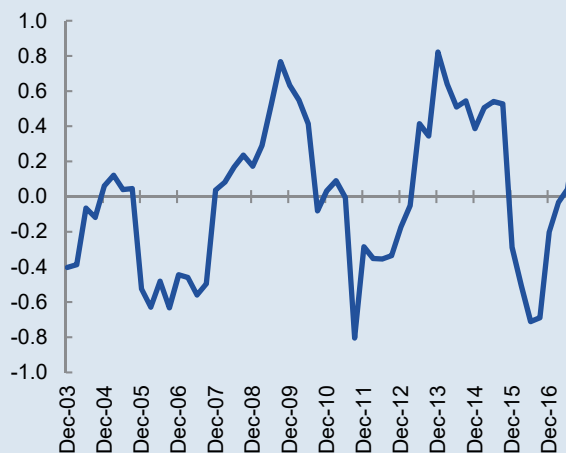
- 1) **Keterkaitan dengan minyak.** Dampak harga minyak mentah terhadap PPN impor, yang menyumbang sekitar sepertiga dari total PPN, jauh lebih signifikan dibandingkan dengan konsumsi masyarakat<sup>1</sup>.
- 2) **Waktu pengajuan bagi wajib pajak.** Peraturan PPN memberikan beberapa fleksibilitas bagi beberapa jenis wajib pajak yang berbeda mengenai kapan saat mengajukan kewajiban PPN mereka, dengan pengajuan yang wajib dilakukan pada bulan yang sama, satu bulan setelahnya, atau dalam seperempat dari waktu kegiatan konsumsi. Selain itu, beberapa wajib pajak menunda pengajuan mereka melebihi waktu yang diizinkan peraturan.
- 3) **Kapasitas administratif.** Administrasi pengembalian PPN oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sering tertunda, kadang-kadang selama satu tahun. Keterlambatan ini sebagian karena kebijakan 100 persen audit terhadap permintaan pengembalian PPN.
- 4) **Kebijakan pembebasan pajak.** Tingginya jumlah pembebasan PPN mengakibatkan distorsi dalam cara PPN memberi dampak terhadap konsumsi dan meningkatnya peluang untuk penghindaran pajak.
- 5) **Perubahan kebijakan ambang batas PPN.** Mulai bulan Januari 2014, Pemerintah merevisi ambang batas registrasi PPN dari Rp 600 juta menjadi Rp 4,8 miliar dari omset kotor. Menurut kebijakan ini, registrasi wajib hanya diwajibkan bagi perusahaan dengan omset kotor di atas ambang batas; bagi mereka yang berada di bawah ambang batas tersebut, aturan ini bersifat sukarela. Dibandingkan dengan standar internasional, dan relatif terhadap GDP riil per kapita, ambang batas ini adalah yang tertinggi di dunia. Karena perubahan ini, banyak kegiatan bisnis dan konsumsi masyarakat berlangsung yang tidak tertangkap dalam sistem PPN.

Sementara diperlukan adanya penelitian lebih lanjut untuk lebih memahami masalah ini dan mengidentifikasi hipotesis mana yang menyebabkan lemahnya hubungan antara PPN dan konsumsi, analisis pendahuluan ini menunjukkan bahwa diperlukan adanya peringatan yang signifikan dalam mengaitkan tren PPN dengan pertumbuhan konsumsi.

<sup>1</sup> Lihat Kotak 4 untuk pembahasan mengenai korelasi antara harga minyak mentah dan PPN.

**Gambar 36: Korelasi antara konsumsi masyarakat dan PPN telah menurun sejak tahun 2014**

(korelasi antara PPN dan pertumbuhan konsumsi masyarakat yoy, jendela pergerakan 8-triwulan)

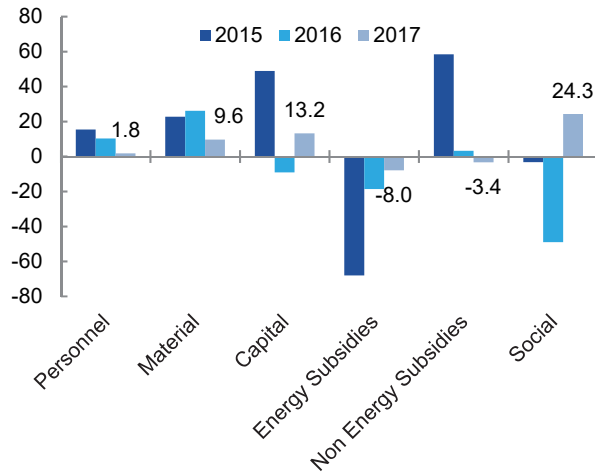


Sumber: Kementerian Keuangan dan Perhitungan staf Bank Dunia  
Catatan: Konsumsi masyarakat mempergunakan harga saat ini.

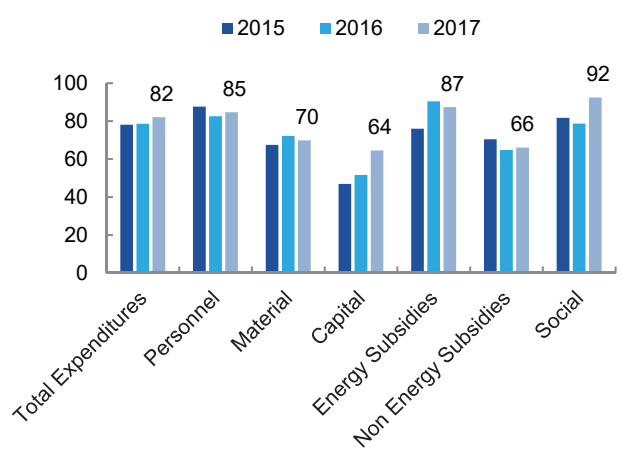
**Pelaksanaan anggaran belanja material, modal, dan sosial telah meningkat**

Membandingkan pengeluaran aktual dengan APBN Perubahan, kecepatan pencairan alokasi anggaran belanja material, modal, dan sosial juga nampaknya telah meningkat. Hingga akhir bulan November, Pemerintah telah mengalokasikan 64 persen anggaran untuk belanja modal dan lebih dari 90 persen dari pagu anggaran belanja sosial (Gambar 38). Laju realisasi belanja modal masih lamban yang disebabkan oleh karena proses pengadaan, namun telah membaik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pencairan subsidi non energi (beras, pupuk, benih, bunga pinjaman, dll.) melambat tahun ini karena adanya hambatan administratif.

**Gambar 37: Peralihan terus-menerus dalam belanja pegawai dan subsidi energi ke belanja barang, modal, dan sosial**  
(pertumbuhan belanja aktual bulan Januari-November, persen)



**Gambar 38: Pencairan anggaran belanja barang, modal, dan sosial telah meningkat**  
(belanja aktual bulan Januari-November sebagai bagian dari APBN Perubahan, persen)



Sumber: Kementerian Keuangan, perhitungan staf Bank Dunia  
Catatan: Beberapa belanja sosial direklasifikasi ke dalam belanja barang di tahun 2016.

**Proyeksi defisit fiskal dipertahankan sebesar 2,7 persen dari PDB di tahun 2017**

Dengan tidak adanya perubahan besar dalam arah penerimaan dan pengeluaran, proyeksi defisit fiskal untuk tahun 2017 dipertahankan sebesar 2,7 persen dari PDB. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran masing-masing adalah Rp 1.677 triliun dan Rp 2.044 triliun.<sup>43</sup> Defisit diproyeksikan lebih kecil dari target APBN-P tahun 2017 (2,9 persen dari PDB) meskipun penerimaan lebih rendah dari perkiraan karena tingkat pencairan anggaran yang diproyeksikan sebesar 95,8 persen<sup>44</sup>.

**Melihat ke tahun 2018, pertumbuhan penerimaan dalam APBN bergantung pada pajak penerimaan non-migas dan PPN**

APBN tahun 2018 yang disetujui oleh DPR pada tanggal 25 Oktober 2017 menetapkan target penerimaan total yang cukup berat sebesar Rp 1.894,7 triliun atau 12,8 persen dari PDB. Angka ini menyiratkan bahwa APBN-P tahun 2017 tidak termasuk penerimaan dari program Amnesti Pajak<sup>45</sup>. Meskipun harga minyak membaik, APBN tahun 2018 lebih banyak bergantung pada pajak penghasilan dan PPN non-migas, yang jika mencapai target, masing-masing akan berkontribusi sebesar

<sup>43</sup> Proyeksi Bank Dunia untuk tahun 2017 mengasumsikan harga minyak mentah 53 USD/barel dibandingkan dengan asumsi APBN-P yang sebesar 48 USD / barel. Pada IEQ edisi Oktober 2017, total penerimaan diproyeksikan mencapai Rp 1.684 triliun, sementara pengeluaran diproyeksikan mencapai Rp 2.052 triliun di tahun 2017.

<sup>44</sup> Proyeksi tingkat pencairan didasarkan pada rata-rata pencairan selama 3 tahun sebelumnya.

<sup>45</sup> Tingkat pertumbuhan penerimaan sebesar ini terakhir dicapai pada tahun 2010-2013 ketika harga minyak dan pertumbuhan PDB berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi

6,4 dan 3,8 persen dari total pertumbuhan sebesar 11,2 persen<sup>46</sup>. Hal ini mengemukakan pentingnya reformasi Pemerintah yang terus berlanjut, baik terhadap kebijakan maupun administrasi perpajakan, terutama berkenaan dengan pajak penghasilan dan PPN, yang merupakan bagian dari sebagian besar penerimaan pajak. Penerimaan dari cukai tembakau merupakan aliran lain yang menarik untuk dipantau, karena Pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru untuk cukai tembakau tahun 2018<sup>47</sup> yang berpotensi meningkatkan pemungutan penerimaan cukai tembakau, memperbaiki efisiensi pajak dan ekuitas horizontal, dan menurunkan biaya administrasi pengelolaan pajak.<sup>48</sup>

**APBN tahun 2018 terus memprioritaskan belanja sosial dan infrastruktur...**

APBN tahun 2018 secara luas mencerminkan kontinuitas dalam prioritas belanja Pemerintah. Total belanja ditetapkan meningkat sebesar 4,1 persen secara nominal dibandingkan dengan target dalam APBN-P tahun 2017 menjadi Rp 2.221 triliun atau 15,0 persen dari PDB. Meskipun terjadi penurunan belanja modal, yang 13 persen lebih rendah dari APBN-P tahun 2017, namun secara keseluruhan belanja infrastruktur tetap menjadi prioritas<sup>49</sup>. Pemerintah mengalokasikan Rp 410,7 triliun<sup>50</sup> atau 18,5 persen dari total pengeluaran untuk infrastruktur, meningkat 2,4 persen dari APBN-P tahun 2017. Belanja sosial juga dijaga, meningkat 7,4 persen<sup>51</sup> relatif terhadap APBN-P tahun 2017 (Gambar 39), sejalan dengan perluasan lebih lanjut dari PKH, dari 6 juta menjadi 10 juta rumah tangga. Ini adalah perkembangan positif mengingat para penerima PKH tampaknya memiliki akses kesehatan dan pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang bukan penerima.<sup>52</sup> Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga diperluas, dari 1,4 juta menjadi 15,6 juta rumah tangga.

**...namun tetap harus dilihat apakah reformasi subsidi lebih lanjut akan terjadi**

Untuk membalikkan penurunan tahunan yang terjadi sejak 2015, alokasi anggaran untuk subsidi energi (bbm, listrik, LPG 3kg) tahun 2018 meningkat sebesar 5,2 persen dibandingkan dengan APBN-P tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif listrik lebih lanjut tidak mungkin terjadi (Kotak 3), walaupun Pemerintah telah mengumumkan bahwa mereka akan mulai menargetkan subsidi LPG 3kg kepada rumah tangga miskin dan rentan di tahun 2018. Meskipun demikian, total alokasi subsidi turun sebesar 16,6 persen menjadi Rp 156,2 triliun pada APBN tahun 2018. Penurunan ini terutama disebabkan oleh reklasifikasi subsidi beras (Rastra) ke belanja sosial, yang mencerminkan adanya perubahan substantif dalam program ini dari subsidi harga beras untuk memberikan transfer manfaat langsung seperti kupon

<sup>46</sup> Di luar penerimaan dari program amnesti pajak, pajak penghasilan non-migas belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total pertumbuhan penerimaan dalam beberapa tahun terakhir. Kementerian Keuangan memprioritaskan upaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aliran penerimaan ini di tahun 2018. Jika berhasil, ini akan membantu memberikan kontribusi terhadap target pertumbuhan yang ditetapkan di dalam APBN tahun 2018.

<sup>47</sup> Peraturan Menteri Keuangan No. 146/PMK.010/2017.

<sup>48</sup> Kebijakan baru ini memberlakukan penyederhanaan penetapan jenis tembakau, kenaikan tarif cukai, dan menetapkan langkah-langkah yang memberlakukan ketentuan bahwa produsen menjual dengan harga pasar yang tidak kurang dari harga jual eceran (HJE) yang sudah diatur. Jika harga pasar naik sebagai tanggapan terhadap peraturan tersebut, maka konsumsi akan turun, sehingga membawa nilai positif terhadap kesehatan selama jangka menengah sampai panjang.

<sup>49</sup> Belanja modal dari Pemerintah Pusat hanyalah bagian dari total belanja infrastruktur karena juga mencakup belanja modal dari kementerian lini lainnya.

<sup>50</sup> Angka ini mengikuti definisi Pemerintah mengenai belanja infrastruktur, yang terdiri dari: belanja kementerian (Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat), yang ditransfer ke pemerintah daerah (Dana Alokasi Khusus, DAK), dan suntikan modal.

<sup>51</sup> Perhitungan ini tidak termasuk subsidi beras (Rastra), yang telah direklasifikasi dari subsidi non-energi ke belanja sosial pada tahun 2018 dengan mempertimbangkan modifikasi program (lihat catatan kaki di bawah).

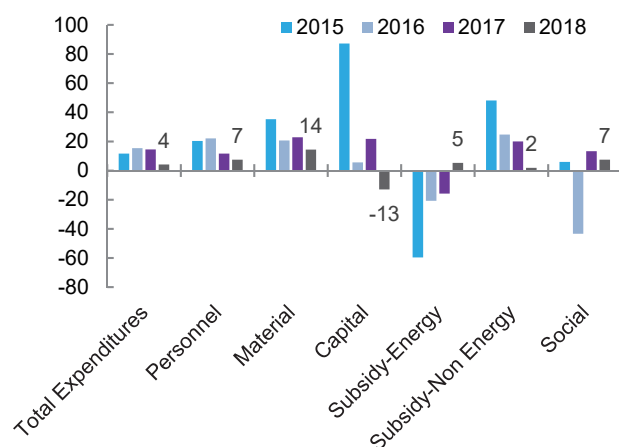
<sup>52</sup> Bank Dunia (2017c).



makanan elektronik<sup>53</sup>. Jika reklasifikasi ini tidak dilakukan, total alokasi subsidi akan meningkat sebesar 3,6 persen secara nominal dibandingkan dengan APBN-P tahun 2017 karena adanya pemotongan subsidi pupuk (9 persen) yang sebagian mengimbangi peningkatan tajam dalam program subsidi bunga pinjaman (38 persen) serta kenaikan subsidi energi yang disebutkan di atas.

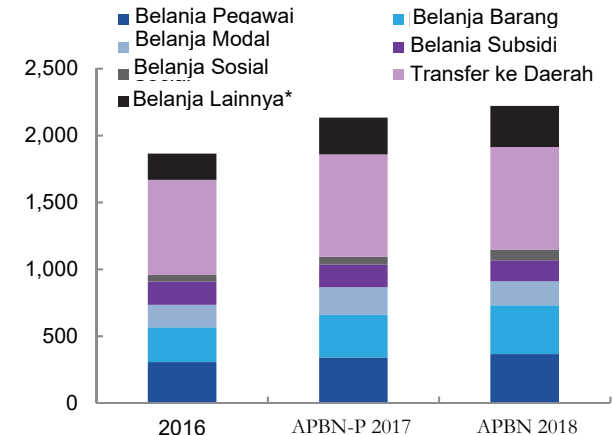
**Gambar 39: Subsidi energi sedikit meningkat pada APBN tahun 2018...**

(belanja aktual dibandingkan dengan target APBN-P, persen)



**Gambar 40: namun APBN tahun 2018 secara luas mencerminkan kelanjutan prioritas belanja Pemerintah.**

(Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan, perhitungan staf Bank Dunia  
Catatan: 2018 mengacu pada anggaran aktual dibandingkan target APBN-P tahun 2017.

Sumber: Kementerian Keuangan, perhitungan staf Bank Dunia  
Catatan: 'Lain-lain' mengacu pada pembayaran bunga dan hibah.

**Resiko terhadap perkiraan (*outlook*) tetap ada, mencerminkan adanya masalah struktural dan tantangan politik**

Bagian penerimaan yang signifikan pada tahun 2018 akan tetap berkorelasi erat dengan harga minyak, sehingga Pemerintah dapat berisiko dari fluktuasi harga minyak dunia. Tanpa menerapkan reformasi yang memperluas basis pajak dan melakukan pemungutan pajak pada basis yang sudah ada dengan lebih efisien dan merata, maka hal ini akan berbahaya bagi posisi fiskal jangka menengah Pemerintah. Di sisi pengeluaran, risiko fiskal berasal dari kerugian yang diderita oleh Pertamina jika harga bensin dan solar yang diatur tetap tidak berubah di tengah kenaikan harga bahan bakar global<sup>54</sup> (lihat Kotak 4), dan dari kewajiban kontinjensi yang terkait dengan pembiayaan proyek infrastruktur. Secara keseluruhan, mempertahankan momentum reformasi dalam administrasi pendapatan, kebijakan pajak, dan kualitas belanja, berpotensi akan lebih menantang mengingat pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden yang akan dilaksanakan di tahun 2018-2019.

<sup>53</sup> Pemerintah berencana untuk segera mengganti pemberian subsidi dalam bentuk natura, Rastra, dengan sistem pengiriman berbasis *e-voucher* yang lebih fleksibel dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan program Bantuan Pangan Non Tunai. Pada tahun 2018, subsidi beras akan dikonversi ke BPNT di 216 kabupaten. Lihat <https://news.detik.com/berita/d-3664100/bantuan-beras-dikonversi-ke-pangan-untuk-216-daerah-pada-2018>

<sup>54</sup> Pertamina telah meminta kenaikan harga BBM bersubsidi karena saat ini menanggung selisih antara harga pasar sebesar USD 60/barel dan harga yang diatur, yang belum berubah sejak April 2016 di saat harga minyak adalah sebesar USD 37/barel.

**Kotak 3: Mendorong dilaksanakannya reformasi subsidi bbm memerlukan adanya upaya untuk mengatasi 'subsidi yang tidak dicatatkan di dalam laporan keuangan (*off balance sheet*)'**

Setelah menerapkan reformasi subsidi bbm pada bulan Januari 2015, Pemerintah Indonesia menghentikan transfer anggaran untuk mensubsidi bensin Premium dengan nilai oktan penelitian (*research octane number - RON*) sebesar 88, dan beralih ke subsidi tetap sebesar Rp 1.000 per liter untuk solar, yang masih tertutup dengan anggaran<sup>1</sup>. Reformasi tersebut menghasilkan penurunan yang signifikan dalam pengeluaran subsidi bahan bakar, yang merubah pangsaanya dari 2,5 persen dari PDB di tahun 2014 menjadi 0,5 persen dari PDB di tahun 2015.

Mekanisme penetapan harga yang ditetapkan dalam reformasi tersebut mewajibkan harga eceran bensin dan diesel dalam negeri ditinjau setidaknya sebulan sekali<sup>2</sup> dan, jika perlu, disesuaikan dengan perubahan harga minyak dan nilai tukar global. Namun demikian, walaupun harga minyak dunia (misalnya minyak mentah Brent) naik 45 persen antara April 2016 dan November 2017, dan nilai Rupiah terdepresiasi 2,6 persen dari periode yang sama, harga eceran RON 88 dalam negeri belum berubah sejak April 2016. Selanjutnya, di bulan Oktober 2017 pemerintah mengumumkan niatnya bahwa harga eceran untuk bensin dan solar tidak disesuaikan sampai dengan tahun 2018<sup>3</sup>. Dengan demikian, harga bahan bakar eceran yang diatur untuk RON 88 telah menyimpang dari perkiraan harga pasarnya<sup>4</sup>, yang menunjuk adanya subsidi secara implisit yang diberikan kepada konsumen (Gambar 41).

Karena pemerintah tidak lagi memberikan anggaran subsidi untuk bensin, kenaikan biaya RON 88 harus ditanggung baik oleh konsumen melalui harga yang lebih tinggi maupun melalui subsidi secara implisit yang lebih tinggi, dan oleh karena itu yang menderita kerugian adalah Pertamina – perusahaan minyak dan gas bumi milik negara Indonesia yang ditugasi untuk menyediakan dan mendistribusikan bensin.

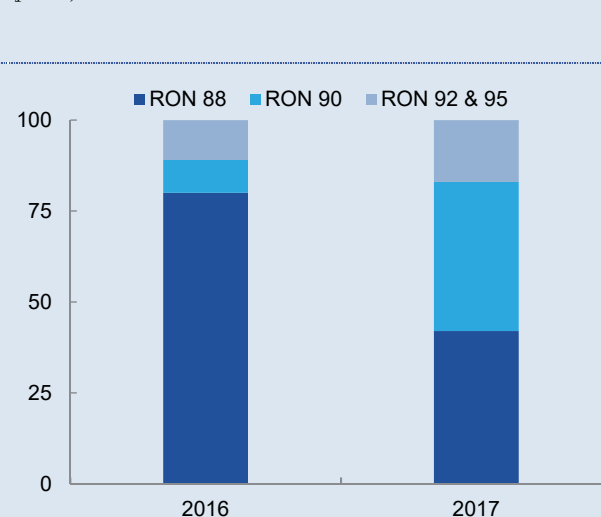
Selanjutnya, dengan tujuan untuk mengurangi disparitas harga BBM di daerah-daerah terpencil di Indonesia, Pemerintah menerapkan kebijakan harga BBM tunggal pada bulan Oktober 2016<sup>6</sup>, yang, sementara dipuji karena masalah ekuitasnya, merupakan langkah yang menjauh dari harga bahan bakar berbasis pasar. Pertamina mengindikasikan bahwa akan dibutuhkan sekitar Rp 2 - 3 triliun setiap tahunnya untuk menjaga agar harga bensin dalam negeri stabil di seluruh Indonesia<sup>7</sup>.

**Gambar 41: Harga eceran Premium RON88 belum disesuaikan sejak bulan April 2016**

(harga eceran bensin RON 88 yang diatur harganya dan perkiraan pasar, Rp per liter; harga minyak (ICP) USD/ barrel – Kanan)



**Gambar 42: Bauran penjualan bensin Pertamina (persen)**



**Catatan:**

Gambar x: Rumus harga yang digunakan untuk memperkirakan harga eceran pasar untuk bensin RON f88 di Indonesia ditetapkan di <http://jdih.esdm.go.id/peraturan/Kepmen-esdm-2856-2015.pdf>. Rumus tersebut mencakup pajak pertambahan nilai sebesar 10 persen dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5 persen. Karena bensin RON 88 tidak dijual di kebanyakan negara dan harga spot-nya tidak tersedia, potongan harga sebesar 1,6 persen diterapkan pada harga spot bensin dengan nilai oktan terendah yang dijual di Singapura (RON92) untuk perkiraan. 'Selisih' menunjukkan selisih antara perkiraan harga pasar dan harga yang diatur.

**Sumber:**

Gambar 41: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Keuangan; CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 42: Perkiraan dilakukan dengan menggunakan siaran pers Pertamina <http://www.pertamina.com/news-room/siaran-pers/konsumsi-bbm-berkualitas-tinggi-makin-meningkat/>; Perhitungan staf Bank Dunia

Di sisi lain, Pertamina telah berhasil mendorong peralihan bensin dengan nilai RON yang lebih tinggi di SPBU, sebagian dengan mengurangi ketersediaan bensin RON 88<sup>8</sup>. Strategi ini terbukti efektif dalam membatasi penjualan bensin RON

88, dengan pangsa dalam bauran penjualannya yang turun dari 80 persen di tahun 2016 menjadi sekitar 40 persen di tahun 2017; Sementara itu, pangsa bensin RON90, yang saat ini dijual sekitar 15 persen lebih banyak dari bensin RON 88, meningkat dari 9 menjadi 41 persen (Gambar 42).

Diperkirakan Pertamina telah merugi sebesar Rp 18,9 triliun dari bulan Januari hingga September tahun ini<sup>5</sup>. Kerugian diperkirakan akan meningkat jika harga minyak dunia naik lebih jauh tanpa adanya penyesuaian harga BBM. Hal ini dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan milik negara ini dan oleh karena itu mempengaruhi kemampuannya untuk menjalankan mandat pemerintah lainnya seperti meningkatkan produksi minyak dalam negeri<sup>9</sup>. Untuk mengamankan posisi keuangan Pertamina dan, secara lebih luas, dividen jangka panjang dari reformasi harga BBM di bulan Januari 2015, penting bagi Pemerintah untuk terus menyesuaikan harga BBM yang mencerminkan harga global. Oleh karena harga minyak yang lebih tinggi juga membantu meningkatkan penerimaan pemerintah, rumah tangga miskin dan rentan dapat didukung dengan lebih baik melalui pengeluaran yang lebih banyak untuk program bantuan sosial yang ditargetkan.

<sup>1</sup> Subsidi per liter untuk solar kemudian diturunkan menjadi Rp 500 per liter pada bulan Juli 2016.

<sup>2</sup> Di awal 2016, frekuensi peninjauan dan penyesuaian harga eceran telah diubah setiap tiga bulan sekali. Untuk pembahasan lebih rinci, lihat Bank Dunia (2015a) dan Bank Dunia (2015b).

<sup>3</sup> Menteri Keuangan mengumumkan bahwa harga BBM tidak akan naik setidaknya sampai tahun 2018 - lihat <https://tirto.id/sri-mulyani-harga-bbm-dan-tarif-listrik-tak-naik-pada-2018-cu2E>

<sup>4</sup> Harga bahan bakar eceran berbasis pasar untuk bensin RON 88 harus diperkirakan karena tidak teramati.

<sup>5</sup> <https://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL3N1O52C0>

<sup>6</sup> Pertamina meluncurkan program ini secara bertahap dan bertujuan untuk setidaknya mencakup 54 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2017 dan mencapai 150 pada tahun 2019. Kebijakan harga bahan bakar tunggal ini hanya berlaku untuk bensin RON 88. Harga eceran untuk bensin RON 90, 92 dan 95 tidak diatur dan juga dikecualikan dari kebijakan harga bahan bakar tunggal ini.

<sup>7</sup> <http://www.thejakartapost.com/news/2017/11/17/pertamina-says-fuel-prices-need-to-be-increased.html>

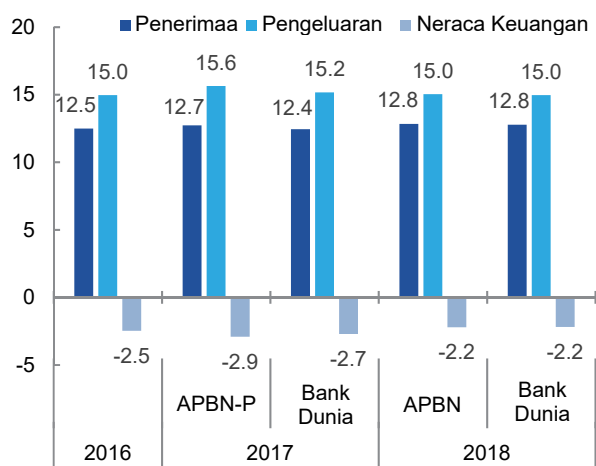
<sup>8</sup> Dalam dengar pendapat di DPR pada bulan Juli 2017, BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang bertanggung jawab atas pengawasan distribusi BBM dan transportasi gas melalui jalur pipa gas) menyatakan bahwa sebanyak 1.094 dari 5.480 SPBU yang beroperasi di Pertamina tidak menjual Premium.

<sup>9</sup> APBN tahun 2016 yang diaudit menunjukkan adanya tunggakan sebesar Rp 22,4 triliun untuk subsidi minyak tanah, solar dan elpiji. (<https://www.kemenkeu.go.id/media/5998/lkpp-2016.pdf> page 160)

### Bank Dunia memproyeksikan defisit fiskal sebesar 2,2 persen dari PDB pada tahun 2018

Sejalan dengan perkiraan/peramalan ekonomi makro yang lebih tinggi untuk tahun 2018 dan reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan yang sedang berlangsung, Bank Dunia memproyeksikan defisit fiskal sebesar 2,2 persen dari PDB, sama dengan target APBN tahun 2018 (Gambar 43), (Tabel 4). Total penerimaan diproyeksikan mencapai Rp 1.886 triliun, 12,5 persen lebih tinggi dari proyeksi Bank Dunia untuk tahun 2017 yang tidak termasuk penerimaan dari

**Gambar 43: Bank Dunia memproyeksikan penerimaan yang sedikit menurun dan defisit fiskal yang lebih tinggi dibandingkan dengan APBN tahun 2018**  
(persen dari PDB)



Sumber: Kementerian Keuangan; Bank Dunia dan perhitungan staf termasuk penerimaan dari program Amnesti Pajak<sup>55</sup>. Dari sisi pengeluaran, total

<sup>55</sup> Proyeksi total penerimaan Bank Dunia hanya 0,5 persen lebih rendah dari APBN tahun 2018, namun sangat bergantung pada penerimaan terkait komoditas menurut komposisinya. Ini karena asumsi Bank Dunia untuk harga minyak di tahun 2018 (USD 58/barel) melebihi perkiraan APBN (USD 48/barel). Sebaliknya, APBN tahun 2018 memiliki target penerimaan yang lebih tinggi dibandingkan proyeksi Bank Dunia untuk penerimaan non-komoditas. Misalnya, pemungutan PPN 4,4 persen lebih tinggi.

belanja diproyeksikan mencapai Rp 2.210 triliun, hanya 0,5 persen lebih rendah dari target APBN tahun 2018. Dekatnya proyeksi pengeluaran Bank Dunia terhadap APBN ini bukan karena asumsi tingkat pencairan 100 persen, namun karena ekspektasi harga minyak yang lebih tinggi, yang membantu penerimaan mendekati perkiraan anggaran namun juga memberikan dorongan terhadap pengeluaran<sup>56</sup>.

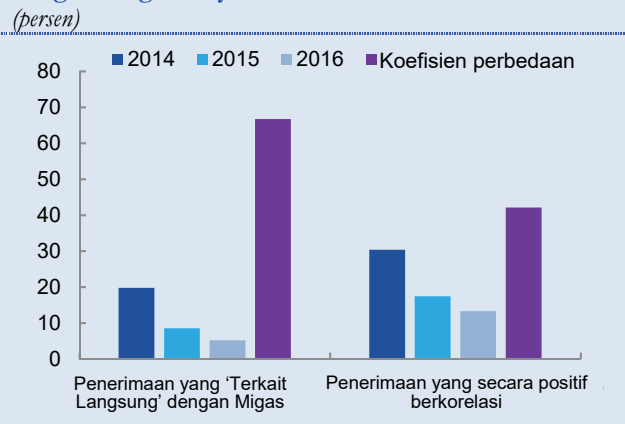
**Kotak 4: Seberapa besar harga minyak mempengaruhi penerimaan fiskal Indonesia?**

Ketika menganalisis sejauh mana penerimaan fiskal Indonesia terkait dengan harga minyak mentah, para analis seringkali hanya mengumpulkan penerimaan yang dipungut dari PPh minyak dan gas (migas) dan dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) migas, atau yang disebut penerimaan yang secara langsung terkait dengan harga minyak mentah. Pendekatan secara ‘sempit’ ini tidak lengkap, karena tidak mempertimbangkan aliran penerimaan lain yang, meskipun tidak terkait langsung, namun berkorelasi dengan tingkat yang signifikan dengan harga minyak. Tabel 3 mencantumkan item yang berkorelasi tersebut. Item penerimaan yang berkorelasi positif dapat dibagi menjadi dua kategori sesuai dengan seberapa kuat korelasi antara harga minyak: bea ekspor sangat berkorelasi, sementara PNBP migas, PPh migas dan PPN impor hanyalah kecil saja<sup>1</sup>. Menggunakan pendekatan yang ‘lebih luas’ bisa mendapatkan hasil yang berbeda secara signifikan. Pada tahun 2016, misalnya, penerimaan yang berkorelasi positif menyumbang bagian dari total penerimaan yang 156,7 persen lebih besar dibandingkan dengan definisi penerimaan langsung yang ‘sempit’ (Gambar 44).

**Tabel 3: Aliran penerimaan yang berkorelasi dengan harga minyak**

Penerimaan yang secara positif berkorelasi	
Aliran penerimaan	Kuatnya korelasi
Bea ekspor	Kuat
PNBP Migas	Sedang
PPh Migas	Sedang
PPN impor	Sedang

**Gambar 44: Pangsa total penerimaan yang berkorelasi dengan harga minyak**



Sumber: Data penerimaan dari Kementerian Keuangan dan harga minyak dari Bank Dunia; analisis oleh staf Bank Dunia

Catatan:

Migas adalah singkatan dari minyak dan gas bumi; PNBP adalah singkatan dari penerimaan negara bukan pajak. Kekuatan korelasi adalah sebagaimana didefinisikan dalam catatan kaki (1).

‘Penerimaan yang Terkait Langsung dengan Migas’ dihitung sebagai jumlah PPh Migas dan penerimaan negara bukan pajak Migas. ‘Penerimaan yang berkorelasi positif dengan harga minyak’ adalah empat item yang tercantum dalam ‘Penerimaan yang berkorelasi positif’.

Koefisien perbedaan adalah ukuran dari dispersi statistik titik data di sekitar mean (nilai rata-rata) dan didefinisikan sebagai deviasi standar dibagi dengan mean, dan dihitung dengan menggunakan data bulanan untuk tahun-tahun yang terpilih 2014-2016.

Manfaat lain dengan mengadopsi definisi penerimaan terkait Migas yang lebih luas adalah bahwa koefisien perbedaan yang terkait, suatu ukuran volatilitas, lebih rendah untuk bagian penerimaan yang berkorelasi positif dengan harga minyak dibandingkan dengan definisi yang sempit<sup>3</sup>. Varians yang lebih rendah ini membuat peramalan penerimaan masa depan dengan menggunakan pendekatan yang lebih luas lebih dapat diandalkan.

Analisis awal menunjukkan bahwa kenaikan harga minyak sebesar 1 persen dikaitkan dengan sekitar 1 persen peningkatan penerimaan yang berkorelasi positif, dengan hal-hal lainnya tetap sama (*ceteris paribus*). Misalnya, ini menyiratkan bahwa pada tahun 2016, kenaikan harga minyak sebesar 1 persen dikaitkan dengan sekitar 0,013 persen kenaikan total penerimaan, *ceteris paribus*.

<sup>56</sup> Jika harga yang lebih tinggi terwujud, transfer bagi hasil ke daerah akan meningkat, dan kemungkinan besar belanja sosial juga akan meningkat untuk membantu meringankan beban pada rumah tangga berpenghasilan rendah.

<sup>1</sup> Kekuatan tingkat korelasi positif didefinisikan sebagai berikut: 'kuat' mengacu pada koefisien korelasi yang lebih tinggi dari 0,6; 'Sedang' mengacu pada koefisien korelasi yang lebih tinggi dari 0,4, namun lebih rendah dari 0,6. Korelasi dihitung dengan menggunakan data set penerimaan bulanan dari Januari 2010 sampai April 2017.

**Tabel 4: Bank Dunia memproyeksikan defisit sebesar 2,2% untuk tahun 2018, sama dengan APBN**

(Rp triliun, kecuali dinyatakan lain)

	2016 Aktual Audit	2017 APBN	2017 APBN-P	2017 Perkiraan Kemenkeu	2017 Bank Dunia	2018 APBN	2018 Bank Dunia
<b>A. Penerimaan</b>	<b>1.556</b>	<b>1.750</b>	<b>1.736</b>	<b>1.736</b>	<b>1.677</b>	<b>1.895</b>	<b>1.886</b>
(% dari PDB)	12,5	12,5	12,8	12,8	12,3	12,8	12,8
<b>1. Penerimaan pajak</b>	<b>1.285</b>	<b>1.499</b>	<b>1.473</b>	<b>1.473</b>	<b>1.421</b>	<b>1.618</b>	<b>1.576</b>
(% dari PDB)	10,4	10,9	10,8	10,8	10,5	10,9	10,7
PPH	666	788	784	784	742	855	823
Migas	36	36	42	42	41	38	43
Non Migas	630	752	742	742	701	817	780
PPN / PPNBM	412	494	475	475	462	542	518
PBB	19	17	15	15	15	17	16
Cukai	144	157	153	153	153	155	167
Pajak perdagangan internasional	35	34	36	36	40	39	42
Bea masuk	32	34	33	33	37	36	39
Bea ekspor	3	0	3	3	3	3	3
Pajak lainnya	8	9	9	9	9	10	10
<b>2. Penerimaan negara bukan pajak</b>	<b>262</b>	<b>250</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>253</b>	<b>275</b>	<b>309</b>
(% dari PDB)	2,1	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	2,1
Penerimaan sumber daya alam	65	87	96	96	92	104	134
Migas	44	64	72	72	69	80	109
Non Migas	21	23	23	23	23	23	25
Penerimaan negara bukan pajak lainnya	197	163	165	165	161	172	175
<b>3. Hibah</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>B. Pengeluaran</b>	<b>1.860</b>	<b>2.080</b>	<b>2.133</b>	<b>2.099</b>	<b>2.044</b>	<b>2.221</b>	<b>2.210</b>
(% dari PDB)	15,0	15,2	15,7	15,4	15,0	15,0	15,0
<b>1. Pemerintah pusat</b>	<b>1.149</b>	<b>1.316</b>	<b>1.367</b>	<b>1.343</b>	<b>1.296</b>	<b>1.454</b>	<b>1.432</b>
(% dari PDB)	9,3	9,6	10,0	9,9	9,5	9,8	9,8
Pegawai	305	345	340	331	331	366	364
Barang	260	270	319	302	302	365	350
Modal	169	221	206	203	204	179	174
Pembayaran bunga pinjaman	183	221	219	219	220	239	249
Subsidi	174	160	169	169	159	156	166
Energi	107	77	90	90	85	95	105
BBM	44	32	44	44	21	47	52
Listrik	63	45	45	45	64	48	53
Non-energi	67	83	79	79	75	62	62
Hibah	7	2	6	6	8	1	1
Sosial	50	56	58	58	54	81	86
Lainnya	6	41	50	56	18	67	42
<b>2. Transfer ke daerah</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>766</b>	<b>756</b>	<b>748</b>	<b>766</b>	<b>778</b>
(% dari PDB)	5,7	5,5	5,6	5,6	5,5	5,2	5,3
<b>Saldo Keseluruhan</b>	<b>-308</b>	<b>-308</b>	<b>-397</b>	<b>-363</b>	<b>-367</b>	<b>-326</b>	<b>-324</b>
(% dari PDB)	<b>-2,5</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,9</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>
<i>Asumsi</i>							
Tingkat pertumbuhan PDB riil (%)	5,0	5,1	5,2	5,2	5,1	5,4	5,3
IHK (%)	3,5	4,0	4,3	4,3	3,8	3,5	3,5
Nilai tukar (Rp/USD)	13.300	13.300	13.400	13.400	13.587	13.400	13.500
Harga minyak mentah (USD/barel)	51	45	48	48	53	48	58

Sumber: Kementerian Keuangan

## 8. Perkiraan ekonomi membaik namun risiko tetap ada

**Perkiraan ekonomi Indonesia positif dengan perekonomian global yang mendukung dan membaiknya kondisi dalam negeri**

Perkiraan ekonomi Indonesia terus membaik seiring kondisi lingkungan eksternal yang kondusif dan kondisi dalam negeri yang menjadi lebih positif. Di tengah menguatnya pertumbuhan ekonomi global, pulihnya perdagangan internasional dengan lebih banyak kegiatan investasi dan manufaktur, dan masih relatif akomodatifnya kondisi moneter dan keuangan, perekonomian global terus menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada saat yang sama, kondisi dalam negeri juga membaik karena kelesuan yang teramati di Triwulan ke-2 tampaknya mulai menghilang, bersamaan dengan stabilitas ekonomi makro yang terus berlanjut, tingkat suku bunga yang rendah, dan berlanjutnya komitmen pemerintah terhadap reformasi struktural yang meningkatkan pertumbuhan.

**Pertumbuhan PDB riil diproyeksikan menguat menjadi 5,3 persen pada tahun 2018 dengan konsumsi masyarakat yang lebih kuat**

Didukung oleh konsumsi masyarakat, investasi dan ekspor yang lebih kuat, pertumbuhan PDB riil diperkirakan mencapai 5,1 persen di tahun 2017 dan menguat lebih lanjut menjadi 5,3 persen di tahun 2018 (Tabel 5). Meskipun diperkirakan akan tetap stabil tahun ini, konsumsi masyarakat diproyeksikan akan menguat di tahun depan di tengah tanda-tanda menguatnya perekonomian, peningkatan lapangan kerja dan upah yang tinggi<sup>57</sup>, menurunnya inflasi dan menurunnya biaya pinjaman.

**Tabel 5: Indikator ekonomi utama***(pertumbuhan yoy, persen, kecuali dinyatakan lain)*

	Tahunan			Revisi dari IEQ sebelumnya
	2016	2017e	2018f	2017
<b>1. Indikator ekonomi yang utama</b>				
<b>Produk Domestik Bruto (PDB)</b>	<b>5,0</b>	<b>5,1</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>
Belanja konsumsi masyarakat	5,0	5,0	5,1	0,0
Konsumsi pemerintah	-0,1	2,5	3,5	-1,0
Pembentukan modal tetap bruto	4,5	5,9	6,1	0,9
Ekspor barang dan jasa	-1,7	10,0	6,0	5,0
Impor barang dan jasa	-2,3	7,5	5,6	4,3
<b>2. Indikator ekonomi lainnya</b>				
Indeks harga konsumen	3,5	3,8	3,5	-0,2
Deflator PDB	2,5	4,2	3,2	0,3
<b>3. Asumsi Ekonomi</b>				
Nilai tukar (Rp/USD)	13.300	13.587	13.500	254
Harga minyak mentah Indonesia (USD/bl)	51	51	56	1

Sumber: BPS; BI; CEIC; Proyeksi staf Bank Dunia

Catatan: Angka di tahun 2016 adalah hasil aktual. E dan P singkatan dari estimasi dan perkiraan/peramalan. Perbedaan statistik dan perubahan persediaan tidak disajikan di dalam tabel ini. Semua komponen PDB didasarkan pada data PDB terakhir. Asumsi nilai tukar dan asumsi harga minyak mentah adalah data tahunan rata-rata. Revisi bersifat relatif terhadap proyeksi di IEQ edisi Maret 2017.

**Investasi juga diproyeksikan akan meningkat, sementara ekspor akan melonjak,**

Pertumbuhan investasi diperkirakan akan meningkat pada tahun ini karena membaiknya nilai tukar perdagangan dan pulihnya investasi di sektor pertambangan. Hal ini diperkirakan akan meningkat secara moderat di tahun 2018, mengingat biaya pendanaan yang lebih rendah karena kondisi moneter global dan dalam negeri yang akomodatif dan harga komoditas yang stabil jika tidak meningkat. Aliran investasi asing langsung dan belanja modal publik yang tinggi, terutama pada tahun 2017,

<sup>57</sup> Lihat Bank Dunia (2017c).

**mengangkat pertumbuhan PDB**

diperkirakan akan menopang pengeluaran investasi oleh sektor swasta. Setelah mengalami kontraksi selama dua tahun terakhir, ekspor diperkirakan akan melonjak pada tahun 2017, didorong oleh perekonomian global yang kuat, pulihnya perdagangan internasional, dan daya saing yang meningkat oleh karena nilai Rupiah yang sedikit terdepresiasi. Pertumbuhan ekspor diperkirakan akan menurun pada 2018, sejalan dengan proyeksi harga komoditas yang lebih rendah dan basis yang lebih tinggi.

**APBN tahun 2018 menegaskan kembali komitmen negara terhadap tanggung jawab fiskal**

APBN tahun 2018 menetapkan target penerimaan pajak yang sulit namun realistis untuk aliran penerimaan terkait non-komoditas, dan secara luas mencerminkan berlanjutnya prioritas Pemerintah mengenai belanja sosial dan infrastruktur. Target defisit fiskal dalam APBN tahun 2018 sebesar 2,2 persen dari PDB yang lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya, memberikan peningkatan ruang fiskal dalam jangka pendek. Sejalan dengan perkiraan ekonomi makro yang lebih kuat untuk tahun 2018 dan reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan yang sedang berlangsung, Bank Dunia juga memproyeksikan defisit fiskal sebesar 2,2 persen dari PDB, sama seperti target APBN tahun 2018.

**Defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan akan sedikit melebar di tahun 2018, seiring dengan turunnya tingkat perdagangan dan pertumbuhan investasi**

Di tengah menguatnya harga komoditas dan menguatnya guncangan nilai tukar perdagangan yang positif, dan meningkatnya permintaan ekspor Indonesia sejalan dengan ekonomi global yang kuat dan menguatnya arus perdagangan, defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan akan menyempit menjadi 1,6 persen dari PDB di tahun 2017. Seiring menurunnya nilai tukar perdagangan di tahun 2018 sementara investasi tetap kuat, neraca transaksi berjalan diperkirakan akan melebar menjadi 1,8 persen dari PDB.

**Resiko terhadap perkiraan/peramalan perekonomian mencakup risiko pertumbuhan konsumsi masyarakat yang lebih lambat...**

Risiko terhadap perkiraan perekonomian condong ke sisi negatifnya. Sementara ada tanda-tanda peningkatan (*green shoots*) dalam konsumsi masyarakat, hal tersebut tetaplah tentatif saat ini. Mengingat konsumsi tersebut memiliki pangsa yang signifikan dari PDB, perlambatan apapun akan memiliki dampak yang kuat terhadap total pengeluaran.

**...dan risiko eksternal termasuk gejolak keuangan global**

Oleh karena Bank Sentral AS melanjutkan normalisasi kebijakan moneter yang baik dalam hal meningkatkan tingkat suku bunga *Federal Funds* dan mengurangi neracanya, pengetatan yang lebih cepat dari perkiraan dapat memicu gejolak di pasar keuangan. Gejolak tersebut dapat mengakibatkan arus modal keluar yang tiba-tiba dari negara-negara pasar berkembang termasuk Indonesia, yang memicu kenaikan tajam biaya pinjaman dan volatilitas, yang akan menghambat investasi.

**...dan gejolak dalam harga komoditas...**

Sementara perekonomian Indonesia telah mengalami beberapa diversifikasi ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, kinerja perekonomian masih terkait erat dengan komoditas. Dengan demikian, penurunan harga komoditas yang lebih tajam dari yang diperkirakan, seperti batubara, secara signifikan dapat melemahkan nilai tukar perdagangan negara dan memberi tekanan eksternal terhadap neraca pembayaran eksternal (*external balances*) serta penerimaan pemerintah, dan menghambat pertumbuhan. Di sisi lain, terjadinya peningkatan tajam dalam penerimaan dari minyak, sementara hal tersebut adalah positif bagi penerimaan Pemerintah, akan

menciptakan tekanan pada neraca Pertamina, atau pada inflasi dan oleh karenanya memberi tekanan pada konsumsi.

**...dan risiko politik**

Meskipun Indonesia adalah negara demokrasi yang dinamis yang telah berhasil menyelenggarakan berbagai pemilihan umum, musim pemilu mendatang ini membawa risiko volatilitas yang sporadis, sekaligus meredam momentum reformasi.



## B. Topik Fokus



### Membuat Desentralisasi Demokratis Menghasilkan Peningkatan Layanan Publik di Daerah: Peran Pemerintah Pusat

Indonesia telah mengalami desentralisasi yang signifikan dalam 15 tahun terakhir. Undang-undang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan tahun 1999 memberikan kewenangan secara politik dan ekonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan menangani kebutuhan warganya. Transfer ke pemerintah daerah, terutama kabupaten, melonjak dan saat ini lebih dari separuh (53 persen) pengeluaran publik di Indonesia dilakukan di tingkat daerah. Desentralisasi meningkatkan peluang bagi terciptanya solusi lokal untuk masalah lokal, akuntabilitas para pimpinan daerah terhadap warga, dan masuknya peranan para politisi dari luar lingkaran yang biasanya. Tidak mengherankan jika proses desentralisasi akan menghasilkan beragam hasil dalam hal layanan publik di daerah. Artikel ini membahas perkembangan akses terhadap pemberian layanan daerah setelah desentralisasi, berdasarkan tiga pertanyaan utama: (i) apa yang terjadi dengan pemberian layanan daerah selama berlangsungnya desentralisasi? (ii) bagaimana kita dapat membuat perbedaan yang signifikan (*move the needle*) pada kinerja pemerintah daerah? (iii) mekanisme desain seperti apa yang dapat memberi insentif kepada para pimpinan daerah dan pemerintah daerah untuk memperbaiki penyampaian layanan publik di daerah? Tiga rekomendasi kebijakan utama untuk membantu menyelaraskan insentif guna meningkatkan kinerja layanan oleh para pimpinan daerah dan pejabat publik: i) menerapkan praktik yang baik dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, ii) menanamkan orientasi hasil ke dalam sistem transfer fiskal antar pemerintahan, dan iii) memanfaatkan data kinerja pemerintah daerah yang transparan dan komparatif untuk merangsang keterlibatan warga.

#### a. Apa yang terjadi dengan pemberian layanan daerah selama proses desentralisasi?

**Sekitar setengah belanja publik di Indonesia**

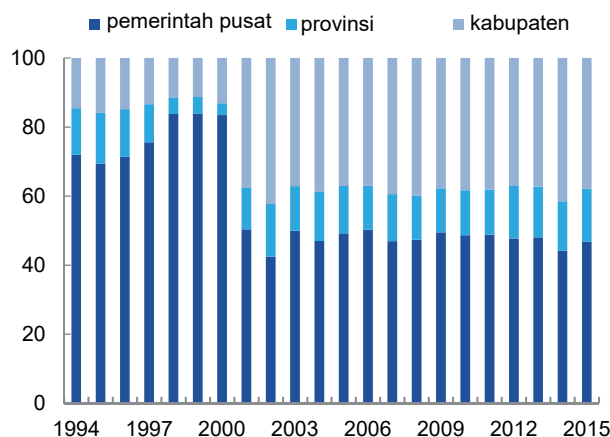
Sekitar 53 persen dari total pengeluaran pemerintah (tidak termasuk subsidi dan pembayaran bunga pinjaman) saat ini dilakukan oleh pemerintah daerah, dengan pemerintah kabupaten yang mengelola sekitar 38 persen, dan 15 persen sisanya oleh provinsi (Gambar 45).<sup>58</sup> Provinsi dan kabupaten hanya menyumbang 16 persen dari

<sup>58</sup> Provinsi adalah tingkat pemerintah yang kedua di Indonesia, sedangkan kabupaten adalah tingkat pemerintah yang ketiga.

dibelanjakan oleh pemerintah daerah

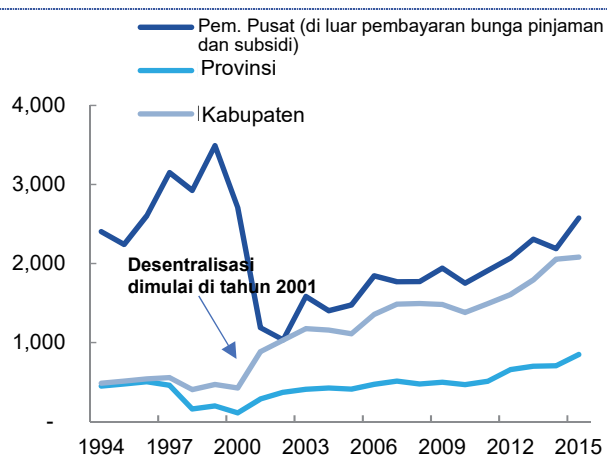
pengeluaran pemerintah pada tahun 2000. Pergeseran ini sejalan dengan pergeseran tanggung jawab utama ke pemerintah daerah untuk penyampaian layanan dasar, yang meliputi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Secara riil per kapita, jumlah pengeluaran pemerintah daerah meningkat dua kali lipat sejak awal desentralisasi pada tahun 2001 (Gambar 46). Peran para pimpinan daerah dan fungsi birokrasi daerah menjadi lebih penting dalam pemberian layanan. Setelah 16 tahun desentralisasi, mungkin sudah saatnya mengajukan pertanyaan tentang bagaimana penyampaian layanan daerah telah berevolusi setelah desentralisasi, dan apakah kesenjangan antar daerah dalam akses terhadap pemberian layanan daerah telah meningkat atau menurun?

**Gambar 45: Porsi belanja pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam pengeluaran pemerintah (tidak termasuk subsidi dan pembayaran bunga), 1994-2015 (persen)**



Sumber: Data APBN dan SIKD, perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 46: Belanja riil per kapita pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, 1994-2015 (Ribuan Rupiah)**

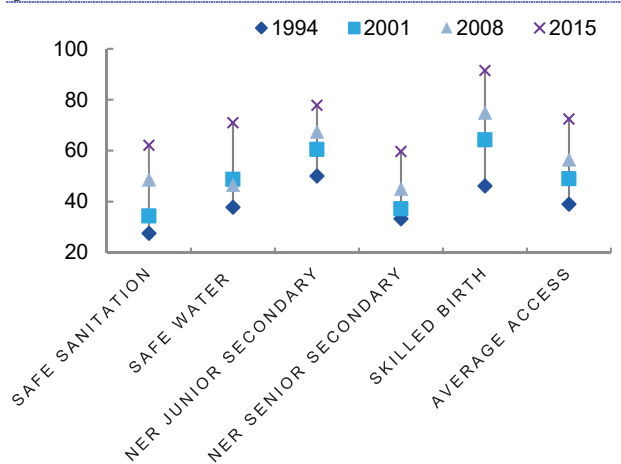


Sumber: Data APBN dan SIKD, perhitungan staf Bank Dunia

Akses terhadap layanan dasar telah meningkat, namun kurang proporsional dengan peningkatan belanja pemerintah daerah

Untuk memeriksa peningkatan dalam pemberian layanan daerah, digunakan lima indikator yang mencerminkan akses terhadap layanan dasar yang disediakan secara lokal: (i) angka partisipasi murni untuk Sekolah Menengah Pertama; (ii) angka partisipasi murni untuk Sekolah Menengah Atas; (iii) akses terhadap air yang terlindung; (iv) akses terhadap sarana sanitasi yang terlindung; dan (v) proporsi kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan yang terampil. Nilai rata-rata kelima indikator ini digunakan untuk menghasilkan ukuran akses sederhana secara agregat

**Gambar 47: Indikator nasional untuk layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah telah meningkat sejak tahun 1994 (persen)**



Sumber: Data BPS, perhitungan staf Bank Dunia

terhadap layanan dasar. Selanjutnya, ukuran ini disebut sebagai *akses rata-rata terhadap layanan dasar*.<sup>59</sup> Sejalan dengan meningkatnya belanja oleh pemerintah daerah selama lima belas tahun terakhir ini, indikator-indikator ini di tingkat nasional telah meningkat (Gambar 47). Namun demikian, besarnya perluasan akses terhadap layanan daerah lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan belanja daerah per kapita: belanja pemerintah daerah per kapita meningkat 2,5 kali, sementara peningkatan rata-rata akses terhadap layanan dasar hanya 1,5 kali.

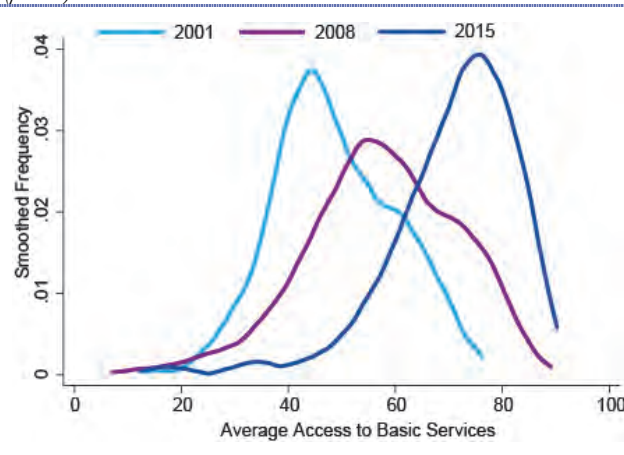
### Disparitas antar kabupaten dalam akses terhadap layanan dasar telah menurun

Salah satu risiko utama desentralisasi adalah bahwa desentralisasi dapat meningkatkan disparitas daerah, terutama bila ada perbedaan yang signifikan dalam kapasitas kabupaten untuk memberikan layanan. Gambar 48 menampilkan kurva distribusi untuk akses rata-rata terhadap layanan dasar. Secara keseluruhan, terdapat peningkatan akses selama ini. Selain itu, perbedaan antar kabupaten menurun untuk semua indikator

akses yang diukur dengan koefisien variasi yang menurun. *Rata-rata akses terhadap layanan dasar meningkat* dari 48,8 persen pada tahun 2001 menjadi 70,9 persen pada tahun 2015, sementara koefisien variasinya menurun dari 0,23 menjadi 0,17<sup>60</sup>. Peningkatan akses rata-rata dan penurunan disparitas juga tercermin pada masing-masing dari lima indikator yang mendasarinya. Di tahun 2001, rata-rata kurang dari 40 persen siswa terdaftar di sekolah menengah atas, namun meningkat menjadi 60 persen di tahun 2015. Oleh karena itu, rata-rata warga saat ini memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan dasar dibandingkan dengan di awal desentralisasi, dan perbaikan ini tampaknya telah terjadi di setiap persentil distrik, kecuali beberapa kabupaten tertinggal yang berada di sebelah kiri kurva distribusi (Gambar 48). Jika dilihat dari akses di masing-masing layanan, penurunan variasi akses yang paling menonjol terdapat pada angka partisipasi sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, dan variasinya lebih kecil dalam tiga indikator lainnya (Gambar 49).

**Gambar 48: Kurva distribusi akses rata-rata kabupaten terhadap layanan dasar, 2001, 2008, dan 2015**

(persen)



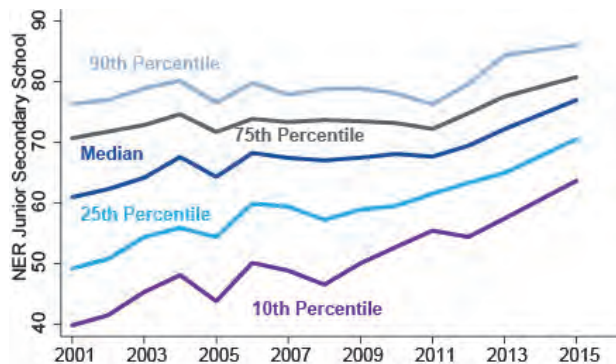
Sumber: Data Susenas, perhitungan staf Bank Dunia.

<sup>59</sup> Nilai rata-rata 100 berarti bahwa semua rumah tangga di kabupaten yang bersangkutan memiliki akses terhadap air dan sanitasi yang terlindung, semua kelahiran dibantu oleh pekerja kesehatan terampil, dan semua orang di kelompok usia yang relevan terdaftar di sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas; nilai 0 berarti bahwa tidak ada rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih atau sanitasi yang terlindung, tidak ada kelahiran yang dibantu oleh pekerja kesehatan terampil, dan tidak ada anak di kelompok usia yang relevan yang terdaftar di sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas.

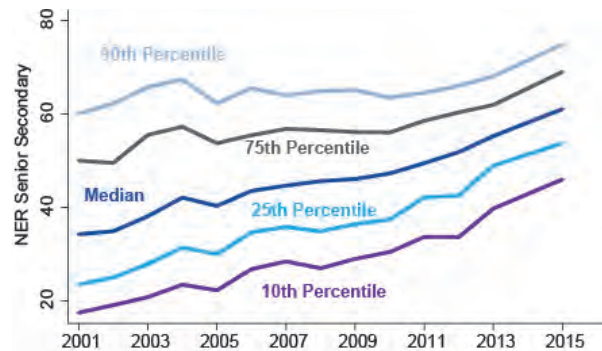
<sup>60</sup> Peningkatan dalam koefisien variasi menyiratkan bahwa data yang mendasari lebih tersebar, sehingga lebih bervariasi.

Gambar 49: Akses ke 5 layanan dasar menurut desil, 2001, 2008 dan 2015  
(persen)

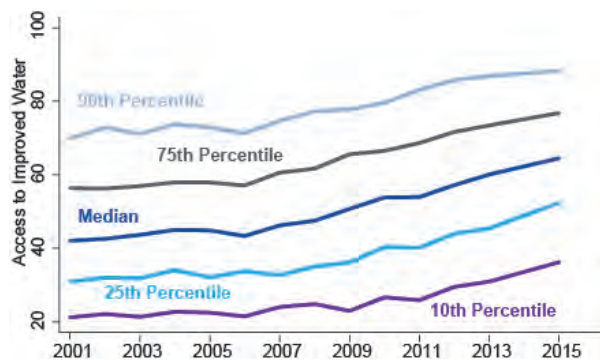
Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama



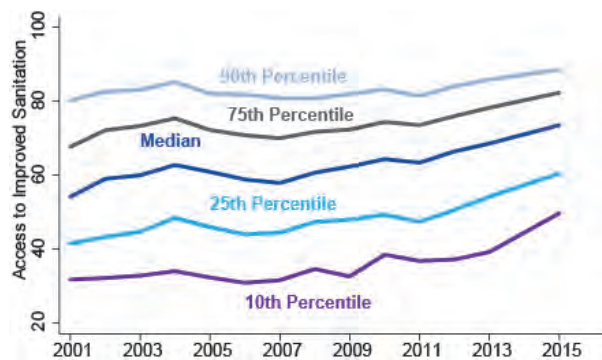
Angka Partisipasi Sekolah Menengah Atas



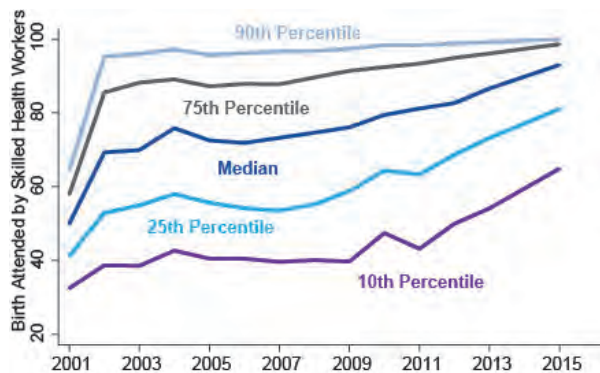
Akses terhadap air yang terlindung



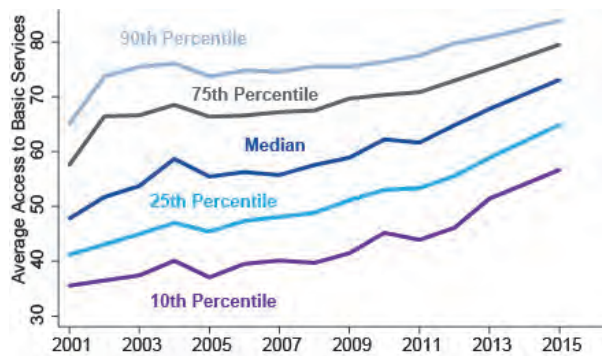
Akses terhadap sarana sanitasi yang terlindung



Kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan yang terampil



Indeks rata-rata akses terhadap layanan dasar



Sumber: Data Susenas, perhitungan staf Bank Dunia.

**Meskipun ada peningkatan akses, hasil-hasil di bidang pendidikan dan kesehatan masih buruk**

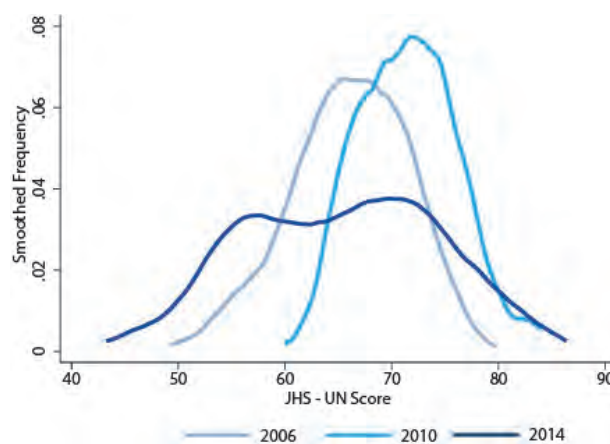
Meskipun terjadi peningkatan akses terhadap layanan dasar, belum terlihat adanya peningkatan dalam hasil di bidang pendidikan dan kesehatan di tingkat nasional. Sebagai contoh, nilai siswa Indonesia dibandingkan dengan rata-rata OECD dalam *Program for International Student Assessment (PISA)* hanya sedikit meningkat antara tahun 2001 sampai 2015. Selain itu, tidak ada tren peningkatan yang jelas dalam nilai ujian

nasional (UN)<sup>61</sup>, karena rata-rata nilai untuk sekolah menengah atas meningkat dari 59 di tahun 2006 menjadi 71 di tahun 2010, namun turun menjadi 55 di tahun 2014. Untuk sekolah menengah pertama, nilai tersebut meningkat dari 66 menjadi 71 antara tahun 2006 sampai tahun 2010, namun turun menjadi 65 di tahun 2014<sup>62</sup>. Di bidang kesehatan, walaupun terdapat perluasan yang besar dalam akses terhadap kelahiran (yang dibantu tenaga kesehatan) terampil, tingkat kematian ibu melahirkan meningkat, bukannya menurun, dan masih tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Perkiraan resmi dari survei nasional menunjukkan bahwa angka kematian ibu melahirkan meningkat dari 228 per 100.000 kelahiran di tahun 2007 menjadi 359 di tahun 2012. Indikator lain yang relevan adalah tingkat *stunting* (pertumbuhan badan yang terganggu karena masalah kurang gizi kronis pada anak-anak), yang penurunannya relatif lambat, bergerak dari 41,6 persen di tahun 2001 menjadi 36,4 persen di tahun 2013. Tingkat *stunting* ini di atas rata-rata untuk negara berpenghasilan menengah, yang berada di posisi 27 di tahun 2010.<sup>63</sup>

**Berbeda dengan penurunan kesenjangan regional secara umum dalam akses terhadap layanan, disparitas regional dalam hasil pembelajaran telah meningkat**

Data di tingkat kabupaten mengenai hasil penyampaian layanan masih terbatas atau bermasalah (Kotak 6). Tiga indikator hasil, yang data terpilahnya tersedia, yaitu nilai ujian nasional untuk sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, serta tingkat *stunting*, menunjukkan meningkatnya disparitas regional. Koefisien variasi untuk nilai ujian sekolah menengah pertama meningkat dari 0,09 di tahun 2006 menjadi 0,15 di tahun 2014 (Gambar 50). Demikian juga untuk sekolah menengah atas, koefisien variasi meningkat dari 0,09 menjadi 0,14. Sementara itu, rata-rata tingkat *stunting* naik dari 38,3 menjadi 39,4, sementara koefisien variasi tidak berubah, sebesar 0,24.<sup>64</sup>

**Gambar 50: Kurva Distribusi untuk Ujian Nasional bagi Sekolah Menengah Pertama (nilai)**



Sumber: Data Susenas dan SIKD, perhitungan staf Bank Dunia.

<sup>61</sup> Beberapa orang berpendapat bahwa nilai ujian nasional (UN) adalah ukuran hasil belajar siswa yang cacat karena materi uji di seluruh wilayah tidak dapat diperbandingkan antar tahun serta kecurangan terjadi secara meluas. Namun demikian, nilai tersebut merupakan satu dari sangat sedikit indikator yang dihasilkan secara nasional, yang dapat mengindikasikan adanya perubahan dalam hasil belajar siswa. Telah ada perkembangan positif dalam hal bagaimana ujian ini diselenggarakan sejak tahun 2015, yang diharapkan akan menghasilkan data yang lebih baik di masa depan (lihat Kotak 6).

<sup>62</sup> Fenomena peningkatan angka partisipasi tanpa adanya banyak kemajuan dalam pembelajaran dibahas dalam Indikator Pembangunan Dunia (*World Development Indicators*) 2018. Kasus Vietnam dan beberapa negara lainnya, menunjukkan bahwa memperluas akses ke sekolah dan meningkatkan hasil belajar dapat berjalan seiring.

<sup>63</sup> Indikator Pembangunan Dunia (*World Development Indicators*) (2017).

<sup>64</sup> Perbedaan antara rata-rata nasional dan rata-rata tingkat *stunting* di kabupaten dihasilkan dari rata-rata nasional yang tertimbang oleh jumlah penduduk, sementara tingkat *stunting* di tingkat kabupaten adalah rata-rata tingkat *stunting* tanpa mempertimbangkan jumlah penduduk kabupaten tersebut.

i. Menjelaskan variabilitas dalam perbaikan akses terhadap layanan oleh kabupaten/kota

**Peningkatan akses terhadap layanan sebagian dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali pemerintah daerah**

Selain belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah, analisis ekonometrik (Kotak 5) menunjukkan bahwa perbaikan akses terhadap layanan sebagian juga dapat dijelaskan oleh variabel di luar kendali pemerintah daerah. Akses terhadap layanan berhubungan positif dengan konsumsi rumah tangga, *proxy* untuk penghasilan dan permintaan masyarakat, serta akses terhadap listrik, *proxy* untuk infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah pusat. Sebaliknya, peningkatan ketidakmerataan pendapatan, yang diukur dengan koefisien Gini, ternyata memiliki dampak negatif pada peningkatan akses terhadap layanan, sesuai dengan temuan literatur bahwa ketidaksetaraan meningkatkan risiko penangkapan oleh elit lokal.

**Peningkatkan belanja pemerintah daerah untuk kabupaten tertinggal saja mungkin tidak cukup untuk meningkatkan akses terhadap layanan.**

Pengeluaran untuk sektor yang terkait dengan lima indikator akses adalah sekitar 61 persen dari APBD kabupaten tahun 2015<sup>65</sup>. Namun demikian, McCulloch dkk (2015) mengemukakan bahwa keseluruhan tingkat pengeluaran mungkin lebih relevan sebagai penentu akses layanan daripada hanya pengeluaran sektoral. Misalnya, untuk meningkatkan partisipasi sekolah, pemerintah daerah perlu membelanjakan tidak hanya pada pengeluaran terkait pendidikan saja, tetapi juga pada pembangunan jalan untuk menghubungkan siswa ke sekolah. Selain itu, literatur menunjukkan bahwa hanya dengan meningkatkan pengeluaran saja tidak selalu menghasilkan perbaikan layanan akses yang berkelanjutan. Korelasi sederhana antara perubahan total belanja daerah per kapita dan perubahan akses terhadap layanan di tingkat kabupaten antara tahun 2008 sampai 2014 sangat lemah (Gambar 51). Hasil regresi dari Kotak 5 menunjukkan bahwa ada hubungan U terbalik antara pengeluaran tambahan dan peningkatan akses terhadap layanan. Pengeluaran tambahan per kapita tidak selalu sepadan dengan perbaikan akses terhadap layanan, dan pada beberapa titik, peningkatan pengeluaran mengakibatkan peningkatan akses layanan yang lebih rendah.

**Gambar 51: Korelasi antara perubahan akses dan perubahan dalam belanja pemerintah daerah per kapita**  
(persen)



Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data SUSENAS dan SIKD

<sup>65</sup> Terdiri dari pengeluaran untuk layanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan layanan masyarakat (Sumber, Database COFIS WB 2017)

**Kotak 5: Model ekonometrik menganalisis akses terhadap kinerja pelayanan dasar**

Model empiris yang digunakan didasarkan pada model McCulloch dkk. (2015), diperbarui dengan data yang lebih baru. Variabel dependennya adalah rata-rata akses terhadap layanan dasar (lihat di atas untuk definisi indeks ini). Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap layanan dasar ditentukan oleh variabel-variabel yang berada di dalam kendali pemerintah kabupaten (variabel endogen) dan bahwa pemerintah daerah tidak dapat secara langsung mengendalikan (variabel eksogen), yang terakhir ini merupakan variabel kontrol dalam proses estimasi kami.

Persamaan estimasinya (1) adalah sebagai berikut:

$$s_{it} = \alpha s_{it-1} + x_{it}\beta_1 + w_{it}\beta_2 + u_i + \theta_t + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Di mana  $i$  adalah kabupaten secara individual,  $t$  adalah waktu dalam tahun, dan rata-rata akses ke layanan untuk kabupaten  $i$  pada waktu  $t$   $s_{it}$ , adalah fungsi dari:

$s_{it-1}$  = akses terhadap layanan pada periode sebelumnya,  $x_{it}$  = variabel eksogen,  $w_{it}$  = variabel endogen,  $u_i$  = efek kabupaten yang tidak teramati dan konstan,  $\theta_t$  = efek *time fixed*, dan  $\varepsilon_{it}$  = sebuah istilah error i.i.d (*independent and identically distributed - terdistribusi secara independen dan identik.*) dengan *mean* nol dan varians konstan. Parameter  $\alpha$  menunjukkan apakah tingkat akses sebelumnya mempengaruhi tingkat akses berikutnya. Parameter  $\beta_1$ , dan  $\beta_2$  menunjukkan bagaimana variabel endogen dan eksogen dikaitkan dengan tingkat akses terhadap layanan.

Variabel endogen adalah log dari belanja pemerintah riil per kapita dan kuadratnya. Variabel ini diperlakukan sebagai endogen karena kabupaten dapat menyesuaikan pengeluaran pada tingkat margin, melalui perubahan pada pendapatan asli daerah dan besaran surplus / defisit anggaran, dan bahwa perubahan ini dapat diterima secara masuk akal untuk menanggapi variabel dependen ini. Variabel eksogen meliputi: (i) log dari pengeluaran rumah tangga riil per kapita (sebagai *proxy* untuk penghasilan dan permintaan); (ii) persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap listrik (sebagai *proxy* untuk layanan yang diberikan oleh pemerintah pusat); (iii) koefisien Gini; dan (vi) kepadatan penduduk. Sumber data mencakup berbagai survei statistik dan publikasi, seperti: SUSENAS untuk akses layanan, konsumsi rumah tangga, dan data tingkat kemiskinan; Data Kementerian Keuangan untuk belanja pemerintah daerah; dan data BPS untuk tingkat elektrifikasi dan jumlah penduduk.

Parameter persamaan (1) diestimasi dengan menggunakan teknik *Generalized Method of Moments* (GMM). Perbedaan dalam GMM mengeluarkan/membersihkan model efek konstan yang tidak teramati kemudian melanjutkan perhitungannya dengan instrument untuk semua variabel dengan nilai sebelumnya. Regresi dilakukan di panel kabupaten yang tidak diseimbangkan, untuk tahun 2001 sampai 2014. Jumlah kabupaten bervariasi setiap tahunnya, mulai dari 313 kabupaten di tahun 2001 sampai 473 kabupaten di tahun 2014.

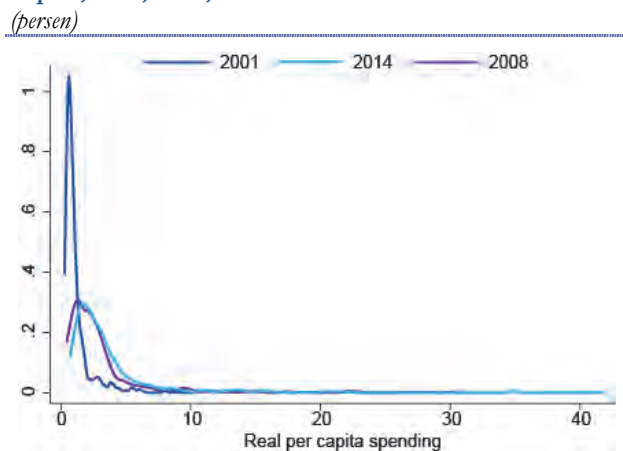
Hasil perkiraannya adalah sebagai berikut:

Variabel Penjelasan	Perkiraan Koefisien
Indeks Rata-rata Akses terhadap Jasa (Tahun Sebelumnya)	0,684***
Log Jumlah Total Pengeluaran Riil Pemda per Kapita	68,51**
Log Kuadrat dari Total Pengeluaran Riil Pemda Per Kapita Total	-2,842**
Log Pengeluaran Riil Rumah Tangga per Kapita	5,906***
Jumlah Rumah Tangga Yang Teraliri Listrik	0,225***
Koefisien Gini	-7,581**
Kepadatan (Jumlah Penduduk per km persegi)	-0,000147

Daerah yang paling tertinggal dalam hal akses sudah memiliki pengeluaran per kapita yang tinggi namun hasil audit pengeluarannya buruk

Distribusi belanja riil per kapita di Indonesia ditandai oleh ketimpangan yang ekstrem (Gambar 52). Pada tahun 2014, 90 persen kabupaten membelanjakan antara Rp 700.000 sampai Rp 6,5 juta per kapita, di mana kabupaten pada persentil ke-90 membelanjakan sekitar 5,5 kali lipat per kapita dibandingkan dengan kabupaten yang berada di 10 persen desil terbawah. Selain itu, kabupaten yang berada di 1 persen desil teratas membelanjakan 42 kali lipat lebih banyak dari kabupaten yang berada di 10 persen desil terbawah. Sekitar 43 persen dari 5 persen kabupaten yang berada di kelompok teratas dalam hal rata-rata pengeluaran per kapita selama tahun 2008-2014 termasuk dalam kelompok 10 persen terbawah dalam hal akses terhadap layanan. Hanya satu dari kabupaten-kabupaten tersebut yang menerima penilaian wajar tanpa pengecualian secara berturut-turut antara tahun 2014 dan 2015.

**Gambar 52: Pengeluaran riil pemerintah daerah per kapita, 2001, 2008, 2014**



Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan data pengeluaran dari SIKD dan data kependudukan dari BPS

#### Kotak 6: Permasalahan Data dalam melacak perkembangan layanan dasar di daerah

**Sulit untuk melacak indikator tingkat hasil (outcomes)** Sebagaimana yang dibahas dalam teks utama, hanya ada sedikit indikator hasil yang memiliki data terpilah sampai ke tingkat kabupaten. Indikator hasil kesehatan seperti angka kematian ibu melahirkan (*maternal mortality rate* MMR) dihasilkan melalui survei yang tidak dirancang untuk dapat mewakili tingkat kabupaten. Alternatifnya adalah dengan menggunakan data administratif yang diperoleh melalui sistem pelaporan pemerintah, namun tanpa adanya mekanisme verifikasi, data ini cenderung rentan terhadap pemalsuan data. Bahkan ketika data tersedia, aksesibilitas terhadap data terkadang masih menjadi persoalan. Misalnya, data terpilah mengenai kualitas jalan tidak mudah didapat oleh masyarakat. Perkembangan terakhir di sektor pendidikan nampaknya sangat menggembirakan. Mulai tahun 2015, Kementerian Pendidikan telah menerapkan ujian nasional berbasis komputer dan menerbitkan hasilnya di situs web Kementerian. Reformasi ini akan meningkatkan kehandalan dan aksesibilitas data hasil belajar siswa.

**Perbedaan besar antara indikator yang dihasilkan dari SUSENAS dan data administratif yang dimiliki kabupaten mengurangi kegunaan indikator untuk perencanaan program di tingkat kabupaten.** Misalnya, di Bojonegoro, Jawa Timur, angka partisipasi kasar untuk sekolah menengah atas pada tahun 2012 adalah 58 persen menurut SUSENAS. Namun demikian, data administratif yang dimiliki kabupaten — yang didasarkan pada formulir individual yang diserahkan ke dinas pendidikan dengan data catatan kependudukan sebagai bilangan penyebut dari jumlah penduduk — menyatakan bahwa angka tersebut adalah sekitar 78 persen. Perbedaan 20 poin ini memicu diskusi mengenai angka mana yang harus digunakan untuk tujuan perencanaan. SUSENAS, yang dilakukan secara independen oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan dengan menggunakan prosedur *sampling* statistik yang relatif baik, dianggap cukup handal untuk digunakan untuk melacak kemajuan oleh pemerintah pusat. Namun demikian, karena adanya perbedaan yang besar dengan data yang dikumpulkan secara lokal melalui saluran administratif yang konon mencakup semua warga yang relevan, statistik Susenas cenderung kurang kredibel bagi pemerintah daerah.

**Kurangnya data terinci mengenai pengeluaran.** Data terinci mengenai belanja pemerintah daerah seharusnya tersedia melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), tetapi sistem ini sampai saat ini tidak dapat mempublikasikan data belanja di bawah disagregasi sektoral. Kurangnya data pengeluaran terpilah yang terinci mengakibatkan tidak dapat dilakukannya analisis menyeluruh mengenai efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah daerah.



**Data mengenai Tata Kelola dan Kualitas Kelembagaan sangat minim.** Hanya ada beberapa sumber data yang dapat ditarik untuk membandingkan kualitas tata kelola dan kelembagaan di semua pemerintah daerah. Salah satu dari sedikit sumber data tersebut adalah hasil audit BPK, yang sebagian besar mengukur kepatuhan pemerintah daerah terhadap standar pelaporan keuangan dan kecukupan sistem pengendalian internal. Namun demikian, oleh karena mayoritas pemerintah daerah cenderung menerima hasil audit yang baik, hal ini menjadi kurang bermanfaat sebagai ukuran komparatif kualitas tata pemerintahan. Sumber data potensial lainnya termasuk evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Sayangnya, data terinci untuk evaluasi ini tidak dapat diakses oleh masyarakat. Yang tersisa adalah beberapa *dataset* yang dihasilkan melalui survei oleh lembaga penelitian lokal atau LSM. Salah satu contohnya adalah survei tata kelola ekonomi oleh KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah). Namun demikian, survei tersebut tidak dilakukan secara rutin dan tidak mencakup semua kabupaten. Survei KPPOD terakhir dengan cakupan kabupaten yang luas adalah pada tahun 2011, yang mencakup 245 kabupaten. Setelah itu, KPPOD melakukan survei lain mengenai tata kelola ekonomi pada tahun 2016, namun hanya mencakup ibu kota provinsi saja.

Bagian berikut ini memeriksa perangkat yang dapat digunakan oleh pemerintah pusat untuk mendorong perbaikan dalam kinerja penyampaian layanan pemerintah daerah, dan kemudian membahas dinamika politik daerah yang kemungkinan akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, dan peluang apa yang ada untuk dapat menyetarakan insentif politik untuk memberikan layanan yang lebih efektif.

**b. Bagaimana kita dapat membuat perbedaan yang signifikan (*move the needle*) pada kinerja pemerintah daerah?**

**Pemerintah pusat dapat menggunakan berbagai mekanisme untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah**

Sebagaimana yang ditunjukkan oleh bagian sebelumnya, efektivitas pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja publik ke dalam layanan masyarakat sangat bervariasi. Pengalaman dari seluruh dunia menunjukkan bahwa kejelasan tentang standar kinerja yang diharapkan, pembiayaan yang memadai, sistem inti yang berfungsi dengan baik untuk mengelola keuangan dan staf, kesesuaian antara insentif dan sistem akuntabilitas sangat berpengaruh terhadap kinerja. Mekanisme akuntabilitas masuk ke dalam dua kategori besar — mekanisme akuntabilitas *dari atas ke bawah* (*top-down*) yang memfasilitasi akuntabilitas oleh para pimpinan daerah dan pemerintah daerah sampai ke tingkat pemerintah yang lebih tinggi; dan yang memfasilitasi akuntabilitas *dari bawah ke atas* (*bottom-up*) yang lebih besar oleh para pimpinan daerah dan pemerintah sampai ke para warga dan organisasi kemasyarakatan di daerah.

**Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme *dari atas ke bawah* dan *dari bawah ke atas***

Sistem akuntabilitas dari atas ke bawah melibatkan pemerintah daerah yang melaporkan kinerjanya kepada pemerintah pusat sebagai dasar intervensi pemerintah pusat. Kewajiban pelaporan biasanya diberlakukan melalui peraturan, dan paling berhasil bila mendapat insentif melalui transfer dari pemerintah pusat. Akuntabilitas dari bawah ke atas dapat terlaksana melalui pasar politik. Warga setempat diharapkan dapat memberi penghargaan kepada para pemimpin yang memiliki kinerja yang baik dalam hal pemberian layanan dan inklusivitas. Pemerintah pusat dapat mendukung akuntabilitas dari bawah ke atas dengan mewajibkan pemerintah daerah untuk melibatkan warga ke dalam pengambilan keputusan dan mengumumkan rencana dan kinerjanya. Sistem akuntabilitas dari atas ke bawah juga dapat mendukung akuntabilitas dari bawah ke atas dengan membuat kinerja komparatif para pimpinan daerah yang tersedia untuk umum. Tiga bagian berikutnya memeriksa dua jenis mekanisme akuntabilitas dari atas ke bawah yang ada di Indonesia, dan kemudian pada konteks untuk memungkinkan akuntabilitas dari bawah ke atas yang lebih baik.

## i. Sistem akuntabilitas dari atas ke bawah: pemantauan, evaluasi dan insentif

Untuk mengevaluasi dan memberi insentif bagi kinerja pemerintah daerah dipergunakan tiga mekanisme pengawasan utama

Tiga Kementerian memiliki mandat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan atau lintas sektoral: 1) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), 2) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), dan 3) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setiap kementerian memberlakukan persyaratan pelaporan yang berbeda bagi pemerintah daerah. Berdasarkan sistem ini, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyerahkan laporan tahunan yang terpisah mengenai pencapaian mereka ke kementerian pusat, dan masing-masing dievaluasi dengan indikator yang berbeda (Tabel 6). Beberapa pertanyaan kunci dipergunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan sistem ini, seperti: apakah indikator bermakna untuk menilai kinerja, apakah ini memberikan sinyal mengenai apakah pemerintah daerah lemah atau kuat, apakah sistem ini mendorong persaingan yang sehat antar pemerintah daerah, apakah informasi tersebut dipergunakan untuk melakukan intervensi dari pemerintah pusat, dan apakah informasi tersebut tersedia untuk umum.

Tabel 6: sistem pemantauan dan evaluasi pemerintah daerah lintas sektoral

Lembaga	Sistem M&E	Cakupan Tematik	Sumber Data	Pemanfaatan hasil M&E	Data apa yang tersedia untuk masyarakat
Kementerian Dalam Negeri	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Semua aspek pelaksanaan pemerintahan daerah (Pembuatan Kebijakan; Pelaksanaan Kebijakan; Hasil Pencapaian (158 Indikator))	Pelaporan mandiri oleh pemerintah daerah (LPPD)	Penilaian dan penetapan peringkat pimpinan Daerah. 3 provinsi terbaik, 10 kabupaten dan kota terbaik menerima Penghargaan Presiden. Rencana untuk melakukan penilaian kapasitas dan pelatihan untuk mereka yang pencapaiannya buruk.	Informasi mengenai nilai agregat dan peringkat tersedia di <a href="http://otda.kemendagri.go.id/FormMenu/DaftarEKPPD">http://otda.kemendagri.go.id/FormMenu/DaftarEKPPD</a> Data untuk nilai agregat tersedia, namun data untuk tingkat indikator tidak tersedia.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	4 komponen pada Manajemen Kinerja (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja), dan 1 komponen Pencapaian Kinerja	Pelaporan mandiri oleh pemerintah daerah (LAKIP)	Penilaian dan penetapan peringkat Pemerintah Daerah, identifikasi wilayah perbaikan	Informasi mengenai nilai agregat dan peringkat tersedia di <a href="http://evalrbkunwas.menpan.go.id/kabupaten/home.php">http://evalrbkunwas.menpan.go.id/kabupaten/home.php</a> Data untuk nilai agregat tersedia, namun data untuk tingkat indikator tidak tersedia.
Kementerian Keuangan	Peringkat Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Alokasi Dana Insentif Daerah (DID)	Persyaratan Minimum (Opini audit, Penyerahan anggaran); dan Ukuran Kinerja (Kesehatan Fiskal, Penyediaan Layanan Dasar, dan Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial (22 Indikator))	Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan untuk data fiskal; data sekunder dari BPS untuk data kinerja	Pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan minimum dan kriteria kinerja menerima alokasi Dana Insentif Daerah (DID). 21 provinsi dan 296 kabupaten dan kota menerima DID di tahun 2017, mulai dari Rp. 7.5m-65.3m	Informasi mengenai jumlah total alokasi DID yang diterima oleh pemerintah daerah tersedia di situs web Ditjen Perimbangan Keuangan Data dan informasi mengenai hasil evaluasi atau indikator tidak tersedia.

Sumber: Kemendagri untuk EKPPD; KemenPAN-RB untuk SAKIP; dan Kemenkeu untuk DID

**Pemantauan dan evaluasi dari Kemendagri (EKPPD)**

**Evaluasi  
Kemendagri  
terhadap pemerintah  
daerah (EKPPD)  
difokuskan pada  
kinerja para  
pimpinan daerah...**

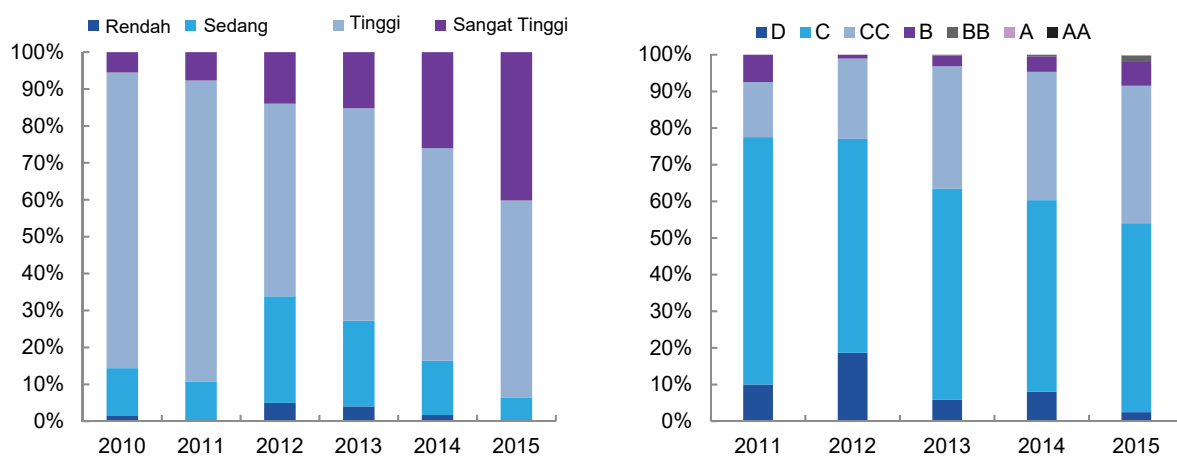
Berdasarkan evaluasi EKPPD yang dikelola oleh Kemendagri, para pimpinan daerah menyampaikan laporan akuntabilitas tahunan kepada tiga pihak yang berbeda: pemerintah pusat (LPPD), DPRD (LKPD), dan masyarakat (ILPPD). Para pimpinan daerah dievaluasi atas pencapaian mereka dalam menerapkan berbagai fungsi pemerintahan daerah, termasuk penyediaan layanan dasar — baik indikator *akses* layanan, seperti air bersih dan sanitasi, maupun beberapa indikator *kualitas*, seperti kondisi jalan kabupaten. Hasil kumulatif dipergunakan untuk memberi pengakuan kepada kepala daerah tiga besar provinsi dan sepuluh kota dan kabupaten terbaik dalam bentuk Penghargaan Presiden, menunjukkan mereka yang kinerjanya paling buruk, dan juga yang tidak menyampaikan laporan.

**...namun sistem ini  
kurang efektif, baik  
dalam menyoroti  
kekuatan dan  
kelemahan, ataupun  
merangsang  
persaingan sehat  
untuk meningkatkan  
kinerja**

Hasil evaluasi tahunan Kemendagri menunjukkan adanya peningkatan positif dalam pelaksanaan pemerintahan daerah antara tahun 2010 dan 2015, sehingga pada tahun 2015, 93 persen pemerintah daerah yang dievaluasi diberi peringkat Tinggi atau Sangat Tinggi (Gambar 53). Rentang peringkat dari Rendah untuk skor kumulatif 0-1, Sedang untuk 1-2, Tinggi untuk 2-3, dan Sangat Tinggi untuk 3-4. Namun demikian, tiga aspek desain dari EKPPD mengurangi efektivitasnya. Pertama, jumlah indikator yang banyak mengurangi sinyal pada prioritas kinerja dan menyulitkan untuk memahami kekuatan dan kelemahan kinerja di sektor tertentu. Kedua, karena hampir semua pemerintah daerah mendapat peringkat “tinggi” atau “sangat tinggi”, sulit untuk menunjukkan perbedaan dan kesenjangan dalam hasil fiskal dan pelayanan di antara daerah-daerah. Ketiga, hanya nilai kumulatif yang diumumkan yang tidak terlalu membantu warga untuk menuntut peningkatan kinerja. Tinjauan yang saat ini dilakukan terhadap kerangka evaluasi yang dilakukan oleh Kemendagri dalam konteks perubahan peraturan untuk melaksanakan UU No. 23 tahun 2014 adalah kesempatan untuk meningkatkan efektivitasnya.

**Gambar 53: Hasil evaluasi kinerja EKPPD dan SAKIP 2010-2015**

(EKPPD untuk grafik Kiri, persen kabupaten; SAKIP untuk grafik Kanan, persen kabupaten)



Sumber: Data Kemendagri, Perhitungan staf Bank Dunia

Sumber: Data KemenPAN-RB, Perhitungan staf Bank Dunia

**Pemantauan dan evaluasi oleh KemenPAN-RB (SAKIP)**

**Evaluasi  
KemenPAN-RB**

KemenPAN-RB mengevaluasi laporan pemerintah daerah (SAKIP)<sup>66</sup> dengan tujuan untuk mendorong pengelolaan kinerja dan inovasi berorientasi hasil dalam pemberian

<sup>66</sup> <http://evalrbkunas.menpan.go.id/index.php/site/kabupaten>

menggunakan pendekatan yang lebih obyektif, namun tidak jelas bagaimana hasilnya diterjemahkan menjadi insentif, sanksi atau peningkatan kapasitas

Dana Insentif Daerah (DID) menghubungkan evaluasi kinerja secara eksplisit dengan insentif pendanaan

layanan (Gambar 53). Pemerintah daerah menyampaikan laporan kinerja tahunan (LAKIP) sebagai bagian dari akuntabilitas mereka kepada pemerintah pusat untuk pemberian layanan. Laporan tersebut mencakup rincian program dan kegiatan, realisasi keuangan terhadap rencana, dan pencapaian aktual terhadap target keluaran /hasil. KemenPAN-RB didukung oleh inspektorat pemerintah (audit internal) dan BPKP<sup>67</sup>— auditor internal pemerintah — dalam melakukan tinjauan dan evaluasi, yang berfokus pada empat komponen pengelolaan kinerja (Tabel 6)<sup>68</sup>. Daerah dengan nilai tertinggi mendapat sambutan yang baik. Namun demikian, hasilnya belum dikaitkan dengan keputusan alokasi sumber daya atau insentif kinerja. Situs web KemenPAN-RB menjanjikan akses data pada indikator individual, namun data aktual belum dimuat.

#### *Pemantauan dan evaluasi oleh Kemenkeu (DID)*

Pada tahun 2010, Kementerian Keuangan memperkenalkan Dana Insentif Daerah (DID), suatu transfer dana berdasarkan nilai dari penilaian yang dicapai terhadap kerangka peringkat pemerintah daerah dari Kemenkeu. Kerangka tersebut mencakup indikator kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, penyediaan layanan dasar, dan kinerja kesejahteraan sosial dan ekonomi. Pemerintah daerah menerima sumber-sumber tambahan jika memenuhi “kriteria kelayakan minimum” dengan mendapatkan opini audit yang tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), dengan meloloskan APBD secara tepat waktu, penggunaan *e-procurement* (diberlakukan untuk alokasi tahun 2018). Di tahun 2016, kinerja layanan publik yang mendasar adalah merupakan wilayah evaluasi utama, dengan 7 dari 22 indikator kinerja yang berfokus pada peningkatan akses layanan untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Jumlah daerah yang menerima alokasi DID telah meningkat dari waktu ke waktu menjadi 317 pemerintah daerah di tahun 2017, dibandingkan dengan 54 di tahun 2010.

<sup>67</sup> BPKP bertanggung jawab untuk melakukan audit internal sehubungan dengan akuntabilitas penggunaan dana negara dalam kasus-kasus tertentu, termasuk: (i) kegiatan lintas sektoral; (ii) kegiatan yang melibatkan penggunaan dana dari Kas Negara berdasarkan ketetapan oleh menteri keuangan sebagai Kepala Bendahara Negara; dan (iii) kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

<sup>68</sup> Peringkat berkisar dari Sangat Memuaskan (AA) untuk nilai 90-100 sampai Sangat Kurang (D) untuk nilai 0-30.

Meskipun jumlah penghargaannya mungkin terlalu kecil untuk dapat memiliki banyak efek insentif...

Namun, jumlah yang dialokasikan melalui DID relatif kecil. Meskipun jumlah DID meningkat lebih dari lima kali lipat sejak diperkenalkan, total alokasi sebesar Rp 7 triliun di tahun 2017 hanya menyumbang rata-rata sekitar 1 persen dari total transfer dana ke daerah, dan kurang dari 5 persen dana yang tidak terkait dengan gaji atau pengeluaran wajib (Gambar 54). Alokasi dasar untuk DID tidak disesuaikan dengan jumlah penduduk

kabupaten atau APBD-nya, sehingga alokasi tersebut akan memiliki dampak insentif yang sangat berbeda, tergantung pada besarnya APBD pemerintah daerah. Untuk lebih dari setengah pemerintah daerah yang menerima DID, jumlahnya mencapai kurang dari 1 persen dari total penerimaan mereka.

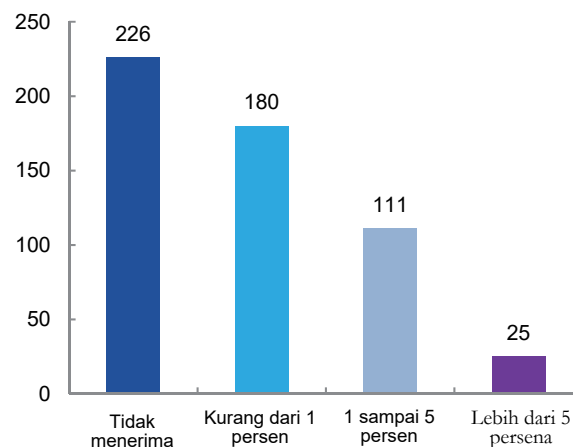
... tampaknya berkorelasi dengan peningkatan dalam standar minimum pengelolaan keuangan dan tata kelola

Selama kurun waktu sejak DID diperkenalkan, jumlah pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan minimum telah meningkat secara signifikan; laporan keuangan pemerintah daerah yang menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian meningkat dari 13 persen di tahun 2011 menjadi 70 persen di tahun 2016. Pada tahun 2005, jumlah pemerintah daerah yang mencapai penilaian audit wajar tanpa pengecualian hanya 5 persen (Gambar 55). Beberapa faktor

tampaknya berada di balik peningkatan tajam ini dalam waktu yang relatif singkat dalam 10 tahun: staf pemerintah daerah yang lebih terlatih, keterlibatan BPKP<sup>69</sup> untuk memberikan bantuan teknis kepada pemerintah daerah, pedoman yang lebih rinci yang dikeluarkan, dan insentif keuangan baru untuk mencapai nilai audit yang baik.

**Gambar 54: Jumlah kabupaten dengan alokasi DID sebagai pangsa dari total pendapatan pemerintah daerah di tahun 2017**

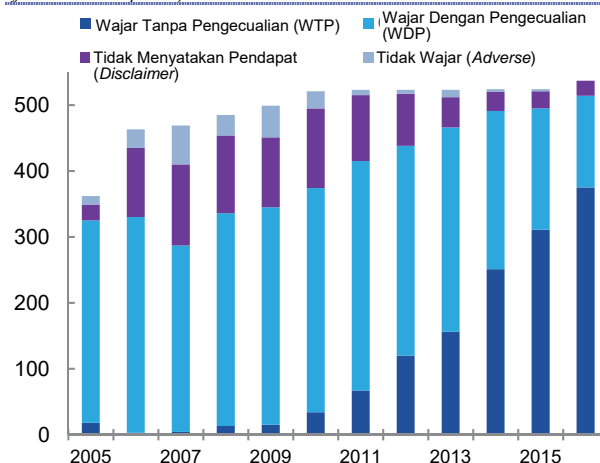
(jumlah kabupaten)



Sumber: Data Kemenkeu, Perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 55: Jumlah pemerintah daerah berdasarkan hasil auditnya**

(jumlah kabupaten)



Sumber: Laporan BPK

Catatan: Hasilnya mencakup semua audit pada pemerintah daerah termasuk provinsi dan kabupaten / kota

<sup>69</sup> BPKP adalah lembaga audit pemerintah pusat yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP), berbeda dengan BPK yang merupakan lembaga independen

Karena lebih banyak pemerintah daerah memenuhi kriteria minimum ini, Kementerian Keuangan telah menaikkan ambang batas alokasi DID tahun 2018 dengan mensyaratkan opini audit wajar tanpa pengecualian (opini audit wajar dengan pengecualian tidak lagi memenuhi syarat) dan penggunaan *e-procurement*. Ini membantu memastikan sistem tersebut tetap relevan sebagai ukuran kinerja komparatif. Namun demikian, karena lebih banyak pemerintah daerah yang secara konsisten mencapai opini audit wajar tanpa pengecualian dan audit BPK berfokus pada kisaran kelemahan yang kecil yang didefinisikan melalui ketidakpatuhan terhadap kerangka peraturan, diperlukan tindakan yang lebih bernuansa untuk mengidentifikasi pengeluaran yang buruk, termasuk analisis pengeluaran pemerintah daerah dengan menggunakan teknik analisis pengeluaran publik. Saat ini, data terinci mengenai pengeluaran daerah yang dibutuhkan untuk analisis pengeluaran publik tidak tersedia (Kotak 6).

**Namun demikian, aspek desain DID cenderung mengurangi potensinya untuk mempengaruhi kualitas pemberian layanan**

Tiga aspek desain DID cenderung melemahkan potensinya untuk mempengaruhi kualitas pemberian layanan. Pertama, seperti EKPPD, indikator DID digabungkan ke dalam satu nilai tunggal (AA + sampai DD-). Ini mengaburkan sinyal mengenai kinerja, sehingga menyulitkan pemerintah daerah untuk mengetahui aspek kinerja mana (pengelolaan keuangan, atau pemberian layanan tertentu) yang mendorong nilai kumulatif yang baik, atau yang buruk. Kedua, beberapa indikator kinerja tidak mungkin menunjukkan perubahan dengan cepat meskipun pemerintah daerah berupaya meningkatkan kinerjanya secara signifikan. Misalnya, prevalensi *stunting* akan dimasukkan sebagai indikator untuk alokasi tahun 2018, akan tetapi walaupun pemerintah daerah berusaha keras untuk melaksanakan program terkait gizi, indikator ini tidak mungkin menunjukkan adanya perubahan dalam satu siklus hibah. Ketiga, beberapa indikator masih mengukur hasil yang berada di luar kendali langsung pemerintah daerah, seperti kemiskinan.

**Evaluasi rutin dapat membantu menetapkan dampak dari sistem kinerja dan meningkatkan efektivitasnya**

Pemerintah pusat menghadapi tugas yang besar untuk memberikan pengawasan kepada lebih dari 500 pemerintah daerah, dengan terbatasnya pagu anggaran (*resource envelope*). Dalam konteks ini, pemerintah provinsi dan BPKP dapat memainkan peranan lebih besar dalam melakukan pengawasan dan verifikasi kinerja, serta mengembangkan kapasitas pemerintah daerah dalam batas-batas kewenangannya. Tiga sistem yang ada yang berfokus pada berbagai aspek kinerja pemerintah daerah di seluruh tingkat pemerintahan tampaknya tidak saling memperkuat dan masing-masing menghasilkan daftar kabupaten dan kota dengan kinerja yang terbaik. Sistem ini dapat dievaluasi untuk lebih memahami nilainya dalam meningkatkan kinerja, baik melalui insentif maupun melalui penetapan sasaran intervensi yang lebih baik, termasuk peningkatan kapasitas.

*Contoh lain dari transfer dana berbasis kinerja*

**Contoh lain dari transfer dana berbasis kinerja adalah yang dilakukan dalam proyek Reformasi Pemerintahan Daerah...**

Dari tahun 2005-2010, Indonesia melakukan uji coba transfer dana berbasis kinerja di 40 kabupaten (kemudian dikurangi menjadi 14) berdasarkan Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintah Daerah, atau P2TPD).<sup>70</sup> Transfer dana ini ditujukan untuk memberi insentif kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan dasar, partisipasi dan transparansi masyarakat, dan pengurangan kemiskinan. Untuk menerima penghargaan kinerja, kabupaten diwajibkan untuk mencapai prakarsa reformasi yang telah ditetapkan. Tinjauan secara independen di akhir program mendapati bahwa desainnya terlalu rumit mengingat lemahnya kapasitas pemerintah daerah. Desain yang awal diusulkan untuk mengukur kemajuan di 67 bidang namun setelah ditinjau ulang dikurangi menjadi 14. Temuan ini menyoroti risiko dari upaya

<sup>70</sup> Percontohannya dilaksanakan dengan pembiayaan dari Bank Dunia dan donor lainnya.

untuk melakukan terlalu banyak hal dengan satu transfer dana, yang mengaburkan dampaknya secara keseluruhan. Dengan menetapkan kriteria kelayakan secara lebih sempit, pemerintah pusat dapat memberikan sinyal yang lebih kuat mengenai kinerja yang diharapkan; berfokus secara khusus pada peningkatan pengelolaan keuangan.

### ... dan proyek pemerintah dan desentralisasi (P2D2)

Pelajaran yang lebih positif dapat diambil dari Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) yang didukung oleh Bank Dunia. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan pelaporan yang terkait dengan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pemerintah pusat di beberapa pemerintah daerah terpilih dan memberikan alokasi pendanaan yang lebih besar kepada kabupaten-kabupaten yang mencapai kinerja yang baik dalam melakukan pengadaan dan pelaksanaan DAK. Pencapaian kinerja diverifikasi secara independen oleh auditor internal pemerintah, BPKP. Pembayaran insentif berupa pengembalian kontribusi 10 persen kabupaten atas pembiayaan setiap sub-proyek, berdasarkan “biaya referensi per unit” yang obyektif untuk setiap jenis proyek. Kabupaten yang berpartisipasi dalam proyek ini menunjukkan peningkatan belanja modal, peningkatan akses layanan, dan hasil audit yang lebih baik. Analisis dampak menunjukkan bahwa efek utama dari pembayaran insentif P2D2 adalah mendorong kabupaten / kota untuk bergabung dalam proyek ini pada awalnya, namun sebenarnya pendorong bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah terhadap belanja modal, akses layanan, dan audit adalah hasil verifikasi yang dilakukan oleh BPKP.<sup>71</sup> Kementerian Pekerjaan Umum, yang mengawasi penilaian kinerja, dapat menggunakan informasi kinerja yang dikumpulkan untuk memberi informasi bagi penggunaan yang lebih strategis dan terarah.

### ... dan program hibah air minum

Program hibah air minum adalah pengalaman Indonesia yang berhasil, yang dapat memberi informasi tentang rancangan mekanisme pembiayaan berbasis kinerja. Program ini menggunakan hibah berbasis output yang terkait dengan investasi infrastruktur. Pemerintah daerah yang berpartisipasi diberi penggantian biaya untuk sambungan air ke rumah tangga miskin, dengan sambungan yang diverifikasi secara independen. Antara tahun 2014 dan 2016, hampir Rp 1,4 triliun dana pengganti yang diberikan ke pemerintah daerah dari sumber donor dan pemerintah, dan lebih dari 600.000 sambungan air bersih baru telah dilaksanakan. Fitur penting dari program hibah ini adalah pembagian kerja antara Kementerian Keuangan dan kementerian teknis terkait. Kementerian lini yang memahami bidang teknis bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa pencapaian hasil telah diverifikasi, yang kemudian memicu pencairan dana oleh Kemenkeu.

### ii. Sistem akuntabilitas dari bawah ke atas: Menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk akuntabilitas secara demokratis

### Desentralisasi dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan daya tanggap pemerintah daerah terhadap para warga melalui proses politik

Mekanisme akuntabilitas dari atas ke bawah, seperti yang dijelaskan di atas, sampai batas tertentu dapat mengatasi kegagalan mekanisme akuntabilitas daerah akuntabilitas dari bawah ke atas. Manfaat desentralisasi politik yang diharapkan mencakup peningkatan pemberian layanan daerah dan tata pemerintahan daerah yang lebih baik karena kedekatan yang lebih besar antara para pimpinan terpilih dan konstituennya. Namun demikian, apakah tujuan pembangunan ini mungkin dapat tercapai — terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan — tergantung pada tingkat pencaplokan (*capture*) pemerintah daerah oleh para elit, dan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah<sup>72</sup>. Jika pemerintah daerah lebih rentan dikuasai oleh para elit daripada pemerintah pusat karena lemahnya mekanisme akuntabilitas politik,

<sup>71</sup> Bank Dunia (2017f).

<sup>72</sup> Bardhan (2002).

desentralisasi cenderung tidak meningkatkan hasil pemberian layanan<sup>73</sup>. Memang, pengalaman dengan desentralisasi di banyak negara telah menghasilkan beragam hasil dalam mewujudkan manfaat ini<sup>74</sup>.

**Pemilu membantu memperkuat akuntabilitas dan daya tanggap para pemimpin terpilih ...**

Proses pemilihan umum adalah sarana utama untuk akuntabilitas lokal. Bila terlaksana, hal ini dapat membantu mendorong peningkatan besaran jumlah dan kualitas barang dan jasa publik dengan memilih dan memberi sanksi kepada para pemimpin berdasarkan kinerja mereka. Namun demikian, mekanisme akuntabilitas pemilihan semacam itu dapat gagal berfungsi, apabila para pemimpin terpilih tidak dapat membuat pilihan kebijakan yang baik atau menerapkan solusi teknis yang baik, karena hal itu dibatasi oleh *insentif politik yang merugikan* — misalnya, takut kehilangan dukungan dari partai politik atau para elit ekonomi — dan *norma perilaku yang salah* — misalnya praktik korupsi yang ada<sup>75</sup>. Hal ini sering terjadi di lingkungan yang memiliki kapasitas yang rendah dan kondisi pemerintahan yang lemah.

**... tetapi dinamika politik lokal di Indonesia dapat menghambat para pemimpin yang kemungkinan besar akan dapat melaksanakan tugasnya secara efektif**

Terdapat bukti bahwa dinamika politik di tingkat kabupaten melemahkan pemilihan pemimpin berdasarkan perkembangan kinerja mereka. Para pemimpin petahana (*incumbent*) tampaknya memiliki keuntungan yang sangat besar dibandingkan dengan para penantang mereka, terlepas dari kinerja mereka yang aktual, karena visibilitas dan terkenalnya nama mereka di jabatan mereka dan kendali yang mereka miliki terhadap sumber daya publik dan aparatur publik. Para pemimpin petahana yang mencalonkan diri untuk kembali dipilih meningkatkan anggaran belanja —terutama untuk pengeluaran administratif yang dapat diubah (*discretionary administrative spending*) — dengan maksud untuk meningkatkan popularitas mereka namun tidak meningkatkan keseluruhan hasil fiskal atau pemberian layanan<sup>76</sup>. Pierskalla dan Sacks (2017) menemukan terjadinya penurunan belanja barang modal selama tahun-tahun pemilihan, karena para politisi dan birokrat daerah mendapat insentif untuk menghindari pengawasan yang ketat oleh publik dan media — yang dapat membatasi peluang untuk mendapat keuntungan dari proyek investasi bagi para pejabat yang korup, dan menimbulkan ketakutan akan tuduhan palsu untuk mereka yang jujur. Fragmentasi politik di DPRD juga dapat meningkatkan anggaran “*pork barrel*” (istilah yang berasal dari Amerika Serikat/AS dengan konotasi negatif yang dipakai untuk mengejek praktek penganggaran pemerintah pusat (Federal) AS untuk proyek-proyek di distrik anggota Konggres (setara dengan DPR) yang terpilih)<sup>77</sup> dan menghambat peningkatan dalam hasil pemberian layanan. Penelitian terbaru oleh Lewis (2017b) menunjukkan bahwa setiap tambahan partai politik di DPRD menyebabkan peningkatan belanja infrastruktur dari berbagai anggaran “*pork barrel*” — yaitu, digunakan untuk tujuan patronase (*patronage* - mencari perlindungan) dibandingkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik seperti akses rumah tangga terhadap fasilitas air dan sanitasi dan akses desa terhadap jalan beraspal.

<sup>73</sup> Sebagaimana telah dibahas dalam Laporan Pembangunan Dunia 2004 tentang Mengupayakan Agar Layanan Dapat Terlaksana bagi Masyarakat Miskin (*Making Services Work for Poor People*), desentralisasi politik adalah untuk memperkuat suara warga untuk menuntut akuntabilitas dari para pemimpin politik dan pejabat publik, yaitu “jalur panjang” dalam akuntabilitas segitiga antara warga, politisi / pembuat kebijakan, dan penyedia layanan. Sebaliknya, di mana akuntabilitas politik lemah, warga mungkin juga dapat mengatasi masalah pemberian layanan publik melalui tindakan kolektif untuk mempengaruhi penyedia layanan di garis depan secara langsung. Memperkuat “jalur singkat” akuntabilitas ini dapat meningkatkan hasil layanan.

<sup>74</sup> Smoke dkk (2013).

<sup>75</sup> Bank Dunia (2016).

<sup>76</sup> Sjahrir, dkk. (2013) dan Skoufias, dkk. (2014).

<sup>77</sup> Belanja “*pork barrel*” mengacu pada pengeluaran proyek pemerintah daerah yang menghasilkan keuntungan bagi kelas tertentu warga yang terpilih.



**Para pemimpin daerah yang terpilih secara langsung memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan yang ditunjuk oleh DPRD**

Pemerintah-pemerintah daerah dengan para kepala daerah terpilih membelanjakan lebih sedikit tapi mereka membelanjakannya dengan lebih baik, dibandingkan dengan kabupaten dengan kepala daerah yang ditunjuk<sup>78</sup>. Secara khusus, kabupaten yang dipimpin oleh eksekutif terpilih memberikan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara lebih efisien. Walikota yang terpilih juga tampak lebih responsif terhadap warga dibandingkan dengan anggota DPRD. Ini mungkin karena mereka lebih terlihat oleh para pemilih dan oleh karena itu dapat dianggap lebih mudah dimintai akuntabilitasnya dibandingkan dengan yang terakhir, yang dapat bersembunyi di balik afiliasi partai politik mereka<sup>79</sup>.

*Aspek lingkungan yang mendukung dalam sistem akuntabilitas dari bawah ke atas (bottom-up)*

**Pengungkapan informasi publik mengenai kinerja para pemimpin terpilih adalah faktor lingkungan utama yang mendukung**

Pengungkapan informasi yang tepat waktu mengenai informasi yang berkaitan dengan kinerja para pemimpin terpilih dapat mengurangi asimetri informasi dalam proses politik dan memperlengkapi para pemilih untuk menilai mereka<sup>80</sup>. Dengan demikian, menyalurkan waktu pengungkapan informasi dengan proses politik juga penting<sup>81</sup>. Media juga dapat memainkan peranan penting dalam membuat informasi mengenai kinerja pejabat publik yang dapat diakses publik. Ferraz dan Finan (2007) menemukan bahwa di Brazil pengungkapan hasil audit pemerintah kota sebelum pemilihan dapat secara signifikan mengurangi kemungkinan pejabat publik yang korup terpilih kembali, dan bahwa media — dalam hal ini stasiun radio setempat — memainkan peranan utama dalam mengurangi asimetri informasi.

### c. Menyalurkan insentif untuk mendorong kinerja pembangunan oleh para pemimpin daerah dan pejabat publik

**Sangat dibutuhkan adanya mekanisme alternatif di luar pemilihan...**

Sangat dibutuhkan adanya mekanisme alternatif di luar pemilihan untuk memungkinkan interaksi yang lebih sering dilakukan oleh warga, seperti perencanaan dan penganggaran partisipatif, mekanisme umpan balik warga, sistem keluhan dan banding.<sup>82</sup> Pengalaman dari studi lapangan di Indonesia juga menunjukkan bahwa peningkatan kinerja layanan publik dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti: program pemerintah yang partisipatif untuk lebih menargetkan kebutuhan warga, terutama untuk kelompok berpenghasilan terendah; komunikasi publik dan penjangkauan program pemerintah; dan transparansi pengelolaan dana publik, terutama yang terkait dengan penyediaan layanan publik<sup>83</sup>.

**...dan sistem insentif dapat dirancang untuk mendorong kinerja pembangunan oleh para kepala daerah dan pejabat publik**

Berikut ini adalah rekomendasi tentang bagaimana merancang sistem insentif untuk mendorong kinerja pembangunan oleh para kepala daerah dan pejabat publik. Ada peluang bagi pemerintah pusat untuk memperkuat penggunaan sistem pemantauan dan evaluasi yang ada dan instrumen transfer fiskal untuk memberi insentif bagi kinerja dan sikap berorientasi hasil. Selanjutnya, pemerintah pusat juga dapat mendorong transparansi dan aksesibilitas yang lebih besar terhadap informasi kinerja komparatif di tingkat daerah.

**Ada banyak hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk menyalurkan**

Mekanisme pengendalian dari atas ke bawah (top-down) mungkin efektif di lingkungan birokrasi yang dekonsentrasi, namun sangat tidak efektif dalam konteks desentralisasi. Bagian sebelumnya menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas politik perlu diperkuat dan insentif politik harus diarahkan agar para politisi daerah

<sup>78</sup> Lewis (2016).

<sup>79</sup> von Luebke (2009).

<sup>80</sup> Bank Dunia (2016).

<sup>81</sup> Bank Dunia (2017f).

<sup>82</sup> Smoke (2015).

<sup>83</sup> Bank Dunia (2013).

**insentif bagi para kepala daerah untuk memberikan layanan yang lebih baik**

peduli untuk melayani warganya dengan lebih baik. Berikut ini adalah tiga kelompok rekomendasi mengenai bagaimana pemerintah pusat dapat memaksimalkan dan mendukung motivasi tersebut, dan mengarahkannya untuk memperbaiki kinerja pembangunan pemerintah daerah. Rekomendasi tersebut mencakup: i) menerapkan praktik yang baik untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, ii) menanamkan orientasi hasil ke dalam transfer fiskal, dan iii) mendorong keterlibatan warga yang lebih efektif.

#### **i. Menerapkan praktik yang baik untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah**

**Desain sistem evaluasi itu penting**

Pengalaman Indonesia dan pengalaman internasional menunjukkan bahwa mendapatkan insentif kinerja yang tepat itu sulit, dan disain sistem evaluasi atau penilaian kinerja itu penting. Bagian ini menyajikan lima set rekomendasi untuk menginformasikan penyempurnaan sistem ini di masa depan.

**Kejelasan tujuan kebijakan harus menjadi titik awal**

Sistem yang mengukur semua aspek kinerja dalam satu indeks tidak memberikan kejelasan mengenai langkah berikutnya yang harus dilakukan untuk mengatasi kesenjangan kinerja, sehingga hanya menghasilkan penghargaan bagi mereka yang berkinerja baik. Sistem yang dirancang dengan baik untuk mengukur dan menanggapi kesenjangan kinerja daerah harus mencakup penilaian terhadap aspek kinerja daerah yang lebih terfokus, termasuk di sektor-sektor tertentu. Akhirnya, tujuan kebijakan yang baik adalah mendorong pemerintah daerah yang “di atas rata-rata” untuk meningkatkan kinerjanya lebih lagi, sehingga dapat menjadi panutan bagi daerah-daerah lain.

*Mengukur kinerja lebih sulit dari yang terlibat, dan pilihan desain itu penting*

**Pilihan dari indikator sangatlah penting**

Indikator kinerja adalah proksi kinerja aktual, namun juga merupakan cara yang penting untuk memberi sinyal kepada para pimpinan dan pejabat pemerintah daerah tentang isu-isu apa yang penting. Indikator dan bagaimana pengukurannya memiliki dampak yang besar terhadap efektivitas insentif:

(a) *Bertindak selektif—kurang berarti lebih.* Terlalu banyak indikator memperlemah sinyal kinerja, dan memberi beban pelaporan yang besar pada pemerintah daerah yang pada gilirannya dapat menyebabkan melemahnya kualitas data, jika pemerintah daerah kurang berhati-hati terhadap keakuratan informasi yang mereka berikan.

b) *Indikator harus berada dalam kendali pemerintah daerah.* Banyak indikator dalam sistem evaluasi yang ada saat ini dipengaruhi oleh banyak faktor lain dan oleh karena itu bukan cerminan langsung dari kinerja pemerintah daerah.

(c) *Mengukur fungsionalitas sistem dan proses juga penting.* Pengukuran ini membantu memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tidak hanya bagaimana tetapi juga mengapa kinerja tidak meningkat — dan membantu menginformasikan intervensi yang lebih tepat sasaran.

(d) *Indikator harus merupakan cerminan kinerja yang tepat waktu,* terutama untuk sistem yang mengukur perubahan kinerja setiap tahunnya. Hasilnya berubah secara perlahan; bahkan jika kinerja penyampaian layanan secara dramatis meningkat, hal ini tidak akan mungkin diterjemahkan ke dalam ukuran hasil yang lebih baik dalam waktu satu tahun.

(e) *Pengukuran keseimbangan kinerja absolut dengan peningkatan secara inkremental.* Mereka yang memiliki kinerja yang lemah perlu didorong untuk terus berusaha berbuat lebih baik. Jika kinerja absolut adalah satu-satunya ukuran, nilai dari beberapa pemerintah

daerah akan selalu berada di bagian terbawah. Evolusi terbaru dari Dana Insentif Daerah (DID) menggabungkan ukuran peningkatan terhadap kinerja masa lalu.

**Pastikan pengukuran kinerja bisa dipercaya**

Efektivitas insentif tergantung pada pemerintah daerah yang meyakini bahwa pengukuran kinerja dapat dipercaya dan adil. Aturan dan proses untuk mengukur kinerja harus transparan dan sederhana, sehingga pemerintah daerah dan konstituennya dapat memahaminya dengan mudah (Lewis dan Smoke, 2008). Penilaian kinerja harus memasukkan mekanisme untuk dapat melakukan verifikasi hasil secara independen, dan pemberian sanksi yang selayaknya bagi pemerintah daerah yang mencoba mencurangi sistem. Salah satu dari tiga sistem evaluasi umum menggunakan data yang didapat secara independen (DID), sementara yang dua lainnya mengandalkan informasi yang dilaporkan sendiri (SAKIP dan EKPPD) yang mensyaratkan verifikasi oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

**Secara eksplisit menghubungkan evaluasi kinerja dengan pembangunan kapasitas**

Sebagian besar informasi yang dikumpulkan oleh kementerian-kementerian di tingkat pusat tampaknya tidak menginformasikan tindak lanjut. Penilaian kinerja secara rutin memberi kesempatan untuk berdiskusi dengan pemerintah daerah mengenai bagaimana mereka berencana memperbaiki kinerjanya. Indeks kinerja — menunjukkan bagaimana pemerintah daerah tertentu telah melakukan kinerja dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya — memberikan bukti yang dapat dipercaya untuk memberikan informasi bagi diskusi kinerja ini, dan menjadi dasar untuk perbandingan pada penilaian berikutnya jika kinerjanya meningkat. Pengukuran kinerja juga dapat membantu menargetkan sumber daya bantuan teknis yang langka kepada pemerintah daerah yang paling membutuhkan. Dalam Proyek P2D2, Kementerian Pekerjaan Umum menggunakan informasi kinerja yang dikumpulkan oleh BPKP untuk membantu mereka menargetkan pemerintah daerah tertentu untuk mendapat dukungan dengan aspek-aspek tertentu dari pelaksanaan sub-proyek di mana kinerja mereka paling lemah.

**Menangani keberlanjutan kelembagaan dalam desain**

Lembaga-lembaga pemerintah pusat memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai kendala operasional terhadap kinerja daerah yang lebih baik, dan jumlah pegawai negeri sipil pusat terbatas untuk melakukan dialog mengenai kinerja dan penguatan kapasitas di 508 pemerintah daerah. Terdapat ruang lingkup untuk memanfaatkan pemerintah provinsi untuk berperan lebih dalam memberikan pengawasan dan dukungan. Undang-undang otonomi daerah tahun 2004 memberi peran kepada Gubernur kepala daerah Provinsi dalam mengarahkan dan mengawasi pemerintah daerah yang kemudian diperkuat lagi ketika undang-undang tahun 2004 diganti pada tahun 2014, sebagaimana yang sudah diterapkan oleh beberapa pemerintah provinsi, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

**ii. Menanamkan orientasi hasil ke dalam transfer fiskal**

**Transfer fiskal bersyarat berpotensi menjadi alat yang paling ampuh untuk mempengaruhi kinerja pemerintah daerah**

Pada tahun 2018, lebih dari 25 persen transfer ke pemerintah provinsi dan kabupaten di Indonesia akan dilaksanakan dengan bersyarat. Selama empat tahun terakhir, pemerintah telah mengubah program yang dijalankan melalui anggaran kementerian teknis nasional sebagai dekon dan tugas pembantuan (TP)<sup>84</sup> menjadi transfer dana bersyarat ke pemerintah daerah seperti DAK. Transfer dana bersyarat merupakan cara yang semakin penting untuk mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Indonesia saat ini hanya memiliki dua transfer dana yang dikaitkan dengan kinerja: DID dan Hibah.

<sup>84</sup> Dekon (dekonsentrasi) dan tugas pembantuan adalah pengaturan pendanaan khusus untuk membiayai tugas pemerintah daerah atau tugas pembantuan melalui anggaran kementerian teknis.

**Dibutuhkan adanya instrumen berorientasi hasil yang lebih fleksibel untuk mengatasi berbagai tujuan yang berbeda**

Untuk memaksimalkan ruang lingkup untuk mendorong kinerja yang lebih baik di tingkat daerah, diperlukan adanya rangkaian instrumen yang lebih besar dan lebih fleksibel. Secara khusus, Hibah dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai instrumen untuk membiayai proyek infrastruktur perkotaan yang besar dan spesifik di daerah dengan cara yang sangat dapat dipertanggungjawabkan. Karena semakin banyak instrumen dikembangkan untuk berfokus pada pencapaian hasil di sektor-sektor tertentu, DID dapat difokuskan kembali pada desain awalnya sebagai insentif untuk meningkatkan sistem pengelolaan keuangan publik —yang merupakan proses penting untuk pemberian layanan yang lebih efektif. Reformasi yang diusulkan di masa depan untuk DID adalah: (i) membatasi kelayakan pemerintah daerah hanya kepada pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan minimum, yaitu yang memiliki hasil audit yang wajar tanpa pengecualian, (ii) mempersempit jangkauan indikator kinerja untuk berfokus pada fungsi sistem utama yang penting untuk pemberian layanan yang efektif, seperti perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan, dan berpotensi untuk diperluas, untuk mencakup pengelolaan sumber daya manusia; (iii) memulainya dengan alokasi dasar yang lebih sesuai dengan kapasitas fiskal relatif dari pemerintah daerah yang berbeda (basis per kapita adalah pendekatan yang paling umum); (iv) melakukan pengukuran beberapa indikator sedemikian rupa untuk mencerminkan peningkatan pada paduk (baseline) dari kabupaten itu sendiri (terutama yang terkait dengan pemungutan penerimaan); (v) membuat penilaian kinerja secara rinci yang tersedia untuk umum dalam format yang komparatif.

**DAK Fisik dapat diperbaiki dengan memberi fokus kepada prioritas nasional dan hasil bukannya input**

Salah satu cara untuk memperbaiki orientasi hasil dari DAK adalah dengan memusatkan prioritas DAK (DAK Fisik Penugasan) pada pencapaian program nasional tertentu, bukan hanya pada sektor tertentu, sehingga DAK ditetapkan untuk “mengikuti program, bukan mengikuti fungsi”.<sup>85</sup> Tiga cara untuk mencapai hal ini adalah: (i) dengan menetapkan DAK untuk dapat mendukung prioritas nasional yang spesifik di dalam RKP, (ii) dengan menetapkan tujuan kebijakan DAK di dalam pedoman teknis kementerian, dan (iii) dengan mewajibkan pemerintah daerah untuk mengembangkan rencana untuk menerapkan prioritas nasional dan menunjukkan kaitan antara masukan yang direncanakan dan tujuan kebijakan nasional. Hal ini beranjak dari pendekatan berbasis proposal yang dimulai pada tahun 2016. Untuk mencapai prioritas nasional, DAK Fisik (yang membiayai belanja modal) harus sinkron dengan DAK Non-fisik (yang membiayai belanja berulang). Pencapaian sebagian besar prioritas nasional bergantung pada input modal maupun input operasional.

**Data untuk mengukur kinerja sangatlah penting, dan semakin kompleks definisi kinerjanya, akan semakin sulit melakukan pengumpulannya secara akurat**

Tergantung pada bagaimana kinerja didefinisikan, akan dibutuhkan jenis data yang berbeda untuk mengukurnya (Tabel 7). Sistem yang ada saat ini untuk mengumpulkan data kinerja belum dikembangkan dengan baik. Kementerian Keuangan saat ini meminta pelaporan penyerapan anggaran (tingkat 1 pada Tabel 7), dan sejak tahun 2017 meminta data kemajuan fisik (tingkat 2). Proyek LGDP/P2D2 mewajibkan pelaporan kualitas keluaran (tingkat 3), namun hanya berkaitan dengan empat subsektor DAK. Kementerian teknis memainkan peranan penting dalam menilai kinerja, terutama bila kinerja didefinisikan dengan cara yang lebih kompleks. Untuk memainkan peranan penting ini, kementerian teknis memerlukan akses ke data kinerja. Meskipun kementerian teknis memelihara sistem data, sistem tersebut sulit untuk membuat pemerintah daerah untuk mematuhi persyaratan pelaporan kinerja.

<sup>85</sup> Pada tahun 2016, Presiden Jokowi mengumumkan suatu pendekatan baru untuk menghubungkan rencana anggaran dengan ungkapan “dana mengikuti program, bukan dana mengikuti fungsi” yang mengamankan hubungan yang lebih kuat antara alokasi sumber daya dan prioritas pemerintah, daripada sumber daya yang dialokasikan ke struktur administrasi pemerintahan (fungsi).

Kementerian Keuangan baru-baru ini mengambil langkah untuk memulai pengumpulan informasi keluaran kinerja melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Perbendaharaan Negara di kabupaten dengan menggunakan aplikasi pelaporan yang disebut OM-SPAN. Saat ini, sistem ini digunakan untuk mengumpulkan data pada tingkat 2 — berkaitan dengan jumlah keluaran fisik yang dihasilkan. Diperlukan lebih banyak pekerjaan agar data ini tersedia bagi kementerian teknis secara tepat waktu, sehingga mereka dapat menggunakannya untuk melakukan intervensi terhadap kinerja, dan mengeksplorasi kapasitas sistem untuk mengumpulkan jenis informasi kinerja yang lebih kompleks.

Tabel 7: Definisi kinerja yang kompleks

Definisi kinerja	Jenis data yang diperlukan
1) Penyerapan anggaran	Pengeluaran di akhir tahun
2) Keluaran secara fisik yang dihasilkan	Informasi mengenai jumlah keluaran yang dihasilkan
3) Kualitas dari keluaran fisik yang dihasilkan	Informasi mengenai jumlah keluaran yang dihasilkan dan kualitasnya. Bisa juga mencakup kualitas sistem (misalnya persiapan proyek, penetapan biaya, pengadaan dan pengelolaan kontrak)
4) Kapasitas atau kesiapan untuk menyediakan layanan  (hasil menengah tingkat 1)	Informasi mengenai keluaran yang dihasilkan (berpotensi termasuk informasi mengenai kualitas) tetapi juga bagaimana keluaran tersebut berkontribusi pada kesiapan pemerintah daerah untuk memberikan layanan yang ditetapkan.
5) Penyediaan layanan  (hasil menengah tingkat 2)	Informasi terinci mengenai penyediaan layanan tertentu. Karena informasi ini biasanya ditangkap oleh penyedia layanan (dan karena itu rentan untuk 'dimainkan'), diperlukan adanya beberapa sistem verifikasi independen
6) Kualitas layanan  (hasil menengah tingkat 3)	Informasi mengenai kualitas layanan biasanya dipicu oleh indikator seperti hasil uji, dan bergantung pada adanya sistem yang dapat dipercaya yang dianggap akurat untuk mengukur dimensi dari kualitas.
7) Hasil (seperti tingkat kemiskinan, penurunan angka kematian ibu, atau peningkatan kemampuan baca tulis)	Informasi mengenai hasil biasanya diukur dengan survei, dan jika dikaitkan dengan transfer dana tahunan akan memerlukan pengukuran yang sebanding dengan menggunakan definisi yang sama selama beberapa tahun.

### Mekanisme verifikasi dan pengawasan independen sangatlah penting

Pengaturan pengawasan sangatlah penting untuk memastikan bahwa transfer dana berbasis kinerja tetap dapat dipercaya. Pengalaman dalam proyek LGDP menunjukkan pentingnya mekanisme verifikasi independen (dalam hal ini dilaksanakan oleh BPKP) untuk melakukan pengukuran kinerja yang baik. Penggabungan fungsi audit yang baik dalam perancangan skema insentif juga penting untuk mengatasi kecenderungan perilaku mencari rente (*rent-seeking*)<sup>86</sup>. Unit audit internal di lingkungan pemerintah daerah juga dapat memainkan peranan penting, terutama di saat mereka berevolusi dari berfokus pada kepatuhan prosedural ke audit kinerja.

### Prediktabilitas dan konsistensi selama jangka menengah meningkatkan prospek pencapaian hasil dengan DAK

Akhirnya, cara transfer dana bersyarat diintegrasikan ke dalam proses penganggaran daerah juga sangat penting. Insentif kinerja bekerja karena merupakan “permainan yang berulang” — yang berarti bahwa pemerintah daerah akan meningkatkan perilaku yang mendapat penghargaan dan diperkuat dengan meningkatnya penghargaan. Untuk dapat memanfaatkan siklus positif ini, harus ada konsistensi dalam peraturan DAK dari satu tahun ke tahun berikutnya. Kebijakan DAK saat ini tidak dapat diprediksi (DAK yang berbeda muncul dan menghilang dalam APBN dari satu tahun ke tahun berikutnya) dan petunjuk teknis (juknis) yang berubah setiap tahunnya.

<sup>86</sup> Olken (2007)

Ketidakpastian ini menyebabkan belanja yang berkualitas buruk, baik karena pemerintah daerah tidak dapat memulai pengadaan awal maupun karena mereka mungkin harus menunggu sampai proses revisi anggaran memasukkan proyek ke dalam anggaran. Dua reformasi berikut ini dapat memperbaiki prospek perencanaan dan penganggaran DAK yang baik di tingkat daerah: (i) berkomitmen terhadap program prioritas nasional, menggabungkan DAK sebagai cara untuk penyediaan layanan daerah, dalam jangka menengah dan bukan hanya berdasarkan tahunan saja; (ii) melibatkan DPR dalam pembahasan di tingkat kebijakan mengenai pemilihan jenis DAK dan mengupayakan kesepakatan mengenai pagu awal untuk DAK yang utama.

### iii. Mendorong keterlibatan warga yang lebih efektif

*Pemerintah pusat dapat memberdayakan warga dengan mewajibkan pemerintah daerah untuk menciptakan ruang bagi keterlibatan warga, dan mewajibkan adanya transparansi informasi fiskal dan kinerja*

**Berikan informasi terinci kepada para pimpinan daerah mengenai kinerja dan komparator mereka**

Nilai kinerja kumulatif atau komposit tidak mengungkapkan banyak informasi kepada pemerintah daerah mengenai kinerjanya. Selain itu, informasi kinerja hanya memiliki makna jika diperbandingkan dengan pemerintah lainnya — baik ke daerah tetangga di provinsi yang sama, atau daerah lain yang memiliki status pembangunan yang sebanding. Sebagai contoh, suatu tinjauan terhadap Penilaian Kinerja Komprehensif (*Comprehensive Performance Assessment* - CPA) dari dewan daerah (local councils) di Inggris mendapati dampak positif dari penggunaan sistem pemeringkatan 0 sampai 4 bintang sederhana untuk memberi penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah<sup>87</sup>. Di Burkina Faso, pemerintah pusat menerbitkan laporan tahunan mengenai kinerja pemerintah daerah, *Suivi de la Performance Municipale* (Pemantauan Kinerja Kota), yang mencakup indikator utama mengenai kapasitas kelembagaan dan pemberian layanan. Afrika Selatan menerbitkan Kajian Pengeluaran Tahunan Provinsi yang menganalisis pola belanja oleh pemerintah provinsi.

**Akses terhadap informasi harus ditindaklanjuti dengan kebijakan aksi**

*Menyediakan informasi yang relevan (transparansi) pada waktu yang tepat merupakan langkah awal yang penting, namun harus disertai dengan kondisi lain agar informasi ini dapat diakses (publisitas) dan akhirnya dapat ditindaklanjuti (akuntabilitas)*<sup>88</sup>. Organisasi-organisasi kemasyarakatan, media, para peneliti, dan sektor swasta dapat memainkan peranan kunci dalam menerjemahkan dan mengkomunikasikan informasi yang relevan mengenai baiknya kinerja, atau buruknya kinerja para pemimpin terpilih dan pejabat publik. Di Afrika Selatan, data yang dipublikasikan mengenai pemerintah daerah telah memfasilitasi dilakukannya analisis pihak ketiga yang tersedia untuk umum, seperti yang dipublikasikan di [www.municipaliq.co.za](http://www.municipaliq.co.za).

**Pemerintah daerah juga dapat diminta untuk membuat informasi fiskal dan kinerja publik**

Pada awal November 2017, pemerintah memberlakukan peraturan (45 tahun 2017) tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Daerah. Peraturan ini meletakkan dasar untuk mewajibkan pemerintah daerah agar lebih transparan dan melibatkan warga dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, peraturan itu perlu dioperasionalkan. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan meminta pemerintah daerah membuat informasi tentang penggunaan transfer dana bersyarat (DAK) yang tersedia bagi warganya. Cara lain adalah dengan meminta mereka menerbitkan versi “Anggaran secara Singkat” dari anggaran mereka, dan dokumen serupa mengenai laporan keuangan mereka. Selama dua tahun terakhir ini, pemerintah DKI Jakarta telah memberikan preseden yang baik dengan menerbitkan informasi mengenai anggarannya, baik di situsnya maupun dalam bentuk buklet kecil (Kotak 7).

<sup>87</sup> *Audit Commission* (Komisi Audit) (2009).

<sup>88</sup> Bank Dunia, WDR (2017e).

## Kotak 7: Spending Better in DKI Jakarta

## Penganggaran yang berfokus pada warga



DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan dihuni oleh lebih dari 10 juta orang. Kota ini adalah pusat komersial utama di Indonesia dan menyumbang sekitar 25 persen dari PDB non-minyak Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memainkan peranan penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. DKI Jakarta mengelola sumber daya publik sebesar Rp 62 triliun (sekitar USD 5,3 miliar) pada tahun 2017 atau Rp 7 juta per kapita, provinsi dengan pengeluaran tertinggi per kapita di Indonesia. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan

masyarakat sangatlah penting untuk dapat lebih memahami permintaan masyarakat terhadap penyampaian layanan yang lebih baik di DKI Jakarta.

DKI Jakarta, pelopor dalam inisiatif pemerintahan terbuka, telah menerapkan data terbuka dan program kota cerdas sejak tahun 2014. Data anggaran dan informasi mengenai program pembangunan saat ini tersedia untuk umum. Namun demikian, banyak informasi yang ditemukan di situs data terbuka terlalu rumit untuk dicerna bagi kebanyakan warga, dan ini akhirnya akan membatasi dampak data terbuka tersebut dalam pembangunan DKI Jakarta.

Dengan tujuan untuk memperkuat usaha DKI Jakarta dalam menerapkan prakarsa pemerintahan terbuka, Bank Dunia, melalui dukungan *Multi Donor Trust Fund*, memberikan bantuan teknis dua arah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk: (i) pengembangan dari dasbor fiskal siap analisis (*analysis-ready fiscal dashboard*) (pekerjaan yang sedang berjalan); dan (ii) penyusunan anggaran warga atau Anggaran Secara Singkat (*Budget in Brief*). Dasbor ini dirancang untuk meningkatkan manfaat data fiskal yang dapat diakses publik untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti dan meningkatkan pemberian layanan dengan mengubah data anggaran yang tidak standar dan rumit menjadi dasbor fiskal yang dapat disesuaikan dengan analisis. Kegiatan bantuan teknis yang kedua bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Bappeda DKI Jakarta dalam mengembangkan dan menerbitkan Anggaran Secara Singkat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap anggaran dan prioritas pembangunan DKI Jakarta melalui narasi visual yang mudah dipahami. Bappeda telah menghasilkan Anggaran Secara Singkat yang pertama di tahun 2016, dan versi tahun 2017 disampaikan dalam waktu kurang dari sebulan.



### Membuat data yang tersedia untuk publik membuat lingkaran yang benar yang mengarah pada peningkatan kualitas data

Ada kemungkinan salah satu alasan mengapa data pemerintah daerah tidak dipublikasikan secara rutin adalah karena adanya kekhawatiran terhadap keakuratannya. Namun demikian, tidaklah mengherankan jika kurangnya publikasi menyebabkan kurangnya perhatian mengenai keakuratannya, dan kemerosotan lebih lanjut dalam kualitas data. Membalikkan asumsi mengenai kerahasiaan data ini akan membantu meningkatkan kualitas data — jika data tersedia untuk penggunaan yang lebih luas, dan lebih banyak hal yang dapat diteliti oleh masyarakat, kemungkinan besar akan lebih banyak perhatian yang diberikan untuk memastikannya keakuratannya.

## Referensi

- Audit Commission. 2009. Final Score: The Impact of the Comprehensive Performance Assessment of Local Government 2002-08. London.
- Bardhan, P. 2002. Decentralization of Governance and Development, *Journal of Economic Perspectives*, 16(4): 185–205.
- Bank Indonesia. 2017. <http://www.bi.go.id/id/publikasi/neraca-pembayaran/Default.aspx>
- CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. *CPB World Trade Monitor, September 2017*. <https://www.cpb.nl/en/figure/cpb-world-trade-monitor-september-2017>
- Detik.com. 29 September 2017. <https://news.detik.com/berita/d-3664100/bantuan-beras-dikonversi-ke-pangan-untuk-216-daerah-pada-2018>
- Faguet, J.P. 2004. “Does decentralization increase government responsiveness to local needs? Evidence from Bolivia.” *Journal of Public Economics*, 88(3-4): 867-893.
- Fiscal Policy Agency. 2016. “Analysis of E-commerce Development in Indonesia.” Unpublished mimeo.
- International Monetary Fund. 2017. Seeking Sustainable Growth: Short-Term Recovery, Long-Term Challenges. World Economic Outlook. October 2017. Washington, DC.
- Indonesia Investments. 13 November 2017. <https://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/banks-hesitant-to-loan-money-to-indonesia-s-hotel-industry/item8355>
- International Energy Agency. 2017. *World Energy Outlook*. November 2017. Paris: International Energy Agency
- Lewis, B., and P. Smoke. 2008. “Incorporating Subnational Performance Incentives in the Indonesian Intergovernmental Fiscal Framework.” In *National Tax Association Proceedings of the 101<sup>st</sup> Annual Conference on Taxation*, Washington, DC: National Tax Association, pp. 418-26.
- Lewis, B. 2016. “Local government spending and service delivery in Indonesia: the perverse effects of substantial fiscal resources.” *Regional Studies*, DOI: 10.1080/00343404.2016.1216957.
- Lewis, B. 2017a. “Local government form in Indonesia: tax, expenditure, and efficiency effects.” *Studies in Comparative International Development*, DOI 10.1007/s12116-017-9236-z.
- Lewis, B. 2017b. “Local Political Fragmentation: Fiscal and Service Delivery Effects in Indonesia.” Working Papers in Trade and Development, Number 2017/16, Arndt-Corden Department of Economics, Australian National University.
- Martinez-Vazquez, J. and F. Vaillancourt (eds). 2011. *Decentralization in Developing Countries: Global Perspectives on the Obstacles to Fiscal Devolution*. Studies in Fiscal Federalism and State-local Finance series. United Kingdom: Edward Elgar Publishing.
- McCulloch, N., B. Lewis, and A. Sacks. 2015. “Measuring Local Government Service Delivery Performance: Challenges and (Partial) Solutions in Indonesia.” *Journal of International Development*, 28(5), 808-817.
- OECD, UNCTAD and WTO. 2016. “E-commerce for the G20.” Discussion paper for Trade Ministers Meeting, Shanghai, China, July.
- Olken, B. A. 2007. “Monitoring corruption: evidence from a field experiment in Indonesia.” *Journal of Political Economy*, 115(2), 200-249.

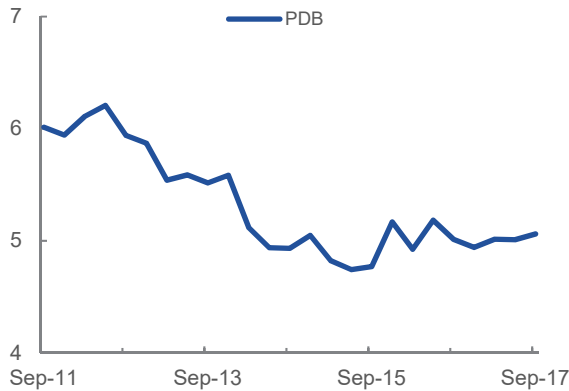


- Pertamina. August 21, 2017. <http://www.pertamina.com/news-room/siaran-pers/konsumsi-bbm-berkualitas-tinggi-makin-meningkat/>
- Pierskalla, J.H. and A. Sacks. 2017. "Unpaved Road Ahead: The Consequences of Election Cycles for Capital Expenditures." *Journal of Politics, forthcoming*.
- Reuters. December 5, 2017. <https://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL3N1O52C0>
- Singapore Post. 2014. *Indonesia's Ecommerce Landscape 2014: Insights into One of Asia Pacific's Fastest Growing Markets*. Singapore: Singapore Post.
- Sjahrir, B. S., K. Katos, and G. G. Schulze. 2013. "Political budget cycles in Indonesia at the district level." *Economics Letters*, 120(2), 342-345.
- Skoufias, E., A. Narayan, B. Dasgupta and K. Kaiser. 2014. "Electoral accountability, decentralisation and service delivery in Indonesia." Policy Research Working Paper No. 5614, Washington, DC: World Bank.
- Smoke, P. 2015. "Accountability and service delivery in decentralising environments: Understanding context and strategically advancing reform. In Whaites, A., E. Gonzalez, S. Fyson and G. Teskey (eds.) *A Governance Practitioner's Notebook: Alternative Ideas and Approaches*. Paris: OECD (<http://www.oecd.org/dac/governance-peace/governance/governance-practitioners-notebook.htm>)
- Smoke, P., G. Loeffler and G. Bosi. 2013. "Literature Review on the Role of Decentralisation/Devolution in Improving Development Outcomes at the Local Level." Report for UK Department for International Development, London.
- The Jakarta Post. November 17, 2017. <http://www.thejakartapost.com/news/2017/11/17/pertamina-says-fuel-prices-need-to-be-increased.html>
- Tirto.id. August 21, 2017. <https://tirto.id/sri-mulyani-harga-bbm-dan-tarif-listrik-tak-naik-pada-2018-cu2E>
- von Luebke, C. 2009. "The political economy of local governance: findings from an Indonesian field study." *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 45(2), 201-230.
- World Bank. 2004. *World Development Report 2004: Making Services Work for Poor People*. Washington, DC: World Bank
- \_\_\_\_\_ 2015a. *Indonesia Economic Quarterly: High Expectations*. March. Jakarta: World Bank.
- \_\_\_\_\_ 2015b. *Indonesia Economic Quarterly: Slower Gains*. July. Jakarta: World Bank.
- \_\_\_\_\_ 2016. "Making Politics Work for Development: Harnessing Transparency and Citizen Engagement." Policy Research Report. Washington, DC.
- \_\_\_\_\_ 2017a. *Indonesia Economic Quarterly: Staying the Course*. March. Jakarta: World Bank.
- \_\_\_\_\_ 2017b. *Indonesia Economic Quarterly: Upgraded*. June. Jakarta: World Bank.
- \_\_\_\_\_ 2017c. *Indonesia Economic Quarterly: Closing the Gap*. October. Jakarta: World Bank.
- \_\_\_\_\_ 2017d. *Commodity Market Outlook*. October. Washington, DC: World Bank
- \_\_\_\_\_ 2017e. *World Development Report 2017: Governance and the Law*. Washington, DC.
- \_\_\_\_\_ 2017f. *LGDP: an impact analysis*. World Bank, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ 2018 (forthcoming). *Global Economic Prospects: Broad-Based Upturn: Will It Last?* January. Washington, DC: World Bank

World Bank and Fiscal Policy Office. 2013. Subnational Government Spending and Public Service Performance in Indonesia. Jakarta.

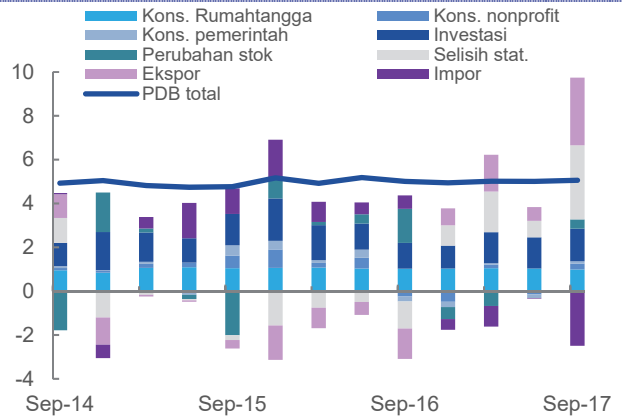
**LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA**

**Lampiran Gambar 1: Pertumbuhan PDB riil**  
(*pertumbuhan triwulanan yoy, persen*)



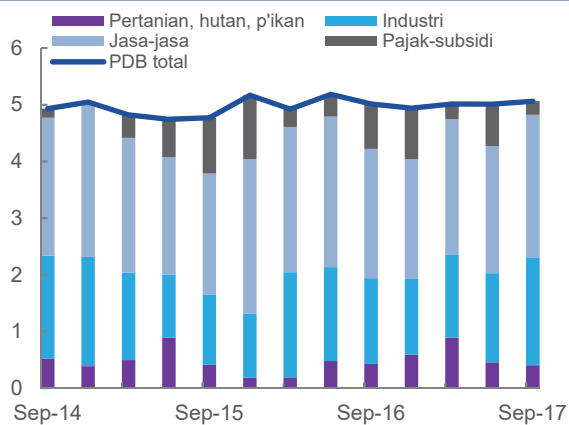
Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

**Lampiran Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB pengeluaran**  
(*kontribusi terhadap pertumbuhan PDB riil yoy, poin persentase*)



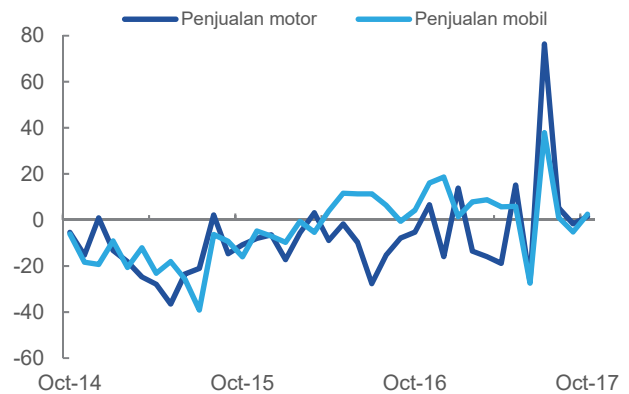
Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia  
Catatan: \*sudah termasuk perubahan inventori

**Lampiran Gambar 3: Kontribusi terhadap PDB produksi**  
(*kontribusi terhadap pertumbuhan PDB riil yoy, poin persentase*)



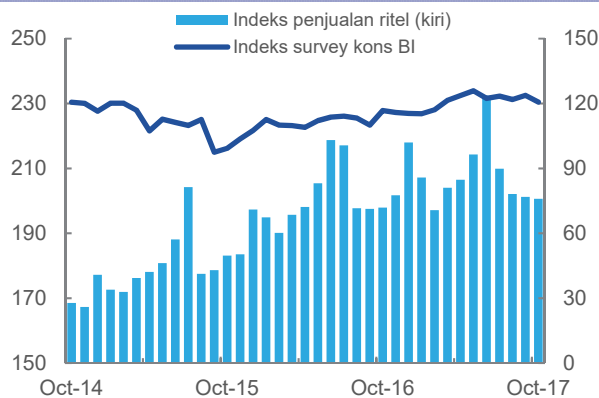
Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

**Lampiran Gambar 4: Penjualan mobil dan sepeda motor**  
(*pertumbuhan yoy, persen*)



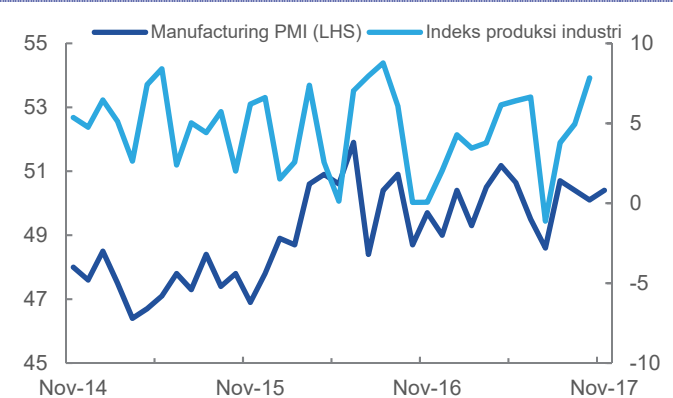
Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

**Lampiran Gambar 5: Indikator konsumen**  
(*tabun dasar penjualan eceran 2010=100*)



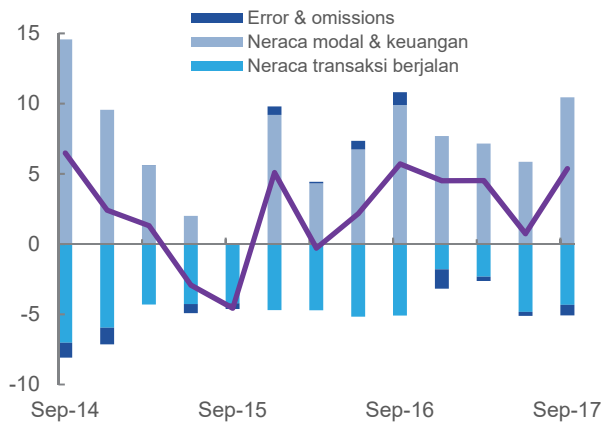
Sumber: BI

**Lampiran Gambar 6: Indikator produksi industri dan Manufaktur PMI**  
(*indeks difusi PMI; pertumbuhan produksi industri yoy, persen*)



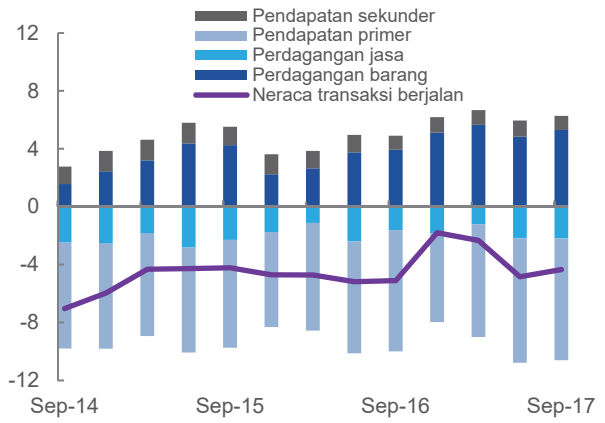
Sumber: BPS; Nikkei/Markit; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 7: Neraca pembayaran  
(USD miliar)



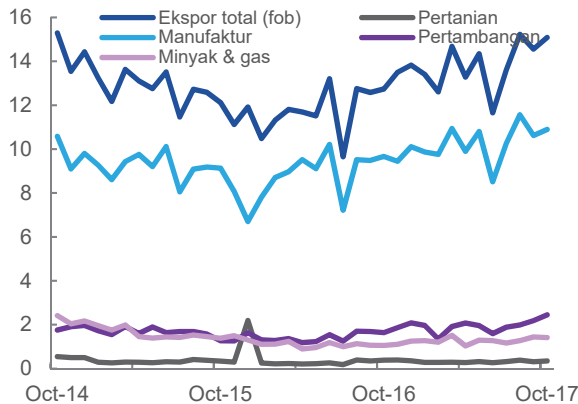
Sumber: BI

Lampiran Gambar 8: Komponen neraca berjalan  
(USD miliar)



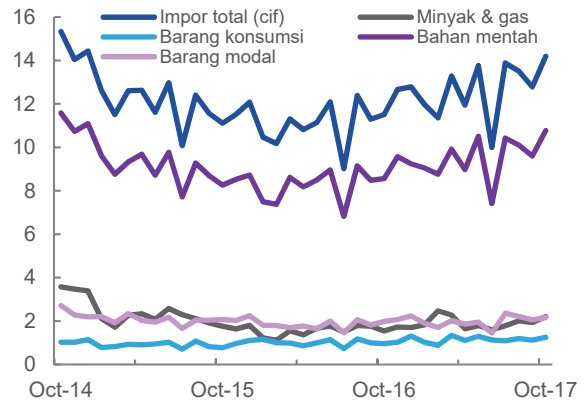
Sumber: BI

Lampiran Gambar 9: Ekspor barang  
(USD miliar)



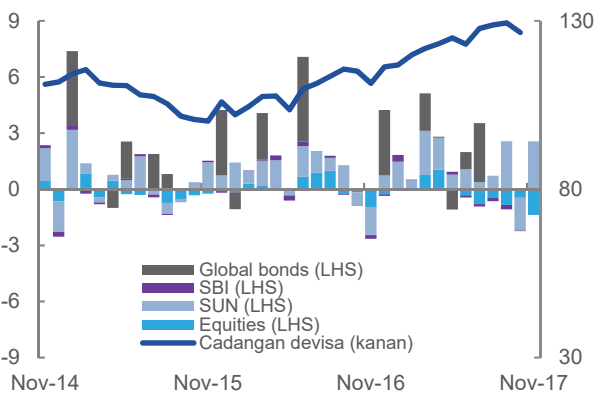
Sumber: BPS

Lampiran Gambar 10: Impor barang  
(USD miliar)



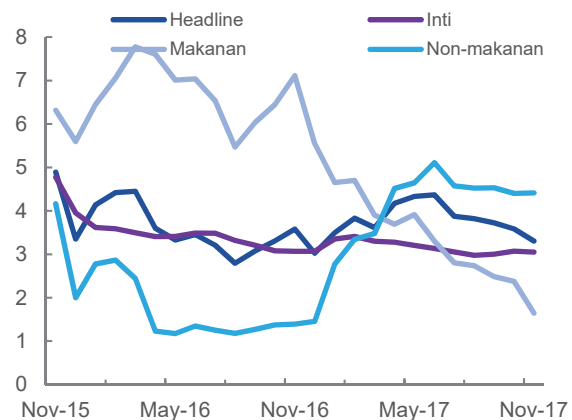
Sumber: BPS

Lampiran Gambar 11: Cadangan devisa dan arus masuk modal  
(USD miliar)



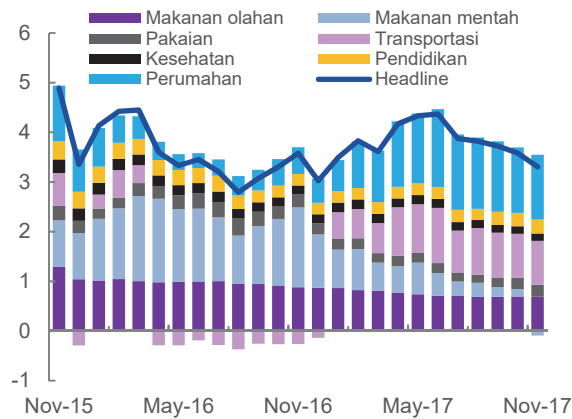
Sumber: BI; Ministry of Finance (MoF)  
Catatan: SUN adalah Surat Utang Negara, SBI adalah sertifikat BI

Lampiran Gambar 12: Inflasi  
(pertumbuhan yoy, persen)



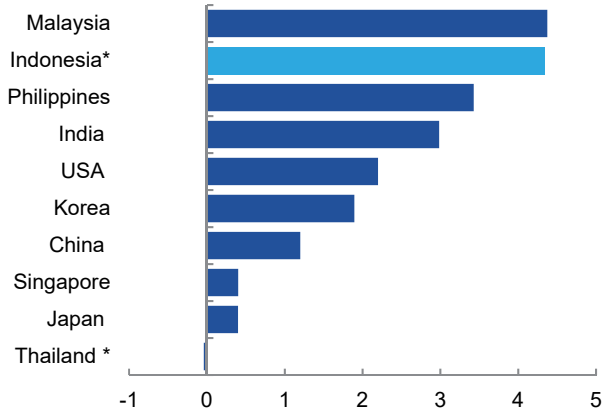
Sumber: BPS; BI; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 13: Rincian IHK bulanan  
(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)



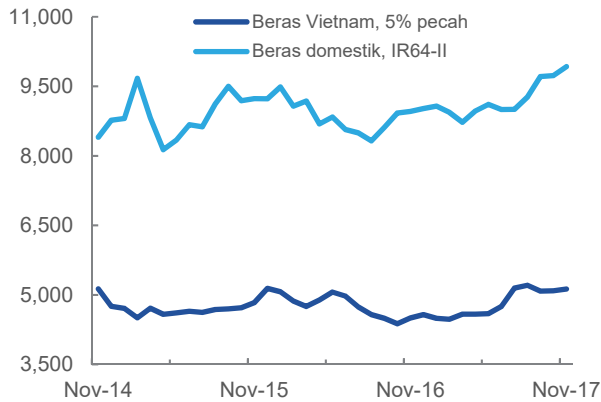
Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 14: Perbandingan inflasi beberapa negara  
(pertumbuhan yoy, persen)



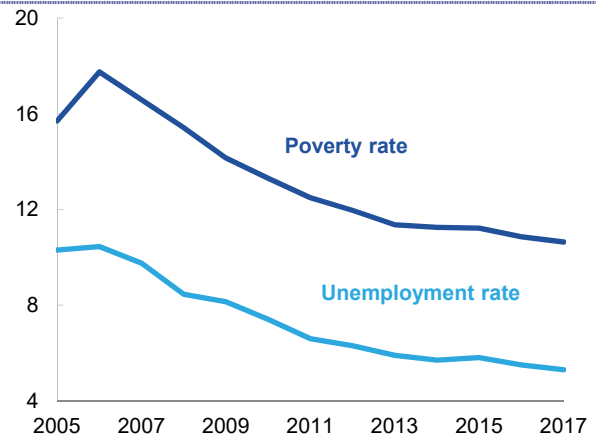
Sumber: BPS; CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia  
Catatan: \* Mei 2017; yang lain April.

Lampiran Gambar 15: Harga beras domestik dan internasional  
(harga kulakan, IDR per kg)



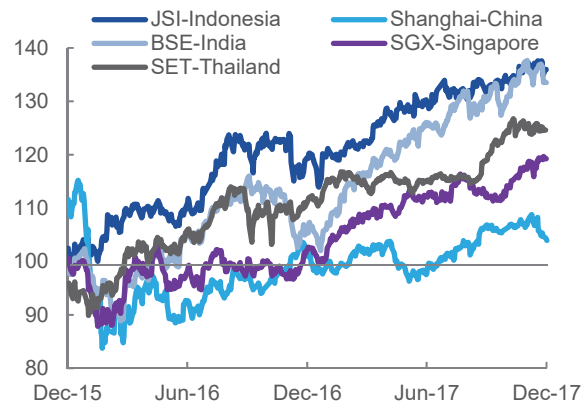
Sumber: Pasar Induk Beras Cipinang; FAO  
Catatan: "5% pecah" merujuk ke kualitas penggilingan beras. 5 persen proporsi biji pecah selama proses penggilingan.

Lampiran Gambar 16: Tingkat kemiskinan dan pengangguran  
(persen)



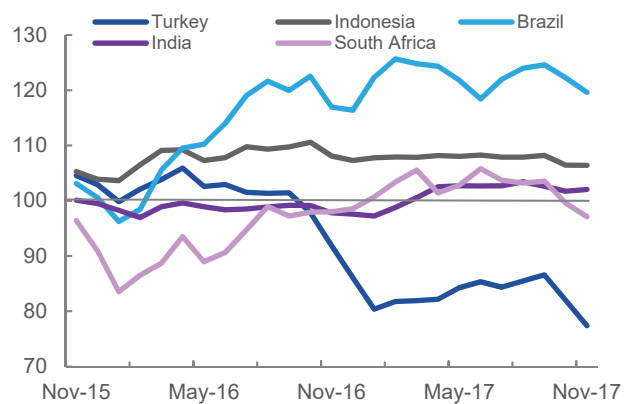
Sumber: BPS  
Catatan: Garis kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional

Lampiran Gambar 17: Indeks saham regional  
(indeks harian, June 5, 2015=100)



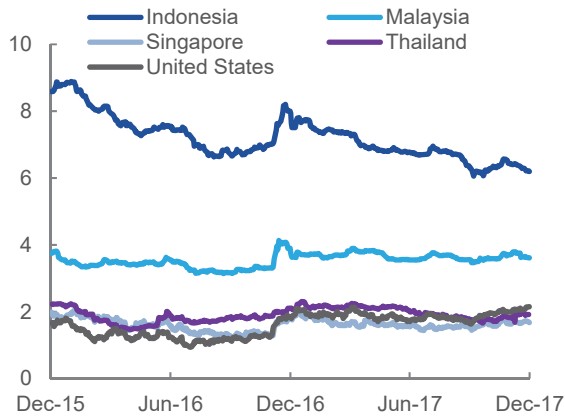
Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 18: Nilai tukar dollar AS  
(indeks bulanan, May 2015=100)



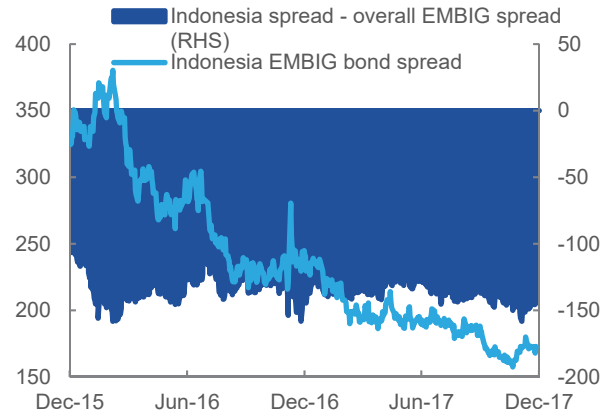
Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 19: Imbal hasil obligasi pemerintah 5-tahunan dalam mata uang lokal  
(persen)



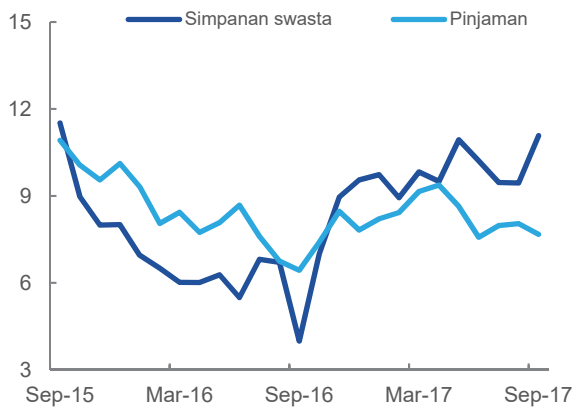
Source: CEIC

Lampiran Gambar 20: Spread obligasi dolar AS terhadap kelompok negara-negara EMBIG Global  
(basis poin)



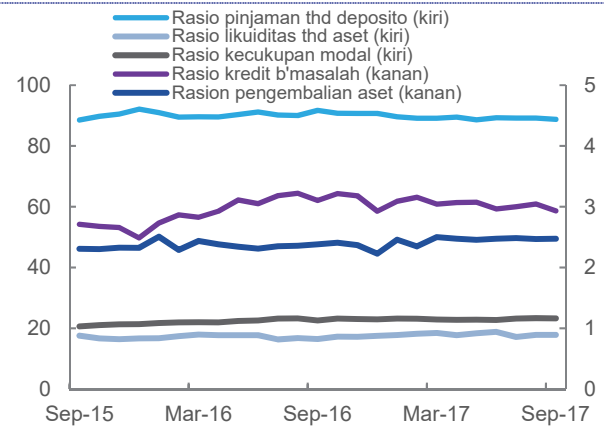
Source: JP Morgan

Lampiran Gambar 21: Pertumbuhan kredit komersial, pedesaan dan deposito  
(pertumbuhan yoy, persen)



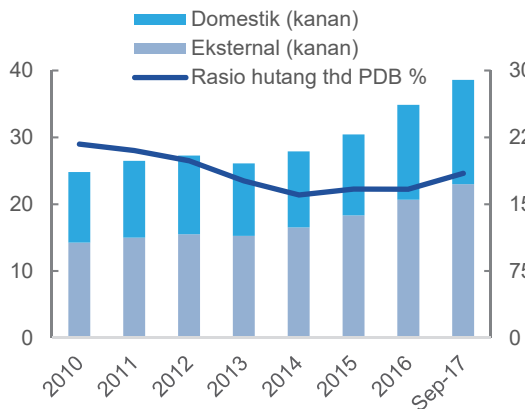
Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 22: Indikator sektor perbankan  
(bulanan, persen)



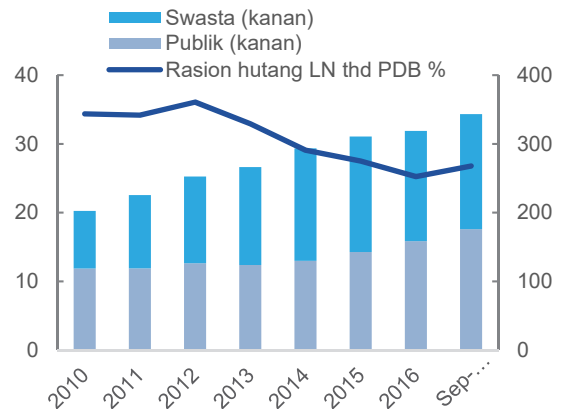
Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 23: Utang pemerintah  
(persen terhadap PDB, Kiri; USD miliar, Kanan)



Sumber: BI; MoF; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 24: Utang luar negeri  
(persen terhadap PDB, Kiri; USD miliar, Kanan)



Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Tabel 1: Realisasi dan proyeksi anggaran belanja Pemerintah

(triliun Rupiah)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Revisi anggaran
<b>A. Penerimaan dan hibah</b>	<b>1,211</b>	<b>1,338</b>	<b>1,439</b>	<b>1,550</b>	<b>1,508</b>	<b>1,556</b>	<b>1,736</b>
1. Penerimaan pajak	874	981	1,077	1,147	1,240	1,285	1,473
2. Penerimaan non-pajak	331	352	355	399	256	262	260
<b>B. Pengeluaran</b>	<b>1,295</b>	<b>1,491</b>	<b>1,651</b>	<b>1,777</b>	<b>1,807</b>	<b>1,864</b>	<b>2,133</b>
1. Pemerintah pusat	884	1,011	1,137	1,204	1,183	1,154	1,367
2. Transfer ke pemerintah daerah	411	481	513	574	623	710	766
<b>C. Neraca utama</b>	<b>9</b>	<b>-53</b>	<b>-99</b>	<b>-93</b>	<b>-142</b>	<b>-126</b>	<b>-178</b>
<b>D. SURPLUS / DEFICIT</b>	<b>-84</b>	<b>-153</b>	<b>-212</b>	<b>-227</b>	<b>-298</b>	<b>-308</b>	<b>-397</b>
(persen dari PDB)	-1.1	-1.9	-2.3	-2.2	-2.6	-2.5	-2.9

Sumber: MoF; Perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: *Budget balance* sebagai persentase dari PDB menggunakan PDB yang direvisi dengan tahun dasar yang disesuaikan.

Lampiran Tabel 2: Neraca pembayaran

(USD miliar)

	2014	2015	2016	2016				2017		
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
<b>Neraca Pembayaran</b>	<b>15.2</b>	<b>-1.1</b>	<b>12.1</b>	<b>-0.3</b>	<b>2.2</b>	<b>5.7</b>	<b>4.5</b>	<b>4.5</b>	<b>0.7</b>	<b>5.4</b>
<i>Persen dari PDB</i>	1.7	-0.1	1.3	-0.1	0.9	2.3	1.9	1.9	0.3	2.0
<b>Neraca berjalan</b>	<b>-27.5</b>	<b>-17.5</b>	<b>-16.8</b>	<b>-4.7</b>	<b>-5.2</b>	<b>-5.1</b>	<b>-1.8</b>	<b>-2.3</b>	<b>-4.8</b>	<b>-4.3</b>
<i>Persen dari PDB</i>	-3.1	-2.0	-1.8	-2.2	-2.2	-2.1	-0.7	-1.0	-1.9	-1.7
Neraca perdagangan	-3.0	5.4	8.4	1.5	1.3	2.3	3.3	4.4	2.7	3.1
Pendapatan bersih & transfer berjalan	-24.5	-22.9	-25.2	-6.2	-6.5	-7.4	-5.1	-6.8	-7.5	-7.4
<b>Neraca modal &amp; keuangan</b>	<b>44.9</b>	<b>16.9</b>	<b>28.6</b>	<b>4.3</b>	<b>6.7</b>	<b>9.9</b>	<b>7.7</b>	<b>7.1</b>	<b>5.9</b>	<b>10.4</b>
<i>Persen dari PDB</i>	5.0	2.0	3.1	2.0	2.9	4.1	3.2	3.0	2.3	4.0
Investasi langsung	14.7	10.7	16.1	2.8	3.1	6.6	3.5	2.8	4.8	6.8
Investasi porfolio	26.1	16.2	19.0	4.4	8.3	6.6	-0.3	6.6	8.1	4.1
Investasi lain	4.3	-10.1	-6.5	-2.9	-4.7	-3.2	4.4	-2.1	-7.1	-0.4
<b>Kesalahan &amp; pembulatan</b>	<b>-2.2</b>	<b>-0.4</b>	<b>0.3</b>	<b>0.1</b>	<b>0.6</b>	<b>0.9</b>	<b>-1.4</b>	<b>-0.3</b>	<b>-0.3</b>	<b>-0.7</b>
<b>Cadangan devisa*</b>	<b>111.9</b>	<b>105.9</b>	<b>116.4</b>	<b>107.5</b>	<b>109.8</b>	<b>115.7</b>	<b>116.4</b>	<b>121.8</b>	<b>123.1</b>	<b>129.4</b>

Lampiran Tabel 3: Perkembangan indikator ekonomi makro Indonesia

	2000	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b><u>Neraca Nasional (% perubahan)<sup>1</sup></u></b>								
PDB riil	4.9	6.2	6.2	6.0	5.6	5.0	4.9	5.0
Investasi riil	11.4	8.5	8.9	9.1	5.0	4.4	5.0	4.5
Konsumsi riil	4.6	4.1	5.1	5.4	5.7	4.7	4.9	4.3
Swasta	3.7	4.8	5.1	5.5	5.5	5.3	4.8	5.0
Pemerintah	14.2	0.3	5.5	4.5	6.7	1.2	5.3	-0.1
Ekspor riil, barang dan jasa	30.6	15.3	14.8	1.6	4.2	1.1	-2.1	-1.7
Impor riil, barang dan jasa	26.6	17.3	15.0	8.0	1.9	2.1	-6.4	-2.3
Investasi (% PDB)	20	31	31	33	5.0	4.4	5.0	4.5
Nominal PDB (milyar dolar AS)	165	755	893	918	915	891	861	933
PDB per kapita (dolar AS)	857	3,167	3,688	3,741	3,668	3,532	3,371	3,603
<b><u>Anggaran Pemerintah Pusat (% GDP)<sup>2</sup></u></b>								
Penerimaan dan hibah	20.8	14.5	15.5	15.5	15.1	14.7	13.1	12.5
Penerimaan bukan pajak	9.0	3.9	4.2	4.1	3.7	3.8	2.2	2.1
Penerimaan pajak	11.7	10.5	11.2	11.4	11.3	10.9	10.8	10.4
Pengeluaran	22.4	15.2	16.5	17.3	17.3	16.8	15.7	15.0
Konsumsi	4.0	3.6	3.8	3.9	4.1	4.0	4.5	4.6
Modal	2.6	1.2	1.5	1.7	1.9	1.4	1.9	1.4
Bunga pinjaman	5.1	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5
Subsidi	6.3	2.8	3.8	4.0	3.7	3.7	1.6	1.4
Surplus/defisit	-1.6	-0.7	-1.1	-1.8	-2.2	-2.1	-2.6	-2.5
Utang Pemerintah	97.9	24.5	23.1	23.0	24.9	24.7	26.8	27.0
Utang luar negeri pemerintah	51.4	11.1	10.2	9.9	11.2	10.2	11.9	11.3
Total utang luar negeri (juga utang swasta)	87.1	26.8	25.2	27.5	29.1	32.9	36.1	34.0
<b><u>Neraca Pembayaran (% PDB)<sup>3</sup></u></b>								
Neraca pembayaran keseluruhan	..	4.0	1.3	0.0	-0.8	1.7	-0.1	1.3
Neraca transaksi berjalan	4.8	0.7	0.2	-2.7	-3.2	-3.1	-2.0	-1.8
Ekspor, barang dan jasa	42.8	22.0	23.8	23.0	22.5	22.3	19.9	18.1
Impor, barang dan jasa	33.9	19.2	21.2	23.2	23.2	22.7	19.3	17.1
Transaksi berjalan	8.9	2.8	2.7	-0.2	-0.7	-0.3	0.6	1.0
Neraca transaksi keuangan	..	3.5	1.5	2.7	2.4	5.0	2.0	3.1
Penanaman modal langsung, neto	-2.8	1.5	1.3	1.5	1.3	1.7	1.2	1.6
Cadangan devisa bruto (USD billion)	29.4	96.2	110.1	112.8	99.4	111.9	105.9	116.4
<b><u>Moneter (% change)<sup>3</sup></u></b>								
Deflator PDB <sup>1</sup>	20.4	8.3	7.5	3.8	5.0	5.4	4.0	2.5
Suku bunga Bank Indonesia (%)	..	6.9	6.5	4.7	6.0	7.9	7.6	7.2
Kredit domestik	..	22.8	24.6	23.1	21.6	11.6	10.4	7.9
Nilai tukar Rupiah/Dolar AS (rata-rata) <sup>4</sup>	8,392	9,087	8,776	9,384	10,460	11,869	13,389	13,309
<b><u>Harga-harga (% perubahan)<sup>1</sup></u></b>								
Indeks harga konsumen (akhir periode)	9.4	7.0	3.8	3.7	8.1	8.4	3.4	3.0
Indeks harga konsumen (rata-rata)	3.7	5.1	5.3	4.0	6.4	6.4	6.4	3.5
Harga minyak mentah Indonesia (US\$ per barel) <sup>5</sup>	28	79	112	113	107	60	36	51

Sumber: 1 BPS dan Perhitungan staf Bank Dunia, menggunakan angka yang direvisi dan rebased, 2 MoF dan Perhitungan staf Bank Dunia, 3 BI, 4 CEIC



Lampiran Tabel 4: Sekilas indikator perkembangan Indonesia

	2000	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Kependudukan<sup>1</sup></b>								
Penduduk (juta)	213	242	245	248	251	254	258	261
Tingkat pertumbuhan penduduk (%)	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1
Penduduk perkotaan (% terhadap total)	42	50	51	51	52	53	53.7	55
Rasio ketergantungan (% penduduk usia kerja)	55	51	51	50	50	49	49.0	49
<b>Angkatan Kerja<sup>2</sup></b>								
Angkatan kerja, total (juta)	98	117	117	120	120	122	122	125
Laki-laki	60	72	73	75	75	76	77	77
Perempuan	38	45	44	46	45	46	46	48
Kontribusi tenaga kerja sektor pertanian (%)	45	38	36	35	35	34	33	32
Kontribusi tenaga kerja sektor industri (%)	17	19	21	22	20	21	22	21
Kontribusi tenaga kerja sektor jasa (%)	37	42	43	43	45	45	45	47
Tingkat pengangguran, total (% angkatan kerja)	8.1	7.1	7.4	6.1	6.2	5.9	6.2	5.6
<b>Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan<sup>3</sup></b>								
Konsumsi rumah tangga, median (Rp 000 per bulan)	104	374	421	446	487	548	623	697
Garis kemiskinan nasional (Rp 000 per bulan)	73	212	234	249	272	303	331	354
Jumlah penduduk miskin (juta)	38	31	30	29	28	28	29	28
Penduduk miskin (% penduduk dibawah garis kemiskinan)	19.1	13.3	12.5	12.0	11.4	11.3	11.2	10.9
Di perkotaan	14.6	9.9	9.2	8.8	8.4	8.3	8.3	7.8
Di perdesaan	22.4	16.6	15.7	15.1	14.3	14.2	14.2	14.1
Laki-laki sebagai kepala rumah tangga	15.5	11.0	10.2	9.5	9.2	9.0	9.3	9.0
Perempuan sebagai kepala rumah tangga	12.6	9.5	9.7	8.8	8.6	8.6	11.1	9.8
GINI indeks	0.30	0.38	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40
Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok termiskin (%)	9.6	7.9	7.4	7.5	7.4	7.5	7.2	7.1
Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok terkaya (%)	38.6	40.6	46.5	46.7	47.3	46.8	47.3	46.2
Pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat (% PDB) <sup>4</sup>	..	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6
<b>Kesehatan dan Gizi<sup>1</sup></b>								
Tenaga kesehatan (per 1,000 people)	0.16	0.29	..	0.20	..	..	..	..
Tingkat kematian balita (per 1000 anak usia dibawah 5 tahun)	52	33	32	30	29	28	27	..
Tingkat kematian bayi lahir (per 1000 kelahiran hidup)	22	16	16	15	15	14	14	..
Tingkat kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup)	41	27	26	25	24	24	23	..
Rasio kematian persalinan (perkiraan, per 100,000 kelahiran hidup)	265	165	156	148	140	133	126	..
Imunisasi campak (% anak usia dibawah 2 tahun)	76	78	80	82	81	75	75	76
Total pengeluaran untuk kesehatan (% GDP)	2.0	2.9	2.7	2.9	2.9	2.8	..	..
Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan (% GDP)	0.7	1.1	1.1	1.2	1.2	1.1	1.2	1.4
<b>Pendidikan<sup>3</sup></b>								
Angka partisipasi murni (APM) SD, (%)	..	92	92	93	92	93	97	97
APM perempuan (% dari total partisipasi)	..	48	49	49	50	48	49	49
Angka partisipasi murni pendidikan tingkat menengah, (%)	..	61	60	60	61	65	66	66
APM perempuan (% dari total partisipasi)	..	50	50	49	50	50	51	51
Angka partisipasi murni universitas/pendidikan tinggi, (%)	..	16	14	15	16	18	20	21
APM perempuan (% dari total partisipasi)	..	53	50	54	54	55	56	55
Angka melek huruf Dewasa (%)	..	91	91	92	93	93	95	95
Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% terhadap PDB) <sup>5</sup>	..	3.5	3.6	3.8	3.8	3.6	3.5	3.3
Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% terhadap APBN) <sup>5</sup>	..	20.0	20.2	20.1	20.0	19.9	20.6	20.0
<b>Air Bersih dan Kesehatan lingkungan<sup>1</sup></b>								
Penduduk dengan akses air bersih disempurnakan (% tot penduduk)	78	85	85	86	86	87	87	..
Di perkotaan (% penduduk perkotaan)	91	93	93	94	94	94	94	..
Di perdesaan (% penduduk perdesaan)	68	76	77	77	78	79	80	..
Penduduk dengani akses kesehatan lingkungan (% tot penduduk)	44	57	58	59	60	61	61	..
Di perkotaan (% penduduk perkotaan)	64	70	71	71	72	72	72	..
Di perdesaan (% penduduk perdesaan)	30	44	45	46	47	48	48	..
<b>Lainnya<sup>1</sup></b>								
Pengurangan resiko bencana (skala 1-5; 5=terbaik)	..	..	3.3	..	..	..	..	..
Proporsi perempuan yang duduk di parlemen (%) <sup>6</sup>	8	18	18	19	19	17	17	17

Sumber: <sup>1</sup> World Development Indicators; <sup>2</sup> BPS (Sakernas); <sup>3</sup> BPS (Susenas) dan Bank Dunia; <sup>4</sup> MoF, Bappenas, dan Perhitungan staf Bank Dunia, hanya mencakup belanja pada Raskin, Askes, Beasiswa untuk keluarga miskin, dan PKH dan realisasi; <sup>5</sup> MoF; <sup>6</sup> Inter-Parliamentary Union



**Australian Government**  

---

**Department of Foreign Affairs and Trade**

Supported by funding from the Australian Government  
(Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT), under the  
Support for Enhanced Macroeconomic and Fiscal Policy Analysis  
(SEMEFPA) program.